

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIMA**



RENCANA KERJA TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohiim,

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan rahmatNya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima Tahun 2026 telah berhasil disusun. Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda 2025-2029, dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Renja ini, secara rinci telah ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bima pada tahun 2026. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Diharapkan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bima dapat tercapai dengan optimal.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bima, November 2025

KEPALA BAPPEDA KAB. BIMA



TAUFIK, ST., MT

NIP. 197106211998031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
 BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN	 42
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	45
3.3. Program dan Kegiatan	46
 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 50
 BAB 5 PENUTUP	 61
5.1. Catatan Penting	61
5.2. Kaidah Pelaksanaan	61
5.3. Renca Tindak Lanjut	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah -----	8
Tabel 2.2.	Tabel T-C.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bima -----	15
Tabel 2.3.	Teknik Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bima -----	19
Tabel 2.4.	Masalah, Pokok Masalah, dan Akar Masalah yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Bima -----	27
Tabel 2.5.	Tabel T-C.31 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bima -----	29
Tabel 2.6.	Tabel T-C.32 : Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Bappeda Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 -----	41
Tabel 3.1.	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dengan Prioritaa Pembangunan Naaional -----	43
Tabel 3.2.	Sinkronieasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat -----	44
Tabel 3.3.	Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten -----	45
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2026 -----	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.15.5-3406 Tahun 2024 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025-2029. Berangkat dari latar belakang tersebut maka setiap tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima menyusun Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerjaja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima; Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7

- Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 – 2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud Dokumen Renja BAPPEDA Kabupaten Bima disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi BAPPEDA Kabupaten Bima dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Tujuan Dokumen Renja BAPPEDA Kabupaten Bima disusun bertujuan antara lain untuk:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Bima untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
 - c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Rensra PD Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima, meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dengan menyajikan T-C.29 yang sesuai dengan ketentuan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja NSPK SPM, IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan dengan menyajikan T-C.30 yang sesuai dengan ketentuan.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan Isu strategis yang termuat dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah (Renstra PD), analisa terhadap kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan tantangan eksternal dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Membandingkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Tahun 2026 dengan menyajikan Form TC 31 sesuai dengan ketentuan.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Menguraikan hasil usulan Musrenbang RKPD di Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah yang disajikan pada Form TC 32 sesuai dengan ketentuan

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Melakukan telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional, program prioritas nusa tenggara barat dan Program Prioritas Kabupaten Bima
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Memuat tujuan dan sasaran Renja yang mengacu pada Renstra
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta aktivitas beserta indikator, target kinerja dan kebutuhan dana untuk tahun rencana, dengan menyajikan Form TC 33 serta memperhatikan kesesuaian Form TC 33.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dengan menyajikan rekapitulasi rencana kerja dan pendanaan di tahun rencana serta menampilkan rekapitulasi pendanaan yang terdiri dari rekapitulasi anggaran keseluruhan, rekapitulasi anggaran yang mendukung kinerja SPM, rekapitulasi DAU Earmark, dan rekapitulasi pendanaan yang bersumber dari DAU, DAK, DBHCHT, Pajak Rokok serta dana spesifik lainnya.

BAB 5 PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perangkat Daerah, yaitu kewajiban perangkat daerah untuk melaksanakan serta mengevaluasi rencana kerja yang telah ditetapkan Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda Kabupaten Bima Tahun n-2 (2024) dan Tahun n-1 (2025) dan perkiraan capaian Tahun 2026 yang didasarkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2021-2016 dan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:
 1. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 3. Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
- b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
 1. Faktor penyebab tidak tercapainya keluaran yang direncanakan dikarenakan :
 - Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana serta kurangnya Kualitas dan kuantitas SDM
 - kualitas dokumen perencanaan belum optimal dikarenakan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya didukung dengan pemenuhan data yang memadai
 - koordinasi dan sinkronisasi capaian program kabupaten dan perangkat daerah belum optimal
 2. Faktor pendukung terpenuhinya keluaran yang direncanakan dikarenakan :
 - pengaturan fasilitasi secara bijak agar pemenuhan dapat tercapai serta meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan Bimtek dan Sosialisasi
 - perlu perencanaan dan koordinasi yang baik dengan lembaga vertikal maupun dengan PD untuk penguatan data dan monev yang lebih baik
 - meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dengan perencanaan, monev dan pengendalian yang sinergis

3. Faktor pendorong yang menyebabkan target kinerja melebihi keluaran yang direncanakan adalah :
 - Komitmen pimpinan dalam pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas SDM ASN
 - Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan
 - Komitmen pimpinan mengawal tahapan proses perencanaan secara optimal
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
 1. Dalam penyajian Renja sudah diukur sesuai dengan target yang terdapat pada program dan kegiatan yang telah direncanakan tetapi pada proses berjalan, terdapat penyesuaian target yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan serta regulasi yang berlaku sehingga perhitungan capaian realisasi kinerja ada yang tidak sesuai target pada Dokumen Renja.
 2. Perubahan pada pelaksanaan Dokumen Renja menyebabkan Capaian realisasi Pelaksanaan Renstra juga mengalami perubahan secara keseluruhan.
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
 1. Menjalinkan Komunikasi secara intens dan berkelanjutan dengan Kementerian dan Provinsi serta PD Pengawas terkait Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
 2. pelatihan dan workshop untuk peningkatan Pemahaman Perangkat Daerah terkait Dokumen Perencanaan
 3. membuat inovasi dengan melaksanakan penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2024 dan pencapaian Renstra Bappeda Kabupaten Bima sampai dengan Proyeksi Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.

T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Nama perangkat daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bima

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (Renstra PD 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2024			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2025 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7 + 9	11 = 10 / 4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01	PERENCANAAN									
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja pelayanan internal Bappeda Persentase pencapaian kinerja keuangan Bappeda Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Bappeda	100 Persen	100	100	100	100%	100	100	100%
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	100 Persen	100	100	100	100%	100	100	100%
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11	11	11	100%	11	11	100%
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8	8	8	100%	8	8	100%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar Jumlah Dokumen Lapoarn Administrasi Keuagnan	6 Dokumen	6	6	6	100%	6	6	100%
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	64	66	73	111%	73	73	114%
5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	6	6	6	100%	6	6	100%
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset sesuai standar	4 Dokumen	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5	5	5	100%	5	5	100%
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaianya	4 Dokumen	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3	3	3	100%	3	3	100%
	[Meningkatnya pencapaian kinerja Bappeda]	Persentase kinerja pelayanan internal Bappeda Persentase pencapaian kinerja keuangan Bappeda Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Bappeda	100 Persen	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (Renstra PD 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2024			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2025 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7 + 9	11 = 10 / 4
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						4	4	100%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Kantor	10 Laporan	10	10	10	100%	10	10	100%
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6	6	5	83%	5	5	83%
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24	24	24	100%	24	24	100%
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	12	12	12	100%	12	12	100%
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa penunjang Perangkat Daerah	4 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	12	12	100%	12	12	100%
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	95 Persen	95	95	95	100%	95	95	100%
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12	12	12	100%	12	12	100%
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd	100 Pesen	100	100	100	100%	100	100	100%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu Jumlah Dokumen Sinkronisasi program dan sasaran RPJMD dalam RKPd dan Renstra Perangkat Daerah	5 Dokumen	5	5	5	100%	5	5	100%
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1	1	1	100%	1	1	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (Renstra PD 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2024			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2025 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7 + 9	11 = 10 / 4
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	486 Usulan	480	482	484	100%	1200	1200	250%
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3	3	3	100%	3	3	100%
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi yang terpenuhi	3 Dokumen	3	3	3	100%	3	3	100%
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	35 Orang	35	35	35	100%	35	35	100%
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Capaian Indikator RPJMD Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan provinsi	1 Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Data Dalam SIPD untuk penyusunan Perencanaan Daerah Dokumen Perencanaan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	95 Persen	100	100	100	100%	100	100	100%
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (Renstra PD 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2024			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2025 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7 + 9	11 = 10 / 4
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Antara Dokumen Perencanaan Daerah dengan Perangkat Daerah sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	100	100	100	100%	100	100	100%
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
	[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (Renstra PD 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2024			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2025 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7 + 9	11 = 10 / 4
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen verifikasi kesesuaian program, kegiatan, indikator, target, dan pagu antara Renja OPD dan RKPD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	100	100	100	100%	100	100	100%
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	4	4	4	100%	4	4	100%
	[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	100	100	100	100%	100	100	100%
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen verifikasi kesesuaian program, kegiatan, indikator, target, dan pagu antara Renja OPD dan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	100	100	100	100%	100	100	100%
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	1 Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (Renstra PD 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2024			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2025 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7 + 9	11 = 10 / 4
	Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPIPD, RPJMD dan RKPD)								
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPIPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1	1	1	100%	1	1	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Analisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel TC-30, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bima

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	Satuan	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Renstra PD	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2025 (TW 1)	Tahun 2026	
	Renstra 2021-2026										
1	Kepatuhan terhadap posentase keselarasan dokumen RKPd terhadap dokumen RPJMD	Persen	N/A	N/A	95	95	95	100	100		
2	Kepatuhan terhadap Persentase Target RKPd yang telah ditetapkan	Persen	N/A	N/A	100	100	100	90	90		
3	Menigkatnya Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPd	Persen	N/A	N/A	70	70	70	76	78		
4	Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	N/A	N/A	75	75	75	71			BRIDA mulai 2025
	Renstra 2025-2029										
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	N/A	N/A	70	75	80	70	78	80	
2	Persentase kualitas integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	N/A	N/A	85	90	95	85	100	95	
3	Kesesuaian antara RKPd dengan APBD	Persen	N/A	N/A	85	90	95	85	100	95	
4	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai	N/A	N/A	82	84	85	82	84	85	
	Program										
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd	Persen	N/A	N/A	85	90	94	100	111	94	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	N/A	N/A	85	90	94	100	111	94	

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	Satuan	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Renstra PD	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025 (TW 1)	Tahun 2026
3	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	N/A	N/A	85	90	95	100	111	95	
4	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen	N/A	N/A	85	90	95	100	111	95	
5	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	N/A	N/A	85	90	95	100	111	95	
6	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanan program Bappeda	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase pencapaian kinerja keuangan Bappeda	Persen	N/A	N/A	93	100	100	96,06	20	100	
8	Persentase kinerja pelayanan internal Bappeda	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Teknik Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bima

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Kuantitatif	Hasil Pengolahan data dan indikator sesuai Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Self Assasment. Data bersumber dari Seluruh Bidang	Melakukan penilaian sesuai petunjuk dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
2	Persentase kualitas integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Kuantitatif	Kepatuhan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 tahun 2017	Self Assasment. Data bersumber dari Seluruh Bidang	Melakukan evaluasi terhadap hasil kualitas integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
3	Kesesuaian antara RKPD dengan APBD	Kuantitatif	1. Perbandingan jumlah program dalam RKPD dengan jumlah program dalam APBD tahun perhirungan. 2. Perbandingan jumlah kegiatan dalam RKPD dengan jumlah kegiatan dalam APBD tahun perhirungan. 3. Perbandingan jumlah sub kegiatan dalam RKPD dengan jumlah sub kegiatan dalam APBD tahun perhirungan. 4. Perbandingan jumlah anggaran dalam RKPD dengan jumlah anggaran dalam APBD tahun perhirungan.	Self Assasment. Data bersumber dari Seluruh Bidang	Melakukan evaluasi terhadap Kesesuaian antara RKPD dengan APBD
4	Nilai SAKIP Bappeda	Kuantitatif	Laporan Hasil Reviuw SAKIP oleh Inspektorat	Data bersumber dari perhitungan Inspektorat	Melakukan penilaian sesuai Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Kuantitatif	Dihitung berdasarkan jumlah Variabel dalam RKPD yang sesuai RPJMD dibagi jumlah Variabel pada RPJMD dikali 100% Variabel : a. Keselarasan Sasaran b. Keselarasan Program c. Keselarasan Indikator d. Keselarasan Target	Self Assasment. Data bersumber dari Seluruh Bidang	Melakukan evaluasi terhadap penjabaran keselarasan RPJMD dengan RKPD : a. Seluruh sasaran jangka menengah dijawab melalui prioritas pembangunan tahun bersesuaian b. Seluruh Program Prioritas RPJMD menjadi Program RKPD (tahun bersesuaian) c. Indikator RPJMD pada seluruh jenjang kinerja (Tujuan, Sasaran, Program digunakan pada RKPD (tahun bersesuaian) d. Target RKPD pada seluruh jenjang kinerja (Tujuan, sasaran, program prioritas) minimal sama dengan target RPJMD
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Kuantitatif	Dihitung berdasarkan jumlah Variabel dalam Renstra yang sesuai RPJMD dibagi jumlah Variabel pada RPJMD dikali 100%	Self Assasment. Data bersumber dari Seluruh Bidang	Melakukan evaluasi terhadap penjabaran keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah : 1. Tujuan Perangkat Daerah merupakan turunan/mendukung tujuan/sasaran RPJMD; 2.1. Indikator kinerja tujuan dan sasaran RENSTRA merupakan turunan dan/atau mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD; 2.2. Target kinerja tujuan & sasaran RENSTRA PD memenuhi kriteria berikut: - Minimal sama dengan target RPJMD (jika memiliki indikator sama dengan RPJMD); atau - Telah dihitung secara cermat dan diyakini dapat mengungkit pencapaian target tujuan/sasaran RPJMD (jika berbeda dengan indikator RPJMD). 3. RENSTRA PD telah mengakomodir Program RPJMD yang menjadi tugas/urusan/sektornya (jika mengampu program RPJMD); 4. Indikator kinerja Program pada RENSTRA PD sama dengan yang digunakan dalam RPJMD (jika mengampu program RPJMD) 5. Target kinerja Program pada RENSTRA PD minimal sama dengan target RPJMD (jika

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
					mengampu program RPJMD)
7	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kuantitatif	Dihitung berdasarkan jumlah Variabel dalam Renja PD yang sesuai RKPD dibagi jumlah Variabel pada RKPD dikali 100%. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Variabel : 1. Keselarasan Nomenlatur dan jumlah Program 2. Keselarasan Nomenlatur dan jumlah Kegiatan 3. Keselarasan Nomenlatur dan jumlah Sub Kegiatan 4. Keselarasan Indikator kinerja Program 5. Keselarasan Indikator kinerja Kegiatan 6. Keselarasan Indikator kinerja Sub Kegiatan 7. Keselarasan Target kinerja Program 8. Keselarasan Target kinerja Kegiatan 9. Keselarasan Target kinerja Sub Kegiatan	Self Assasment. Data bersumber dari Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Melakukan evaluasi terhadap penjabaran keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 1. Seluruh Program RKPD digunakan pada RENJA PD (sesuai urusan/tugas/sektor) 2. Seluruh Kegiatan RKPD digunakan pada RENJA PD (sesuai urusan/tugas/sektor) 3. Seluruh Sub Kegiatan RKPD digunakan pada RENJA PD (sesuai urusan/tugas/sektor) 4.1. Indikator kinerja Program pada RENJA PD sama dengan yang digunakan pada RKPD 4.2. Indikator kinerja Kegiatan pada RENJA PD sama dengan yang digunakan pada RKPD 4.3. Indikator kinerja Sub Kegiatan pada RENJA PD sama dengan yang digunakan pada RKPD; 5.1. Target kinerja Program pada RENJA PD minimal sama dengan target RKPD 5.2. Target kinerja Kegiatan minimal sama dengan target RKPD 5.3. Target kinerja Sub Kegiatan pada RENJA PD minimal sama dengan target RKPD.

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
8	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kuantitatif	Dihitung berdasarkan jumlah Variabel dalam Renja PD yang sesuai RKPD dibagi jumlah Variabel pada RKPD dikali 100%. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Variabel : 1. Keselarasan Nomenlatur dan jumlah Program 2. Keselarasan Nomenlatur dan jumlah Kegiatan 3. Keselarasan Nomenlatur dan jumlah Sub Kegiatan 4. Keselarasan Indikator kinerja Program 5. Keselarasan Indikator kinerja Kegiatan 6. Keselarasan Indikator kinerja Sub Kegiatan 7. Keselarasan Target kinerja Program 8. Keselarasan Target kinerja Kegiatan 9. Keselarasan Target kinerja Sub Kegiatan	Self Assasment. Data bersumber dari Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Melakukan evaluasi terhadap penjabaran keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah : Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. 1. Seluruh Program RKPD digunakan pada RENJA PD (sesuai urusan/tugas/sektor) 2. Seluruh Kegiatan RKPD digunakan pada RENJA PD (sesuai urusan/tugas/sektor) 3. Seluruh Sub Kegiatan RKPD digunakan pada RENJA PD (sesuai urusan/tugas/sektor) 4.1. Indikator kinerja Program pada RENJA PD sama dengan yang digunakan pada RKPD 4.2. Indikator kinerja Kegiatan pada RENJA PD sama dengan yang digunakan pada RKPD 4.3. Indikator kinerja Sub Kegiatan pada RENJA PD sama dengan yang digunakan pada RKPD 5.1. Target kinerja Program pada RENJA PD minimal sama dengan target RKPD 5.2. Target kinerja Kegiatan minimal sama dengan target RKPD 5.3. Target kinerja Sub Kegiatan pada RENJA PD minimal sama dengan target RKPD.

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
9	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Kuantitatif	Dihitung berdasarkan jumlah Variabel dalam Renja PD yang sesuai RKPD dibagi jumlah Variabel pada RKPD dikali 100%. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Variabel : 1. Keselarasan Nomenlatur dan jumlah Program 2. Keselarasan Nomenlatur dan jumlah Kegiatan 3. Keselarasan Nomenlatur dan jumlah Sub Kegiatan 4. Keselarasan Indikator kinerja Program 5. Keselarasan Indikator kinerja Kegiatan 6. Keselarasan Indikator kinerja Sub Kegiatan 7. Keselarasan Target kinerja Program 8. Keselarasan Target kinerja Kegiatan 9. Keselarasan Target kinerja Sub Kegiatan	Self Assasment. Data bersumber dari Bidang Perekonomian dan SDA	Melakukan evaluasi terhadap penjabaran keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah : Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. 1. Seluruh Program RKPD digunakan pada RENJA PD (sesuai urusan/tugas/sektor) 2. Seluruh Kegiatan RKPD digunakan pada RENJA PD (sesuai urusan/tugas/sektor) 3. Seluruh Sub Kegiatan RKPD digunakan pada RENJA PD (sesuai urusan/tugas/sektor) 4.1. Indikator kinerja Program pada RENJA PD sama dengan yang digunakan pada RKPD 4.2. Indikator kinerja Kegiatan pada RENJA PD sama dengan yang digunakan pada RKPD 4.3. Indikator kinerja Sub Kegiatan pada RENJA PD sama dengan yang digunakan pada RKPD 5.1. Target kinerja Program pada RENJA PD minimal sama dengan target RKPD 5.2. Target kinerja Kegiatan minimal sama dengan target RKPD 5.3. Target kinerja Sub Kegiatan pada RENJA PD minimal sama dengan target RKPD.

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
10	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Bappeda	Kuantitatif	Dihitung berdasarkan Jumlah Dokumen Penganggaran dan Perencanaan kinerja Tahun N dibagi Jumlah seluruh dokumen Penganggaran dan Perencanaan kinerja Tahun N dikali 100%. Dokumen penganggaran dan perencanaan kinerja tersebut berupa : 1. Dokumen Renstra Bappeda 2. Dokumen Renja Bappeda 3. Dokumen Perubahan Renja Bappeda 4. Dokumen Rencana Aksi Renja 5. Dokumen Risk Risiko Renstra / Dokumen Risk Register 6. IKU dan IKI 7. Perjanjian Kinerja 8. RKA dan Perubahan RKA 9. DPA dan Perubahan DPA 10. Pohon Kinerja dan Cascading 11. Pakta Integritas 12. Rencana Umum Pengadaan Dokumen laporan kinerja yang disusun adalah berupa : 1. dokumen LkjiP Bappeda 2. LPPD Bappeda 3. Laporan Rencana Aksi 4. Laporan Capaian Triwulan capaian Renja 5. Laporan SAKIP 6. Laporan SPIP	Self Assasment. Data bersumber dari Sekertariat	Melakukan evaluasi terhadap hasil Penilaian Kinerja pelaksanaan program Bappeda

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
11	Persentase pencapaian kinerja keuangan Bappeda	Kuantitatif	Dihitung berdasarkan Jumlah realiasi administrasi keuangan Tahun N dibagi Jumlah total anggaran Admintrasi Keuangan Perangkat daerah dikali 100%. Dokumen Administrasi Keuangan : 1. Neraca, LRA dan LO 2. CALK 3. Laporan Pencairan sesuai Sumber Dana 4. Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, dan Semesteran 5. Laporan SPJ Fungsional 6. Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7. Laporan Tanggapan Pemeriksaan Inspektorat dan/atau BPK 8. Laporan Keuangan Tahunan	Self Assasment. Data bersumber dari Sekertariat	Melakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian kinerja keuangan Bappeda
12	Persentase kinerja pelayanan internal Bappeda	Kuantitatif	Dihitung berdasarkan Jumlah realiasi pelayanan internal Bappeda Tahun N dibagi Jumlah total seluruh pelayanan internal Bappeda dikali 100%. Pelayanan Internal yang di maksud adalah : 1. Pelayanan kepegawaian 2. Kondisi Aset Daerah	Self Assasment. Data bersumber dari Sekertariat	Melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja pelayanan internal Bappeda

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah /panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah pada di masa yang akan datang. Perumusan isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima berdasarkan tugas dan fungsi dikemukakan dengan permasalahan-permasalahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang diperoleh dari tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi :

2.3.1. Tantangan

Tujuan utama perencanaan pembangunan adalah tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bima masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya mencapai rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam konteks Kabupaten Bima, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih berada pada angka 12,59 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 11,38 persen. Demikian pula, prevalensi stunting sebesar 12,12 persen masih menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketertinggalan capaian pada beberapa indikator makro pembangunan Kabupaten Bima dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan penanganan yang komprehensif, terintegrasi, dan bersifat lintas sektor. Upaya penanganan secara cepat dan menyeluruh membutuhkan keterpaduan program antar OPD melalui koordinasi dan sinkronisasi yang efektif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para perencana untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) perencana yang profesional dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Bima yang tepat sasaran, diperlukan SDM perencana sektoral yang kompeten guna mendukung kinerja perencanaan. Namun demikian, hingga saat ini kualitas dan kompetensi SDM perencana sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima masih perlu ditingkatkan. Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan di Kabupaten Bima. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat juga menjadi tantangan sekaligus tuntutan bagi peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah, khususnya Bappeda. Aparatur perencana dituntut mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal guna mendukung proses perencanaan yang transparan, akuntabel, serta memberikan akses informasi yang

cepat dan tepat kepada masyarakat. Beberapa tantangan lainnya dalam penyusunan dokumen perencanaan antara lain: Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan penganggaran, serta belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan ke dalam dokumen anggaran; Ketersediaan data dan informasi yang belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan; Hasil Musrenbang yang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat akibat rendahnya tingkat keterwakilan dan masih kuatnya ego sektoral antar OPD; Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga usulan daerah belum mendapatkan respon yang jelas; Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang belum optimal sebagai dasar peningkatan efektivitas dan efisiensi serta umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya.

2.3.2. Peluang

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi informasi sebagai faktor eksternal semakin mempengaruhi proses pembangunan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bima. Perubahan tersebut mencakup berbagai aspek seperti pola pikir masyarakat terhadap demokrasi, dinamika perdagangan, serta kemajuan teknologi informasi. Dari sisi positif, globalisasi memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam menghadapi tantangan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah perlu mampu memanfaatkan peluang ini secara optimal untuk mendorong kemajuan daerah. Dalam rangka menjawab peluang tersebut, diperlukan SDM perencana yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan global, sehingga mampu mengintegrasikan berbagai peluang menjadi kebijakan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, peluang peningkatan kapasitas SDM perencana semakin terbuka luas, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Hal ini juga didukung oleh kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan ruang bagi pengembangan kompetensi aparatur guna mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Hasil identifikasi yang diperoleh terhadap kondisi yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Masalah, Pokok Masalah, dan Akar Masalah yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Bima

Masalah Pokok	Masalah/Penyebab	Akar Masalah/Latar Belakang
Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya Pengendalian perencanaan dan evaluasi	Proses penyusunan rencana pembangunan di daerah belum sepenuhnya memenuhi dasar perencanaan yang baik, seperti keterpaduan,
	Belum adanya Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan yang mengatur keselarasan antar dokumen perencanaan	

Masalah Pokok	Masalah/Penyebab	Akar Masalah/Latar Belakang
	Kualitas dokumen perencanaan belum optimal	partisipasi, berbasis data, responsivitas terhadap isu strategis, dan berorientasi hasil
	Pemenuhan data dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi belum memadai	

Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang ada, beberapa tindak lanjut dalam rangka pengembangan pelayanan meliputi:

1. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencana baik di pusat maupun di daerah serta penguatan peran dan kewenangan Bappeda sebagai lembaga perencana;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan;
4. Mewujudkan sinergi kolaboratif melalui pelibatan unsur pemerintah, akademisi, asosiasi, komunitas, dan media dalam mendukung penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas data dan informasi yang mendukung perencanaan;
6. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur perencana melalui diklat, bimbingan teknis, *focus group discussion*, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah;
7. Membuka kesempatan bagi PNS yang berminat menjadi fungsional perencana dan mensupport pengembangan potensi dan kemampuan fungsional perencana;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Renstra Bappeda tahun 2025-2029, pelaksanaan evaluasi renja tahun sebelumnya dan hasil evaluasi tahun berjalan. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2026 untuk mencapai sasaran strategis yang telah dicantumkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2026 dari pagu indikatif sebesar Rp 10.423.121.000,00,- (sepuluh milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penyempurnaan rancangan renja mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan akhir RKPD. Berikut disajikan Tabel 2.13 (TC-31) yang menyandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 2.5
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bima

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12,534,208,516	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10,423,121,000	
5.01	PERENCANAAN				12,534,208,516	PERENCANAAN				10,423,121,000	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,307,208,516	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,376,358,000	
						[Meningkatnya pencapaian kinerja Bappeda]		Persentase kinerja pelayanan internal Bappeda Persentase pencapaian kinerja keuangan Bappeda Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Bappeda	100	8,376,358,000	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15 Dokumen	105,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	100 Persen 100 Persen	50,000,000	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	60,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	30,000,000	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	45,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	20,000,000	

KODE	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	7,141,208,516	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar Jumlah Dokumen Lapoarn Administrasi Keuagnan	100 Persen 1 Dokumen	6,831,449,000	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	6,757,208,516	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	6,645,249,000	
5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	384,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	186,200,000	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	14,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Persentase Pelaporan Aset sesuai standar	100 Persen	14,000,000	
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	14,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	14,000,000	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	65,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaiannya	100 Persen	8,376,358,000	
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	25,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	10,000,000	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bima	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	40,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bima	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	0	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	550,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Kantor	100 Persen	936,805,000	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	110,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	110,000,000	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bima	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bima	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,945,000	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	800,860,000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	355,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa penunjang Perangkat Daerah	100 Persen	314,104,000	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,000,000	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87,000,000	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	221,104,000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	77,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 Persen	220,000,000	

KODE	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bima	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	77,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bima	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	220,000,000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1,296,000,000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				664,000,000	
						[Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah]		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKP	94	664,000,000	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Tersedianya Dokumen perencanaan Kabupaten Bima Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen 3 Dokumen	838,000,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu Jumlah Dokumen Singkronisasi program dan sasaran RPJMD dalam RKP dan Renstra Perangkat Daerah	2 Dokumen 1 Dokumen	436,000,000	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kabupaten Bima	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	156,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kabupaten Bima	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	68,000,000	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kabupaten Bima	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	101,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kabupaten Bima	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	45,000,000	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kabupaten Bima	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	185,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kabupaten Bima	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	70,000,000	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kabupaten Bima	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1800 Usulan	91,000,000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kabupaten Bima	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1800 Usulan	83,000,000	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	305,000,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	170,000,000	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	130,000,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Persentase Data dan Informasi yang terpenuhi	85 Persen	77,000,000	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kabupaten Bima	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	35 Orang	130,000,000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kabupaten Bima	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	35 Orang	77,000,000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	225,000,000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Jumlah Dokumen Capaian Indikator RPJMD Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan provinsi	1 Dokumen 85 Persen	101,000,000	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	135,000,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	61,000,000	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	90,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	40,000,000	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	-	103,000,000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	Persentase Pemenuhan Data Dalam SIPD untuk penyusunan Perencanaan Daerah Dokumen Perencanaan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	85 Persen 2 Dokumen	50,000,000	
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	103,000,000	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	50,000,000	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2,931,000,000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1,382,763,000	
						[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia"]		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	94	1,382,763,000	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	1,010,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Antara Dokumen Perencanaan Daerah dengan Perangkat Daerah sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 Persen	440,000,000	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	107,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	50,750,000	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	105,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	50,750,000	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	122,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	54,000,000	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	117,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	65,000,000	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	97,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	50,750,000	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	106,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	50,750,000	

KODE	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	120,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	50,000,000	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	236,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	68,000,000	
						Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	95	1,382,763,000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-	976,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen verifikasi kesesuaian program, kegiatan, indikator, target, dan pagu antara Renja OPD dan RKPd bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	468,983,000	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	118,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	26,800,000	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	95,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	37,920,000	

KODE	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	109,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	40,000,000	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	116,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	37,396,000	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	125,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	36,010,000	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	101,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	17,825,000	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	112,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	40,000,000	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	200,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	233,032,000	
						[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan]		Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95	1,382,763,000	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	945,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah dokumen verifikasi kesesuaian program, kegiatan, indikator, target, dan pagu antara Renja OPD dan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	473,780,000	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	195,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	53,600,000	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	132,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	45,500,000	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	70,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	96,800,000	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	112,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	40,650,000	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	108,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	45,600,000	

KODE	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	122,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	54,200,000	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	95,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	96,780,000	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	111,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Bima	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	40,650,000	
J U M L A H					12,534,208,516					10,423,121,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terlebih dahulu telah dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah. Usulan awal program, kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang desa maupun kecamatan dan kabupaten, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Bupati sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pada proses Rancangan Awal Renja, belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Bappeda Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026.

Bappeda Kabupaten Bima mengakomodasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi rembuk warga dan pengamatan pelaksanaan musrenbang dari tingkat desa sampai pada musrenbang kabupaten, bahkan provinsi dan pusat serta menerima masukan tim-tim ahli sebagai acuan perencanaan pembangunan kabupaten dimasa mendatang.

Sarana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan diukur dengan menyebutkan banyaknya forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima guna menjangkarkan usulan-usulan masyarakat terkait pembangunan kabupaten. Forum resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima yang dapat digunakan oleh masyarakat, akademisi maupun para stakeholder dalam menyampaikan aspirasi atau usulan untuk pembangunan kabupaten, sebagai berikut ;

- Musrenbang Desa
- Musrenbang Kecamatan

- Forum OPD
- Musrenbang Kabupaten

Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penyempurnaan rancangan awal renja untuk menjadi rancangan renja. Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah tingkat Kabupaten Bima dilakukan pada tanggal 26 dan 27 Mei 2025 dengan mengundang pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda yaitu perangkat daerah, perwakilan asosiasi dan profesi, akademisi, dunia usaha dan perwakilan DPRD Kabupaten Bima sebagai mitra Bappeda. Dari forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dimaksud tidak ada masukan/saran program dan kegiatan baru untuk dilaksanakan oleh Bappeda. Masukan sidang forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah hanya mempertajam indikator tujuan, sasaran dan program. Disamping itu Bappeda sebagai unsur urusan penunjang juga tidak mendapat usulan masyarakat melalui musrenbang dan pikir.

Tabel 2.6.

Tabel T-C.32 : Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Bappeda Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026

No	Program/Kegiatan	Lokaai	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

Sumber : Bappeda Kabupaten Bima 2025

Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun, baik ditingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Rencana kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bima tahun 2026 disusun mengacu pada rancangan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2025-2029, dimana kedua dokumen tersebut, Renja dan Renstra merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029.

Dalam hal tujuan dan sasaran perencanaan program dan kegiatan pada rencana kerja, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bima ditetapkan dengan mempertimbangkan asas kesinambungan dengan arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional serta juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan Provinsi. Sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda telah disesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi yang gunanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045, sebagai **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**. Lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*. Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2026 merupakan tahapan kedua pada periode 2025-2029 dengan arahan Penguatan Fondasi Transformasi.

sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah: **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** Dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 adalah: **“Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Kredibel, Inklusif, Dan Inovatif Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** dengan misi : (1) Memastikan Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan, Kredibel, dan Adaptif dapat terlaksana secara

efektif dan efisien melalui pembiayaan, investasi, serta pengendalian pembangunan; (2) Meningkatkan kapasitas dan legitimasi lembaga perencanaan.

Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 difokuskan dalam tiga arah kebijakan, yang meliputi: (1) sumber daya manusia berkualitas antara lain, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; (2) infrastruktur berkualitas yang diarahkan antara lain, melalui peningkatan infrastruktur konektivitas yang menunjang Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Pariwisata, serta infrastruktur layanan dasar (antara lain infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, dan irigasi), pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, penguatan infrastruktur digital hingga reformasi pengelolaan sampah; serta (3) ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, antara lain melalui penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengembangan skema graduasi bantuan sosial, peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya, percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan, serta peningkatan produksi industri pengolahan.

Penelaahan terhadap kebijakan nasional tersebut menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bima. Adapun arah kebijakan nasional yang dimaksud mengacu pada arah kebijakan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Akan tetapi pada saat penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2026.

Tabel. 3.1.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dengan Prioritaa Pembangunan Naaional

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN BIMA
Tema : " <i>Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</i> "	Tema : Mendorong Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan"
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan utk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (PD 3)
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2)	
Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing (PN 3)	Meningkatkan Daya Saing SDM Kab Bima yang sehat dan unggul (PD 7)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)	Meguatkan Karakter masyarakat Bima yang melalui peningkatan Kegiatan kegiatan Keagamaan (PD 1)
	Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan harmonis (PD 2)
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Membangun Kawasan Pariwisata Prioritas, Kawasan Ibukota Kabupaten dan Kawasan

(PN 5)	strategis lainnya untuk percepatan pengembangan wilayah (PD 4)
Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk memperkuat mitigasi Bencana (PD 5)
Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public (PN 7)	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Melayani (PD 6)

Sumber : RKPd Kabupaten Bima 2026.

Sesuai RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan Kabupaten Bima tahun 2026 ditujukan untuk “Mendorong Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan”. Adapun Prioritas pembangunan Kabupaten Bima tahun 2026 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Bima tahun 2026. Penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten Bima dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada table 3.2. dibawah ini

Tabel 3.2.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

PRIORITAS NUSA TENGGARA BARAT	PRIORITAS KABUPATEN BIMA
<i>Tema : “Penguatan industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan”</i>	<i>Tema : Mendorong Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan”</i>
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang (PP 1)	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan utk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (PD 3)
Pembangunan Kesejahteraan (PP 4)	
Peningkatan Daya Saing Daerah (PP 7)	Meningkatkan Daya Saing SDM Kab Bima yang sehat dan unggul (PD 7)
Pembangunan Manusia (PP 2)	Menguatkan Karakter masyarakat Bima yang melalui peningkatan Kegiatan kegiatan Keagamaan (PD 1)
	Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan harmonis (PD 2)
Peningkatan Komitmen dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) PP 6	Membangun Kawasan Pariwisata Prioritas, Kawasan Ibukota Kabupaten dan Kawasan strategis lainnya untuk percepatan pengembangan wilayah (PD 4)
Pembangunan Lingkungan (PP 3)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk memperkuat mitigasi Bencana (PD 5)
Pembangunan Tata Kelola Pemerintah Daerah (PP 5)	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Melayani (PD 6)

Sumber : RKPd Kabupaten Bima 2026.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Tujuan, melaksanakan Sasaran, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan Tujuan dilakukan dengan memperhatikan Misi RPJMD yang akan diemban oleh Perangkat Daerah dan pernyataan Tujuan pembangunan jangka menengah dalam dokumen RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, Bappeda Kabupaten Bima adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Bappeda Kabupaten Bima sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan melalui tabel berikut :

Tabel: 3.3.
Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2026
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatnya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan berorientasi hasil	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80 %
		Persentase kualitas integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	80 %
		Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	80 %
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	95 %
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	95 %
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	95 %
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	95 %
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	95 %
		Persentase Usulan Masyarakat dalam RKPD	70 %
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	86 %
		Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Bappeda	100 %
		Persentase pencapaian kinerja keuangan Bappeda	100 %
		Persentase kinerja pelayanan internal Bappeda	100 %

Target sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai dan terpenuhi di tahun 2026 untuk mendukung tujuan rencana pembangunan daerah dan bagian dari memenuhi target antara rencana strategis BAPPEDA.

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut, program yang menjadi kegiatan strategis di BAPPEDA adalah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, di mana sebagai poin awal persiapan pembaruan perencanaan terutama untuk menghasilkan data-data yang detil dan valid diperlukan analisis dengan metode khusus yang mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan pembangunan.

3.3. Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima pada tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029.
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2025-2029.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah dijabarkan di atas, Bappeda Kabupaten Bima dalam perencanaan pembangunan Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 10.423.121.000 yang bersumber dari Dana Transfer Umum dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (Dau), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Pendapatan Transfer Antar Daerah, pada APBD Kabupaten Bima dengan menjalankan program yang didukung kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang didukung dengan kegiatan :
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - E. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang didukung dengan kegiatan :
- A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
 - C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- D. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung dengan kegiatan :
- A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan :
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) , dengan sub kegiatan :
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana telah di tuangkan dalam bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana kerja dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam pencapaian masingmasing sasaran. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima tahun 2026 dikelompokkan sesuai sasaran dan sasaran strategis sebagai berikut :

TUJUAN STRATEGIS : Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Indikator kinerja dari tujuan tersebut adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, target : 80 poin, dengan kebutuhan dana sebesar Rp.10.423.121.000,-

SASARAN STRATEGIS 1. : Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan berorientasi hasil

Sasaran Strategis ini terdiri dari dua Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase kualitas integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD.

Target kinerja tahun 2026 untuk Indikator Kinerja Kunci Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD sebesar 94 %. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut disusun program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang didukung dengan 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan kebutuhan dana Rp. 1,000,000,000,00 dan untuk Indikator Kinerja Kunci Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA sebesar 95 %. Yang programnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang di dukung dengan 3 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan kebutuhan dana Rp. 2,780,000,000,00

SASARAN STRATEGIS 2. : Nilai SAKIP Bappeda

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bappeda dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 100% dan Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 100 %, Serta indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 100%, yang akan di capai dengan melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 8,376,358,000,00.

Untuk Mencapai target indikator kinerja sasaran yang telah di tetapkan di atas, di butuhkan total dana sebesar Rp. 10.423.121.000,00 yang dirinci dalam rumusan rencana program dan kegiatan, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel: 4.1.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN RENCANA		CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			10,423,121,000			14,075,800,000
5.5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					14,075,800,000	
5.5.01.	PERENCANAAN			10,423,121,000			14,075,800,000
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	8,376,358,000		100%	8,933,800,000
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50,000,000		100%	100,000,000
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	30,000,000		2 Dok	50,000,000
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	20,000,000		5 Lap	50,000,000
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	100%	6,831,449,000		100%	6,392,000,000
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 OB	6,645,249,000		70 OB	6,113,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN RENCANA		CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	179,000,000		2 Lap	279,000,000
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	100%	14,000,000		100%	22,000,000
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Lap	14,000,000		3 Lap	22,000,000
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	100%	55,000,000		100%	188,000,000
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	24,000,000		2 Dok	23,000,000
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	30 Org	31,000,000		30 Org	165,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN RENCANA		CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100%	490,000,000		100%	775,400,000
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Pkt	100,000,000		6 Pkt	337,000,000
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25,000,000		4 Paket	23,000,000
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15,000,000		4 Dokumen	15,000,000
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350,000,000		12 Laporan	400,400,000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	363,500,000		100%	366,400,000
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12,500,000		1 Laporan	11,000,000
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87,000,000		12 Laporan	85,000,000
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	264,000,000		12 Laporan	270,400,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN RENCANA		CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	77,000,000		100%	90,000,000
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	77,000,000		10 Unit	90,000,000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	95%	1,000,000,000		95%	3,142,000,000
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penetapan RKPD Tepat Waktu	2 Dokumen	590,000,000		2 Dokumen	2,302,000,000
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	110,000,000		1 Berita Acara	390,000,000
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	55,000,000		1 Berita Acara	530,000,000
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	140,000,000		1 Berita Acara	260,000,000
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	162 Usulan	35,000,000		162 Usulan	80,000,000
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	250,000,000		2 Dokumen	1,042,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN RENCANA		CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data dan Analisis untuk penyusunan dokum perencanaan pembangunan daerah	100%	127,000,000		100%	310,000,000
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Dok	127,000,000		1 Dok	310,000,000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun	100%	186,000,000		100%	390,000,000
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	108,000,000		1 Laporan	220,000,000
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	78,000,000		6 Laporan	170,000,000
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100%	97,000,000		100%	140,000,000
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	97,000,000		2 Dokumen	140,000,000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang konsisten	100%	2,780,000,000		100%	3,000,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN RENCANA		CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Perencanaan yang terealisasi	100%	947,000,000		100%	1,000,000,000
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	90,000,000		1 Dokumen	150,000,000
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6 Laporan	100,000,000		6 Laporan	102,000,000
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	115,000,000		1 Laporan	122,000,000
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	110,000,000		1 Laporan	113,000,000
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	90,000,000		1 Dokumen	115,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN RENCANA		CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	100,000,000		1 Laporan	103,000,000
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	115,000,000		1 Laporan	110,000,000
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	227,000,000		1 Laporan	185,000,000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Perencanaan yang terealisasi	100%	913,000,000		100%	1,000,000,000
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	110,000,000		3 Dokumen	130,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN RENCANA		CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	87,000,000		3 Laporan	102,000,000
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	101,000,000		3 Laporan	108,000,000
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	109,000,000		3 Laporan	110,000,000
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	119,000,000		3 Dokumen	108,000,000
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	83,000,000		3 Laporan	112,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN RENCANA		CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	104,000,000		3 Laporan	130,000,000
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	200,000,000		3 Laporan	200,000,000
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase Perencanaan dan Pendanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun = 100%	100%	920,000,000		100%	1,000,000,000
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	189,000,000		1 Dokumen	206,000,000
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	130,000,000		1 Laporan	123,000,000
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	65,000,000		1 Laporan	103,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN RENCANA		CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	110,000,000		1 Laporan	105,000,000
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	105,000,000		2 Dokumen	110,000,000
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	120,000,000		2 Laporan	118,000,000
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	93,000,000		1 Laporan	120,000,000
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	108,000,000		1 Laporan	115,000,000
				10,423,121,000			14,075,800,000

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Rancangan Renja BAPPEDA Kabupaten Bima Tahun 2026 disusun berdasarkan pada dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029, dan RENSTRA Bappeda 2025-2029 serta dokumen perencanaan tahunan RKPD Kabupaten Bima tahun 2026. Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bima Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 memuat unsur penunjang urusan pemerintahan, yaitu urusan perencanaan, yang terdiri dari 3 program 14 kegiatan dan 48 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.423.121.000,- (sepuluh milyar empatratus duapuluh tiga juta seratus dua puluh puluh satu ribu rupiah). Substansi Renja Bappeda disusun dengan berpedoman Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

5.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kepala BAPPEDA telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang dan forum perangkat daerah.

5.3 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku yang berkepentingan dalam pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders) yang tetap harus dikedepankan. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bima Tahun 2026, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Renja Bappeda disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Bima Tahun 2026.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Bima atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Bappeda, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang pada Bappeda, agar segera menyusun rencana kerja anggaran (RKA) masing masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.

4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

5.3 Renca Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan, mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan oleh masing-masing bidang atau bagian. Dengan demikian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut. Kami berharap, bahwa Renja Bappeda ini dapat mengakomodir seluruh target indikator kinerja untuk urusan perencanaan pembangunan daerah. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

Bima, November 2025

KEPALA BAPPEDA KAB. BIMA



TAUFIK, ST., MT

NIP. 197106211998031007

CEKLIST DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK EVALUASI KINERJA BAPPEDA :

Ceklist dokumen utama

- RPJMD.
- Renstra Bappeda.
- Renja Bappeda tahun berjalan.
- Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda.
- IKU Bappeda.
- Pohon kinerja.
- Cascading kinerja.
- Rencana aksi kinerja.
- LKjIP/Laporan Kinerja tahun sebelumnya.
- Laporan capaian kinerja triwulan/bulanan.

Ceklist dokumen pengukuran

- Pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- Formulir/rekap realisasi indikator kinerja.
- Bukti dukung capaian indikator.
- Data dashboard kinerja.
- Notulen verifikasi data kinerja.
- Berita acara validasi data.

Ceklist dokumen perencanaan

- RKPD.
- Rencana kerja tahunan.
- Hasil forum perangkat daerah.
- Berita acara pembahasan Renja.
- Dokumen sinkronisasi Renstra–RKPD–Renja.
- Dokumen evaluasi hasil renja tahun sebelumnya.

Ceklist dokumen evaluasi internal

- SK tim SAKIP / tim evaluasi internal.
- Pedoman teknis evaluasi AKIP internal.
- Lembar kerja evaluasi AKIP.
- Hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.
- Tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu.
- Bukti pelaksanaan rapat evaluasi internal.
- Laporan monitoring tindak lanjut.

Ceklist dokumen pelaporan

- LKjIP tahunan.
- Laporan kinerja triwulan I, II, III, IV.
- Laporan pengendalian dan evaluasi.
- Laporan capaian indikator utama.
- Surat pengantar laporan.
- Dokumentasi pendukung laporan.

Ceklist dokumen pendukung teknis

- SK penetapan indikator kinerja.
- SK penetapan pejabat penanggung jawab kinerja.
- Data statistik sektoral.
- Data penduduk, kemiskinan, stunting, TPT, PDRB, inflasi bila dipakai dalam indikator Bappeda.
- Dokumentasi kegiatan koordinasi lintas OPD.
- Foto kegiatan, daftar hadir, dan notulen rapat.

Ceklist bukti fisik yang sering diminta evaluator

- Dokumen asli yang ditandatangani.
- File softcopy dalam format PDF/Word/Excel.
- Tanda tangan dan cap dinas.
- Nomor surat dan tanggal yang jelas.
- Konsistensi antar dokumen.
- Bukti tindak lanjut rekomendasi evaluasi sebelumnya

Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah

No.	Komponen	Sub-komponen	Dokumen yang dinilai
1	Sinergi	Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN	RPJMD
		Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP	
		Kesesuaian anggaran daerah dalam kontribusinya terhadap PN di daerah	
2	Kualitas Perencanaan	Kesesuaian prioritas daerah dengan isu	RKPD
		Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah	
		Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek untuk mencapai target dan sasaran	
		Program Unggulan perencanaan pembangunan	
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait	RPJMD-Renstra OPD / RKPD-Renja OPD

Sumber : Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.

DINAS DIKBUDPORA
KABUPATEN BIMA



RENJA 2026

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Bima Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

mswordcoverpages.com

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan tentang perlunya SKPD menyusun Renja SKPD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Sebagai tindaklanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPJMD kabupaten Bima serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bima berwenang menyusun Renja SKPD sesuai kewenangan yang dimiliki.

Renja Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima di samping sebagai dokumen perencanaan, juga merupakan dokumen awal dalam tahapan penyusunan anggaran pembangunan. Dengan kata lain Renja Perangkat Daerah adalah tahapan permulaan di dalam proses penyusunan rancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Renja Dinas Dikbudpora tahun 2026 mengacu pada RKPD tahun 2026. Di samping itu, penyusunan Renja ini juga disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mengemban amanah konstitusi tersebut yaitu mewujudkan layanan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima yang dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan pendidikan dalam skala nasional yang dituangkan melalui Rencana Kerja.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan pengambilan keputusan mengenai rencana kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi.

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima disamping sebagai dokumen perencanaan juga merupakan dokumen awal dalam tahapan penyusunan anggaran pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Renja Dinas merupakan tahapan permulaan di dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Renja Dinas Dikbudpora Tahun 2026 mengacu pada RKPD 2026.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas, Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima sebagai dokumen perencanaan disusun menurut fungsi dan kewenangan Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang telah diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bima No. 9 Tahun 2022 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bima.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali dan Nusa Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
9. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
10. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 46);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Maksud Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima Tahun 2026 adalah sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga di Daerah Kabupaten Bima satu tahun ke depan, sehingga pelaksanaan urusan bidang Pendidikan Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan yang berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029. Renja Dinas Pendidikan, Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima dimaksud untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dinas yang sesuai dengan target prestasi kerja yang akan dicapai. Tujuan Renja Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Dikbudpora sampai dengan Tahun 2024
2. Peningkatan kualitas perencanaan pada bidang yang menjadi kewenangan Dinas Dikbudpora, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya kelembagaan, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, konsisten dengan tujuan pembangunan daerah dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Dikbudpora
4. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026

1.4. SISTEMATIKA RENJA SKPD

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV.

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V.

- 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 5.3. Rencana tindak lanjut

Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi terhadap rencana kerja Dinas Pendidikan, Keudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima Tahun 2023 dan 2024 yang disajikan dalam tabel di bawah ini merupakan akumulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana kerja Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi atau melebihi target kinerja yang telah direncanakan.

Pada Tahun 2024, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima melaksanakan 10 program strategis, 22 kegiatan dan 112 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 733.287.562.831 (tujuh ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 722.370.520.839 (tujuh ratus dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Prosentase realisasi keuangan terhadap anggaran yang tersedia sebesar 93,96%. Sedangkan pada tahun 2023, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima melaksanakan 9 Program, 21 kegiatan dan 96 Sub Kegiatan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 601.441.573.070 (enam ratus satu juta empat ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah tujuh puluh rupiah). Dengan realisasi sebesar 98.51%

Anggaran tersebut diatas dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung pencapaian indicator baik indicator kinerja utama(IKU) maupun indicator kerja dinas sebagai mana yang terlihat pada tabel berikut :

Kode	Program/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	Prosentase (%)
1	2						13
1.01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				528.145.780.621	522.413.284.009	99
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				526.997.862.021	521.302.339.779	99
1.01.01.01	KegiatanPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				133.260.450	118.278.050	89
1.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				87.525.550	72.700.550	83
1.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.734.900	45.577.500	100
1.01.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				61.496.000	61.452.000	100
1.01.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				39.496.000	39.452.000	100
1.01.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22.000.000	22.000.000	100
1.01.01.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30.015.000	30.015.000	100
1.01.01.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				30.015.000	30.015.000	100
1.01.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60.012.700	59.118.900	99
1.01.01.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24.999.500	24.300.000	97
1.01.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.012.900	10.012.900	100
1.01.01.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25.000.300	24.806.000	99
1.01.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				318.774.000	310.057.080	97
1.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.070.000	5.070.000	100
1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				116.000.000	107.824.000	93
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.000.000	30.000.000	100
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				37.704.000	37.704.000	100
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000	129.459.080	100
1.01.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				514.360.450	502.523.200	98
1.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.450	10.000.450	100
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				121.800.000	117.082.750	96

1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	382.560.000	375.440.000	98
1.01.01.09	KegiatanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000	29.500.000	98
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	29.500.000	98
1.01.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	195.302.977.210,00	190.739.584.328	98
1.01.02.2.01	KegiatanPengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	115.161.053.771,00	113.024.246.888	98
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.234.816.000	3.159.709.801	98
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.166.880.000	1.138.911.801	98
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.274.130.000	1.250.588.801	98
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17.813.807.500	17.593.078.000	99
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.192.687.500	1.179.692.828	99
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	192.450.100	189.162.700	98
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.813.605.200	1.796.561.192	99
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	2.687.867.500	2.554.745.400	95
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya personil peserta didik sekolah dasar	50.000.000	50.000.000	100
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.050.000.000	2.049.203.000	100
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	153.003.000	152.960.000	100
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.749.800.000	7.961.990.000	91
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	969.159.000	846.276.000	87
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	288.868.000	287.414.000	99
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46.955.230.000	46.929.590.182	100
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	150.006.000	147.856.000	99
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	4.852.224.000	4.744.059.503	98
1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	50.167.000	43.517.000	87
1.01.02.2.01.36	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	50.003.300	43.003.300	86
1.01.02.2.01.37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.025.000	36.275.000	73
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi layanan di Bidang	50.080.000	49.880.000	100
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000	48.960.000	98
1.01.02.2.01.41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.000.000	38.798.000	78
1.01.02.2.01.45	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	46.748.221	46.700.000	100
1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.340.327.000	4.244.405.600	98

1.01.02.2.0 1.48	Rehabilitasi Sedang /Berat sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.078.437.850	4.863.355.400	96
1.01.02.2.0 1.51	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah	11.800.731.600	11.577.553.380	98
1.01.02.2.0 2	KegiatanPengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	51.551.421.439	50.996.274.313	99
1.01.02.2.0 2.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.067.289		-
1.01.02.2.0 2.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.226.480.000	1.207.378.500	98
1.01.02.2.0 2.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.023.360.000	1.009.946.702	99
1.01.02.2.0 2.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	561.600.000	553.609.701	99
1.01.02.2.0 2.06	Pembangunan Laboratorium	3.945.240.000	3.870.695.401	98
1.01.02.2.0 2.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.007.803.000	4.950.165.901	99
1.01.02.2.0 2.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.541.870.615	5.458.504.900	98
1.01.02.2.0 2.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.000.000		-
1.01.02.2.0 2.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	546.384.640	535.631.800	98
1.01.02.2.0 2.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	927.035.330	907.451.000	98
1.01.02.2.0 2.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.807.980.907	1.738.558.400	96
1.01.02.2.0 2.25	Pengadaan Mebel Sekolah	1.855.317.528	1.855.010.900	100
1.01.02.2.0 2.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	50.000.000	50.000.000	100
1.01.02.2.0 2.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.202.325.000	1.198.940.000	100
1.01.02.2.0 2.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	119.020.000	118.776.000	100
1.01.02.2.0 2.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.057.100.000	1.963.300.000	95
1.01.02.2.0 2.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	657.820.000	635.291.676	97
1.01.02.2.0 2.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	162.684.000	145.816.600	90
1.01.02.2.0 2.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	23.149.400.000	23.132.390.357	100
1.01.02.2.0 2.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100.084.000	99.519.000	99
1.01.02.2.0 2.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	405.501.408	389.922.325	96
1.01.02.2.0 2.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	93.117.024	91.078.300	98
1.01.02.2.0 2.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	49.999.650	47.999.650	96
1.01.02.2.0 2.49	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	50.010.000	48.760.000	98
1.01.02.2.0 2.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	50.120.000	43.830.000	87

1.01.02.2.0 2.54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.000.000	48.600.000	97
1.01.02.2.0 2.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi peserta didik	60.001.000	59.831.000	100
1.01.02.2.0 2.61	Perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik	275.000.000	275.000.000	100
1.01.02.2.0 2.64	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/Kepala Sekolah/TU	572.100.048	560.266.200	98
1.01.02.2.0 3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	25.025.182.000	24.769.976.186	99
1.01.02.2.0 3.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.662.998.600	1.658.428.201	100
1.01.02.2.0 3.03	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	997.004.160	979.588.700	98
1.01.02.2.0 3.07	Pengadaan Mebel PAUD	159.073.400	159.045.000	100
1.01.02.2.0 3.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	428.473.400	428.260.000	100
1.01.02.2.0 3.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	70.000.000	69.750.000	100
1.01.02.2.0 3.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.264.600.000	3.249.200.000	100
1.01.02.2.0 3.16	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD	355.813.800	312.770.800	88
1.01.02.2.0 3.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	200.000.200	193.825.200	97
1.01.02.2.0 3.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	16.982.640.000	16.937.065.184	100
1.01.02.2.0 3.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	50.000.000	44.550.000	89
1.01.02.2.0 3.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	125.000.000	96.418.000	77
1.01.02.2.0 3.28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	219.234.480	214.343.501	98
1.01.02.2.0 3.30	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	510.343.960	426.731.600	84
1.01.02.2.0 4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.565.320.000	194.949.086.940	5.468
1.01.02.2.0 4.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal	159.900.000	146.226.940	91
1.01.02.2.0 4.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.405.420.000	1.802.860.000	53
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100.000.000	77.178.000	77
1.01.04.2.0 1	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	77.178.000	77
1.01.04.2.0 1.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	47.800.000	96
1.01.04.2.0 1.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	29.378.000	59
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	725.000.000	635.000.000	88

2.19.02.2.0 1	KegiatanPenyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	725.000.000	635.000.000	88
2.19.02.2.0 1.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	410.000.000	345.000.000	84
2.19.02.2.0 1.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	100.000.000	100.000.000	100
2.19.02.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	215.000.000	190.000.000	88
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.951.250.000	5.218.803.300	88
2.19.03.2.0 1	KegiatanPembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.436.260.000	4.708.172.800	87
2.19.03.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5.436.260.000	4.708.172.800	87
2.19.03.2.0 2	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	275.900.000	271.568.500	98
2.19.03.2.0 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	154.500.000	154.408.500	100
2.19.03.2.0 2.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	121.400.000	117.160.000	97
2.19.03.2.0 3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	89.090.000	89.062.000	100
2.19.03.2.0 3.01	Seleksi Atlet Daerah	17.590.000	17.576.000	100
2.19.03.2.0 3.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	71.500.000	71.486.000	100
2.19.04.2.0 1	KegiatanPembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000	150.000.000	100
2.19.04.2.0 1.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000	150.000.000	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	225.000.000	220.523.000	98
2.22.02.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	220.523.000	98
2.22.02.2.0 1.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan	225.000.000	220.523.000	98
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.538.750.000,00	1.514.571.000	98
2.22.03.2.0 1	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.538.750.000	1.514.571.000	98
2.22.03.2.0 1.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50.000.000	50.000.000	100
2.22.03.2.0 1.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.488.750.000	1.464.571.000	98
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	106.325.000	100.325.000	94
2.22.04.2.0 1	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	106.325.000	100.325.000	94

2.22.04.2.0 1.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	56.325.000	50.325.000	89
2.22.04.2.0 1.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	50.000.000	50.000.000	100
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	337.330.000	337.170.000	100
2.22.05.2.0 2	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	337.330.000	337.170.000	100
2.22.05.2.0 1.02	Penetapan Cagar Budaya	95.000.000	94.875.000	100
2.22.05.2.0 2.02	Pengembangan Cagar Budaya	50.000.000	50.000.000	100
2.22.05.2.0 2.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	192.330.000	192.295.000	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	855.150.000	846.438.000	99
2.22.06.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	855.150.000	846.438.000	99
2.22.06.2.0 1.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	249.128.000	249.128.000	100
2.22.06.2.0 1.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	130.150.000	128.200.000	99
2.22.06.2.0 1.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	353.390.000	347.935.000	98
2.22.06.2.0 1.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	122.482.000	121.175.000	99
TOTAL		733.287.562.831	722.102.876.637	98

Berdasarkan tabel diatas maka realisasi program dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
Program/kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja sebanyak 0 program
2. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja sebanyak 9 Program dengan alokasi anggaran sebagai berikut :
 1. Program penunjang urusan pemerintah daerah dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 528.145.780.621 terealisasi sebesar Rp. 522.139.156.309 prosentase 98,86%
 2. Program Pengelolaan Pendidikan dengan PAGU sebesar Rp. 195.302.977.210 terealisasi sebesar Rp. 191.281.356.230 dengan prosentase 97,94%
 3. Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan dengan jumlah Pagu anggaran sebesar Rp. 725.000.000 terealisasi sebesar Rp 635.000.000 atau 87,58%

- Program Pengembangan Daya Saing Olahraga dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.801.250.000 terealisasi sebesar Rp. 5.068.803.300 atau 87,37%.
- Program Pengembangan Kebudayaan dengan jumlah Pagu Rp. 225.000.000 terealisasi sebesar Rp 220.523.000 atau 98,01%
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional, jumlah Pagu sebesar Rp. 1.538.750.000 terealisasi 1.514.571.000 atau sebesar 98,43%
- Program Pembinaan Sejarah, jumlah Pagu Rp. 106.325.000 terealisasi sebesar Rp. 100.325.000 atau sebesar 94,36%
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Jumlah Pagu Rp. 337.330.000 terealisasi sebesar Rp. 337.170.000 atau sebesar 99,95%
- Program Pengelolaan Permuseuman, Jumlah Pagu Rp. 855.150.000 terealisasi Rp 846.438.000 atau sebesar 98,98%

Secara umum capaian realisasi keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima Tahun 2024 sebesar Rp. 722.370.520.839 dari Pagu anggaran sebesar Rp 733.287.562.831 dengan prosentase realisasi sebesar 98,51%

2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga

ATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN						REALISASI KINERJA PADA TAHUN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
APK PAUD (5-6Tahun)	70,00%	72,18%	74,14%	78,10 %	82,06 %	85,00 %	77,06 %	81,55 %	86,16%	86,33 %		
Angka Partisipasi Kasar SD	112,22%	108,73 %	105,59 %	103,19%	100%	100%	113,08%	109,73 %	105,74%	110,87%		

Angka Partisipasi Kasar SMP	95,25%	96,60%	97,75%	98,98 %	99,30 %	100%	95,25 %	101,43 %	98,4 5%	99,20 %		
Angka Partisipasi Murni SD	99,40%	99,75%	99,80%	99,90 %	100%	100%	99,40 %	97,76 %	97,5 3%	97,66 %		
Angka Partisipasi Murni SMP	91,20%	93,89%	96,17%	97,36 %	98.80 %	100%	98,20 %	91,74 %	82,9 5%	83,73 %		
Jumlah Guru SD yang tersertifikasi	2020	2047	2085	2135	2160	2195	1685	1893	2435	2499		
Jumlah Guru SMP yang tersertifikasi	1062	1095	1133	1156	1187	1219	1067	1182	1225	1236		
Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi minimal B	230	290	312	352	370	400	320	318	321	327		
Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi Minimal B	70	80	90	110	120	130	77	79	87	91		
Jumlah PAUD yang terakreditasi Minimal B	150	175	180	190	200	220	134	147	156	176		
Jumlah Cabang Olahraga yang meraih medali Tk.Prop/Nasional	4 cabang	5 cabang	6 cabang	6 caban g	6 cabang	6 cabang	2 caban g	3 cabang	12 Cab ang	6 caban g		
Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Daerah, Propinsi dan Nasional	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	3 orang	5 orang	3 oran g	2 orang		
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43		
Prosentase cagar budaya/situs yang dilindungi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%		

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Jika dibandingkan dengan target capaian yang ditetapkan pada Tahun 2024, indicator kinerja sudah berhasil melampaui target. Dari target yang ditetapkan sebesar 78,10% berhasil terealisasi sebesar 86,33% meningkat 0,17% dibandingkan tahun sebelumnya , ini adalah hasil yang baik pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2021-2026. Ini menunjukan bahwa jumlah siswa keseluruhan yang bersekolah pada jenjang PAUD (TK/RA) sebanyak 13.587 orang dari jumlah penduduk usia 5-6 Tahun sebanyak 15.738 orang (*Sumber Data Dapodik*). APK PAUD sudah mencapai target RPJMD sebesar 86,16%.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024, indikator kinerja ini tidak berhasil mencapai angka APK dari target yang ditetapkan 103,19%, Pada tahun 2024 APK SD/MI mencapai angka 110,87%, tetapi capaian ini meningkat dibanding dengan capaian tahun 2023 yang mencapai 105,74%. Peningkatan capaian ini bermakna tidak baik karena menunjukan jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SD/MI sebanyak 50.108 orang, jumlah siswa tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebesar 45.195 Artinya terdapat 4.912 siswa SD yang usianya masih di bawah 7 tahun atau usia 13 tahun ke atas yang masih berada pada jenjang SD/MI atau tidak bersekolah/putus sekolah (*Sumber Data Dapodik*). Dan hasil itu juga tidak memenuhi target RPJMD yaitu sebesar 103,19%.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024, indikator kinerja ini berhasil mencapai angka APK dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,75%, sedangkan capaiannya sebesar 98,45%. Capaian ini menunjukkan jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs sebanyak 26.069 orang dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 26.275 orang. Artinya sebanyak 206 orang penduduk usia 13-15 tahun yang usianya masih di bawah 13 tahun atau usia 15 tahun ke atas yang masih berada pada jenjang SMP/MTs atau tidak bersekolah/putus sekolah (*Sumber Data Dapodik*).

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Realisasi target kinerja angka partisipasi murni pada tahun 2024 sebesar 98,45%, indikator kinerja ini belum berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 99,80% ini berarti bahwa jumlah siswa usia 7-12 Tahun pada jenjang SD sebanyak 53.406 orang dari jumlah penduduk usia 7-12 Tahun sebanyak 54.515 (*Sumber Data Dapodik*). Data ini menunjukkan bahwa ada 109 orang anak usia 7-12 tahun yang belum bersekolah atau sudah menamatkan diri pada jenjang pendidikan dasar atau bersekolah pada daerah lain. Bila dibandingkan dengan capaian APM SD/MI tahun 2022 sebesar 97,76% mengalami penurunan. Hasil itu belum memenuhi target RPJMD yaitu sebesar 99,75%.

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Murni belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 96,17%, terealisasi sebesar 82,95% ini berarti bahwa jumlah siswa usia 13-15 Tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs sebanyak 21.795 orang dari jumlah penduduk usia 13-15 Tahun sebanyak 26.275 (*Sumber Data Dapodik*). Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 4480 anak usia 13-15 tahun yang masih belum bersekolah di jenjang pendidikan menengah pertama atau sudah menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama atau bersekolah pada SMP/MTs di luar wilayah Kabupaten Bima atau tidak bersekolah/drop out. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yang sebesar 91,74% pada tahun 2022 mengalami penurunan dan masih jauh dari target RPJMD sebesar 97,89%

1. Rasio guru dibandingkan dengan jumlah siswa pada sekolah dasar adalah 14 orang, ini artinya bahwa satu orang guru ASN pada sekolah dasar mengajarkan 14 orang siswa, jumlah ini telah memenuhi rasio yang dipersyaratkan oleh standar nasional pendidikan.
2. Rasio guru dibandingkan dengan jumlah siswa pada sekolah menengah pertama adalah 11 orang, data ini menjelaskan bahwa 1 orang guru ASN rata rata mengajarkan 11 siswa, jumlah ini telah memenuhi rasio yang dipersyaratkan oleh standar nasional pendidikan.
3. Jumlah Guru SD yang bersertifikasi
Jumlah guru sertifikasi jenjang sekolah dasar pada tahun 2024 sebanyak 2499 orang dari target sebanyak 2135 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 dengan jumlah guru sertifikasi hanya sebanyak 2435 orang. Data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah guru sertifikasi yang sangat signifikan(*Sumber Data Dapodik*).
4. Jumlah Guru SMP yang bersertifikasi
Jumlah guru sertifikasi jenjang SMP pada tahun 2024 sebanyak 1236 orang dari target kinerja 1156. Data ini menunjukkan ada peningkatan jumlah guru sertifikasi yang sangat signifikan. Jumlah ini

meningkat dibanding tahun 2023 yang hanya sebanyak 1.225 orang, trend peningkatan guru yang bersertifikasi beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yg signifikan. (*Sumber Data Dapodik*).

5. Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi minimal B

Pada tahun 2024 jumlah sekolah dasar yang terakreditasi minimal B sebanyak 327 sekolah, dari target sebanyak 352. Walaupun jumlah tersebut belum mencapai target yg ditetapkan, tetapi dibandingkan tahun 2023 capaian jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B terjadi peningkatan, tahun 2023 hanya mencapai 321 sekolah. (*Sumber Data Dapodik*).

6. Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi

Pada tahun 2024 jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi minimal B sebanyak 91 sekolah. Jumlah tersebut belum mencapai target renstra sebanyak 90 sekolah. Capaian ini meningkat jumlahnya dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sejumlah 87 sekolah. (*Sumber Data Dapodik*).

6. Jumlah Cabang Olahraga yang meraih medali Tk.Prop/Nasional adalah 6 cabang olahraga yaitu Cabor Atletik , Cabor Bola Volly , Cabor Catur, Cabor Kempo, Cabor Taekwondo, Pencak Silat

7. Pemuda mampu meraih prestasi pada tingkat Propinsi/Nasional/Internasional

Capaian jumlah pemuda yang berprestasi tahun 2023 adalah orang yaitu 3 orang pada kegiatan pemuda pelopor tingkat propinsi mampu meraih juara 1, 2 dan 3, dan 1 orang mampu menjadi duta Pertukaran Pemuda Antar Negara. Dari target capaian prestasi pemuda sebanyak 5 orang. Capaian ini menurun dibandingkan dengan Capaian pada tahun 2023 sebanyak 3 orang untuk 4 kategori. Penurunan prestasi pemuda disebabkan oleh berkurangnya Sub kegiatan penyelenggaraan Paskibraka yang selama ini menjadi salah sub kegiatan yang menyumbang perolehan prestasi pemuda pada tingkat nasional dan propinsi

8. Jumlah Cagar Budaya Bima yang dilestarikan/dilindungi.

Jumlah cagar budaya yang dilindungi sebanyak 43 obyek, jumlahnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

9. Semua cagar budaya yang ada dilindungi dengan baik, setiap cagar budaya/situs ditugaskan juru pelihara masing-masing yang bertugas untuk melindungi dan menjaga obyek cagar budaya yang ada.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada periode Renstra tahun 2021 - 2025 Dinas Dikbudpora telah melakukan berbagai upaya terkait dengan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bima. Sebagai pelaksana kebijakan pembangunan pendidikan Dinas Dikbudpora telah melaksanakan kebijakan/program kegiatan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan pendidikan secara nasional, yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Publik. Kendati demikian permasalahan pendidikan masih tetap membutuhkan intervensi program baik berupa program baru maupun program lanjutan pada periode sebelumnya. Berikut uraian isu/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima sebagai berikut :

a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2024 usia 5-6 tahun sudah mencapai angka 86, 33 %, namun demikian dilihat dari data tersebut maka masih

ada sekitar 13,67 % penduduk usia 5 - 6 tahun yang masih belum tertampung pada lembaga pendidikan PAUD atau sudah bersekolah pada jenjang SD.

2. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan PAUD mempersyaratkan Lembaga PAUD wajib memiliki nilai akreditasi minimal B. Sampai tahun ini jumlah PAUD yang terakreditasi minimal B hanya berjumlah 176 lembaga artinya masih sekitar 534 lembaga memerlukan intervensi program kegiatan yang mendorong Lembaga untuk dapat mengikuti program akreditasi PAUD serta menyediakan tambahan fasilitas dan instrument akreditasi.
 3. Sebagian besar sarana prasarana pendidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan lembaga PAUD tidak diiringi dengan kesadaran untuk menyediakan sarana prasarana pendidikan PAUD yang memadai. Pengelola PAUD hanya mengandalkan bantuan sarana prasarana pendidikan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 4. Masih terdapat tenaga pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S1/D4 pendidikan guru PAUD. Menurut standar nasional pendidikan seharusnya guru yang mengajar di Lembaga PAUD formal maupun non formal memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Guru PAUD/S1 Psikologi/ S1 Pendidikan. Masih minimnya lulusan S1/D4 Pendidikan Guru PAUD menyebabkan sebagian besar guru PAUD merupakan sarjana pendidikan Non Guru PAUD bahkan masih ada yang hanya tamatan SMA.
 5. Kualitas program pendidikan anak usia dini masih rendah, program pembangunan pendidikan anak usia dini masih sebatas pada penyediaan akses dan layanan pendidikan, belum menyentuh pada kualitas proses belajar dalam pencapaian kurikulum.
 6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Keterlibatan orang tua yang belum seiring sejalan dengan lembaga PAUD. Dan kurangnya kerjasama lembaga PAUD dengan orang tua.
- b. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
- Beberapa permasalahan dalam Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagai berikut.
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs mencapai 98,98 % (sumber data BPS Kab. Bima) dari penduduk usia 13 - 15 tahun sebanyak 18.575. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang tidak terdaftar pada lembaga pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Bima.
 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mencapai 98,45% dari penduduk usia 7 - 12 tahun sebanyak 45.195. Hal ini berarti masih terdapat sebanyak 1,15% anak usia 7-12 tahun yang belum bersekolah pada jenjang pendidikan SD atau telah menamatkan diri pada jenjang pendidikan SD/MI.

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs mencapai 83,73% dari penduduk usia 13 - 15 tahun sebanyak 18.418. Hal ini berarti masih terdapat 16,27% anak usia sekolah 13-15 tahun yang belum atau tidak terdaftar pada satuan pendidikan di SMP di Kabupaten Bima atau sudah menamatkan pendidikan pada jenjang SMP atau Putus Sekolah.
 4. Kemampuan literasi dan numerasi siswa SD dan SMP di Kabupaten Bima masih rendah. Berdasarkan raport pendidikan Kabupaten Bima nilai kompetensi literasi dan numerasi masih merah atau masih rendah.
 5. Masih ada siswa droup out (DO) pada jenjang SD/MI sederajat sebesar 0,35%. Sedangkan jenjang SMP/MTs sederajat sebesar 0,24%
 6. Masih ada pendidik pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang belum berkualifikasi S1/D4
 7. Sarana Prasarana Pendidikan yang mendukung transformasi proses pembelajaran modern belum tersedia.
 8. Masih terdapat ruang kelas SD dan SMP yang rusak sedang/berat, yaitu : Ruang kelas SD sebanyak 304 ruang , Ruang kelas SMP sebanyak 125 ruang.
 9. Perubahan regulasi pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat menyebabkan pelaksanaan regulasi tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya.
- c. Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Permasalahan di Bidang Pembinaan Ketenagaan masih terkait dengan dengan masih rendahnya kompetensi guru yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut
1. Masih ada pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4
 2. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai PNS masih kurang
 3. Kemampuan guru memanfaatkan teknologi informasi pada proses pembelajaran masih kurang/terbatas.
 4. Kemampuan guru untuk mengikuti paradigma baru dalam pendidikan dan pembelajaran masih lamban
 5. Distribusi tenaga pendidikan yang belum merata sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
 6. Masih ada guru PNS yang belum Sertifikasi.
- d. Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga
1. Angka melek huruf penduduk Kabupaten Bima sampai dengan tahun 2024 masih sebesar 90,16 persen artinya masih terdapat 9,84% penduduk yang buta huruf.
 2. Sebanyak 8,59% penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak menamatkan sekolah minimal di tingkat SMA/ sederajat.

3. Apresiasi masyarakat terhadap pendidikan non formal masih minim;
 4. Kemampuan literasi dan numerasi masyarakat yang masih rendah;
 5. Kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga masih kurang;
 6. Ketersediaan Sarana prasarana keolahragaan masih minim;
 6. Prestasi kepemudaan dan keolahragaan masih minim
- e. Kebudayaan
1. Situs tidak terpelihara dengan baik
 2. Seni dan budaya Bima semakin pudar karena modernisasi
 4. Minat dan bakat terhadap seni dan budaya Bima semakin berkurang
 5. Kurangnya sarana prasarana, sumber daya dalam pendidikan seni dan budaya
- f. Penguatan Tata kelola, Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Pendidikan
1. Kurangnya sarana penunjang pelayanan tingkat SKPD
 2. Kurangnya sumber daya aparatur ASN dan P3K
 3. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan
 4. Sekolah belum menerapkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah MBS dengan baik.
 5. Belum Optimalnya peran dewan pendidikan

Dalam pada itu berbagai tantangan atau ancaman (*threat*) yang diperkirakan akan dihadapi antara lain adalah;

1. Kemajuan teknologi informasi yang berdampak positif sekaligus berdampak negatif pada proses pembelajaran
2. Ketersediaan anggaran yang belum memadai
3. Berkurangnya jumlah anak usia SD-SMP menyebabkan penurunan jumlah siswa SD – SMP pada setiap tahunnya.
4. Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama seperti Pondok Pesantren yang terus meningkat
5. Masih rendahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran (BOS/BOP) di satuan pendidikan
6. Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (Operator Sekolah)
7. Masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa SD dan SMP
8. Sarana prasarana pendidikan pada sebagian satuan pendidikan belum memenuhi standar nasional yang ditetapkan

9. Potensi daerah yang kurang menyerap sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bima, berdampak pada perpindahan penduduk Kabupaten Bima ke daerah lain yang memiliki potensi dan peluang kerja yang lebih baik.
10. Perkelahian antar kampung, antar desa masih terjadi sebagai akibat dari interaksi dan kesenjangan di bidang social dan politik.
11. Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat di tengah pertumbuhan anak didik tanpa diikuti dengan pengawasan dan pengendalian dari orang tua dapat memicu peningkatan kenakalan remaja.
12. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan pendidikan.
13. Politisasi pendidikan dengan menggunakan isu-isu pendidikan sebagai komoditas politik.
14. Penyelenggaraan pendidikan belum mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan dari aspek peluang (*opportunity*) dijumpai hal-hal sebagai berikut;

1. Sistem perdagangan dunia yang terbuka memberikan peluang dalam meningkatkan mutu pendidikan pada seluruh tataran pendidikan;
2. Semakin terbukanya peluang bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan yang beragam pada saat ini, sehingga layanan pendidikan yang bermutu sangat penting perannya;
3. Kemajuan teknologi informasi yang memberi dampak besar dalam proses pembelajaran.
4. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan sebagai bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
5. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan andil dalam peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Bima.
6. Semakin luasnya akses informasi melalui teknologi komunikasi dan informasi (TIK, *Web* dan sejenisnya) membuka peluang bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk belajar terus menerus meningkatkan kemampuan diri;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima Tahun 2025-2029.

Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan program rancangan awal rencana kerja yang meliputi Program Pengelolaan Pendidikan, Program Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Program Peningkatan Kapasitas Kepemudaan, Program Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kebudayaan dan lainnya. Program-program ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian indikator renstra 2025-2029.

Berikut review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2026 Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bima merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi urusan pemerintahan yang menggunakan konsep otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan layanan pendidikan merupakan urusan wajib yang mendapat porsi otonomi daerah yang luas. Tuntutan atas layanan pendidikan yang prima, khususnya yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima mengharuskan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga untuk siap dan mampu menjawab seluruh tuntutan masyarakat, yang semakin hari semakin tinggi permintaannya.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan pelayanan pendidikan, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui konsep perencanaan partisipatif. Adapun metode pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pendidikan melalui perencanaan partisipatif yaitu melalui penerimaan usulan Anggota Legislatif (DPRD Kabupaten Bima). Selain itu, usulan program dan kegiatan juga diterima pada saat Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, hasil kunjungan pimpinan daerah.

Dengan fasilitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima, usulan program dan kegiatan juga diterima, baik pada tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) maupun tingkat Kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Usulan program dan kegiatan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima melalui forum-forum sebagaimana yang disebutkan, secara detail dapat dilihat pada table dibawah ini :\

Tabel.T-VI.C.1
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kabupaten Bima Tahun 2025

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume		Catatan ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun					
1	SD NEGERI INPRES KALAMPA 2	Jl. Jenderal Sudirman, Rt.03/Rw.05 Dusun Rade, Kec		2	Lokal	
2	SD NEGERI 3 TENTE	Jln. Lintas Tente -		6	Lokal	

		Parado				
3	SDN INPRES 02 RISA	Risa Woha		2	Lokal	
4	SD NEGERI INPRES KALAMPA 1	JL. LINTAS TENTE - GODO		2	Lokal	
5	SDN INPRES WADU WANI	Jl. Lintas Naru Keli		2	Lokal	
6	SD INPRES PUCUKE	Jl.Lintas Pucuke - Keli		2	Lokal	
7	SD NEGERI RISA	JL. LINTAS DONGGOBO LO - KELI		1	Lokal	
8	SD NEGERI TALABIU	JL. BUYA HAMKA		2	Lokal	
9	SD NEGERI INPRES RABAKODO	JL. Buya Hamka		2	Lokal	
10	SD INPRES PANDAI	Pandai		2	Lokal	
11	SD NEGERI Penapali	JL. LINTAS BIMA - SUMBAWA		3	Lokal	
12	SD INPRES RISA 1	Risa Woha		2	Lokal	
13	SD NEGERI Dadibou	JL. LINTAS TENTE - GODO		2	Lokal	
14	SD INPRES KUMBE	Kumbe Risa		3	Lokal	
15	SD INPRES KELI	Jl.Lintas Naru- keli		6	Lokal	
16	SD NEGERI DONGGO BOLO	JL. LINTAS RISA - DONGGOBO LO		2	Lokal	
17	SD INPRES SAMILI 2	Jl. Lintas Tente Godo		3	Lokal	
18	SD NEGERI SAMILI	Jl. Lintas Tente-Godo		3	Lokal	
19	SD INPRES MINTE	Jl.Lintas Minte Dadibou		2	Lokal	
20	SD NEGERI KELI	Jl. Lintas Naru Keli - Tente		2	Lokal	
21	SDN INPRES RIANDO	Jl. Pantura Soromandi		6	Lokal	
22	SD NEGERI SARITA	Sarita		3	Lokal	
23	SD NEGERI SAI	Sai		2	Lokal	
24	SDN INPRES BAJO	Dusun Ndanondere		2	Lokal	

25	SD NEGERI TEH	Jl. Lintas Bajo - Sampungu		3	Lokal	
26	SD NEGERI INPRES LIA	Punti		2	Lokal	
27	SDN INPRES SAMPUNGU	Jln.Lintas Sampungu - Soromandi		3	Lokal	
28	SD NEGERI INPRES WONTO	Jln. Lintas Sampungu - Soromandi		2	Lokal	
29	SD INPRES SABA	Saba		2	Lokal	
30	SD INPRES PUNTI	Punti		2	Lokal	
31	SD INPRES LEWINTANA	Lewintana		3	Lokal	
32	SD NEGERI WADUKOPA	Jl.Lintas Sarita-Wadukopa		2	Lokal	
33	SD NEGERI KAMUNTI			3	Lokal	
34	SD NEGERI BAJO	Bajo		3	Lokal	
35	SDN SONCOLUKA	Jl. Lintas Sai - Sampungu		3	Lokal	
36	SD INPRES SAI	Dusun Jati RT 14/RW 07		6	Lokal	
37	SD INPRES KAWAE	Jln. KAWAE		2	Lokal	
38	SD INPRES LESU	Lesu		3	Lokal	
39	SD INPRES RIAMAU	Riamau		2	Lokal	
40	SDN INpres Kalate	Dusun Kalate Desa Riamau		2	Lokal	
41	SD NEGERI 2 MARIA	Jln. Lintas Bima-Wawo-Sape Km.17		2	Lokal	
42	SD NEGERI TARLAWI	Jalan Lintas Bima Sape.Desa (Kombo - Tarlawi)		2	Lokal	
43	SD INPRES 2 MARIA	Maria Wawo		2	Lokal	
44	SD NEGERI 3 MARIA	Jl.lintas Bima Sape		2	Lokal	
45	SD NEGERI INPRES TARLAWI	Jln Oi Nao		2	Lokal	
46	SDN INPRES KAMBILO	Pesa Wawo		2	Lokal	
47	SD NEGERI INPRES 1 MARIA	Jalan Lintas Bima Sape		2	Lokal	
48	SD INPRES KOMBO	Jalan Lintas Bima-Sape, Kombo-Wawo		2	Lokal	

49	SD NEGERI 1 KAMBILO	Kambilo		3	Lokal	
50	SD NEGERI KOMBO	Raba Wawo		1	Lokal	
51	SDN INPRES NAE	Jalan Lintas Pelabuhan Sape		2	Lokal	
52	SD INPRES NCIRI	Nciri		2	Lokal	
53	SD INPRES NATU	JLN.LNTAS SAPE-WERA		2	Lokal	
54	SD NEGERI BUGIS	JLN. JENDRAL AHMAD YANI		2	Lokal	
55	SD NEGERI 1 SAPE	Jln. Soekarno Hatta		2	Lokal	
56	SD NEGERI 7 SAPE	Rai Oi Sape - Bima		3	Lokal	
57	SD NEGERI Satampa Lawa	Jln. Lintas Sape-wera		2	Lokal	
58	SD INPRES BOKE	JLN. LINTAS SAPE BIMA		1	Lokal	
59	SD INPRES RASABOU	Desa Rasabou		6	Lokal	
60	SD NEGERI KOWO	Jl. Lintas Sape - Wera		1	Lokal	
61	SD NEGERI BUNCU	Jl.Lintas Sape-Wera		2	Lokal	
62	SD NEGERI INPRES JIA	Jln. Lintas Sape Bima		3	Lokal	
63	SD INPRES BUGIS	Jl. Protokol, Lintas Pelabuhan Sape		3	Lokal	
64	SD NEGERI 6 SAPE	JLN.RUMA MUNDU		2	Lokal	
65	SD NEGERI POJA	Jalan Lintas Sape - Wera		3	Lokal	
66	SD INPRES PARANGINA	Desa Parangina		2	Lokal	
67	SD NEGERI Inpres Pasir Putih	Dusun Pasir Putih		2	Lokal	
68	SD NEGERI 5 SAPE	JLN.PLN RANTING SAPE		2	Lokal	
69	SD NEGERI SARI 2	Jl Jurusan Sape		2	Lokal	
70	SD NEGERI OI CERE	Jln Embung Kowo		2	Lokal	

71	SD INPRES SANGIA	Jl. Lapangan Putih Sangia		2	Lokal	
72	SD NEGERI BOKE	Jalan Lintas Sape - Bima		1	Lokal	
73	SD NEGERI 8 SAPE	Jln. Ronamasa		3	Lokal	
74	SD NEGERI NANGA PAMBU	Jalan Lintas Sape Wera		2	Lokal	
75	SD NEGERI 2 Sape	JL. SOEKARNO - HATTA		2	Lokal	
76	SD NEGERI INPRES BAJO SARAE	Jalan Lintas Tpi Bugis Sape		3	Lokal	
77	SD NEGERI 9 SAPE	Jalan Rona Masa		3	Lokal	
78	SD INPRES DEA	Naru Barat Jln. PLN Ranting Sape		2	Lokal	
79	SD NEGERI NAGANURI	Jln. Lintas PPI Dusun Gusung		2	Lokal	
80	SD NEGERI Jo Rato	Jln. Lintas Sape Bima		2	Lokal	
81	SDN BAJO SARAE			2	Lokal	
82	SD NEGERI 2 Sila	Jl. Lintas Sumbawa Desa Leu		2	Lokal	
83	SDN INPRES RABABUNTU	Rababuntu		2	Lokal	
84	SD NEGERI Rada	Jl. Lintas Donggo Desa Rada		2	Lokal	
85	SD NEGERI SANOLO	Sanolo		3	Lokal	
86	SD NEGERI INPRES SANOLO	Jalan Lintas Sumbawa Bima - Desa Sanolo		3	Lokal	
87	SD INPRES TIMU	Timu		1	Lokal	
88	SDN INPRES PALI	Lintas Sumbawa - Bima		1	Lokal	
89	SD NEGERI 5 Sila	Jl. Pendidikan Desa Kananga		2	Lokal	
90	SD NEGERI INPRES KANANGA 2	Jalan Pahlawan No.3 Desa Kananga		3	Lokal	

91	SDN INPRES MUKU	Jl. Lintas Sumbawa		2	Lokal	
92	SD NEGERI INPRES PALISONDO	Palisondo		2	Lokal	
93	SD INPRES LARA	Lara Tambe		2	Lokal	
94	SD INPRES BONTOKAPE	Jl. Lintas Sumbawa		2	Lokal	
95	SD NEGERI INPRES SONDOSIA	Jalan Lintas Sumbawa, Desa Sondosia RT 01/RW 01		1	Lokal	
96	SD NEGERI INPRES KARA	Dusun Beringin		2	Lokal	
97	SD NEGERI 1 Sila	Jl. Lintas Sumbawa Desa Rato		1	Lokal	
98	SDN INPRES NGGEMBE	Jln. Lintas Soromandi Desa Nggembe		3	Lokal	
99	SD NEGERI NGGARO NANGGA	Dusun Nggaro Nangga Desa Talapiti		2	Lokal	
100	SD NEGERI 1 RITE	Sonco lumba		1	Lokal	
101	SD NEGERI INPRES MAWU	Mawu		2	Lokal	
102	SD NEGERI NIPA	Nipa JAYA		3	Lokal	
103	SD NEGERI INPRES NIPA	Pantai Bahagia		2	Lokal	
104	SD INPRES 2 RITE	RITE		2	Lokal	
105	SD NEGERI SORI KALAI	Jl. Sori Kalai		2	Lokal	
106	SD INPRES 2 TOLOWATA	Tengge 1		3	Lokal	
107	SD NEGERI 2 Tolowata	TalaNae		3	Lokal	
108	SD NEGERI DANA BURA	Nipa		2	Lokal	
109	SD NEGERI 1 TOLOWATA	Tolowata		3	Lokal	
110	SD NEGERI NDAWA	Dusun Ndawa		3	Lokal	
111	SD INPRES UJUNG KALATE	Ujung Kalate		2	Lokal	
112	SDN INPRES 2 NGALI	Jl. Lintas Tente Karumbu		2	Lokal	
113	SD INPRES 2 RENDA	Renda		2	Lokal	
114	SD INPRES 1 RENDA	Jl. Lintas Tente - Langgudu		2	Lokal	
115	SD NEGERI NCERA	Ncera		2	Lokal	

116	SD NEGERI RUNGGU	Jl. TGH.Abdurahman Idris		3	Lokal	
117	SD NEGERI 01 NGALI	Jln Lintas Tente-Karumbu,Ngali		2	Lokal	
118	SD NEGERI INPRES LIDO	Lido		2	Lokal	
119	SD INPRES CENGGU BELO	Jl.LintasTente - Karumbu		1	Lokal	
120	SD NEGERI 2 NGALI	Jurusan Monta Ngali		2	Lokal	
121	SD NEGERI RENDA	Renda		2	Lokal	
122	SD NEGERI 1 CENGGU	Jln. TGH. Abdurrahman Idris RT. 010 RW. 004 Desa C		2	Lokal	
123	SD NEGERI LIDO	Jln.Lintas Allaudin		2	Lokal	
124	SD NEGERI TONGGONDOA	Tonggondoa		2	Lokal	
125	SD INPRES NTONGGU BARU	Jln. Lintas Ntonggu Baru-Kaowa		3	Lokal	
126	SD NEGERI INPRES 1 NTONGGU	Jalan Lintas Palibelo - Ntonggu		2	Lokal	
127	SD NEGERI 2 NATA	Jln. TGH. Abdurrahman Isdri Desa Nata		6	Lokal	
128	SD NEGERI 2 NTONGGU	Ntonggu		2	Lokal	
129	SD NEGERI RAGI	RAGI		2	Lokal	
130	SD INPRES BRE	Jln Lintas Teke - Palibelo		2	Lokal	
131	SD NEGERI PANDA	Jalan Sultan Muhammad Salahuddin		2	Lokal	
132	SD INPRES DORE	Jl.Lintas Talabiu Dore		3	Lokal	
133	SD NEGERI 2 TEKE	Jl.lintas Teke Palibelo		2	Lokal	
134	SD NEGERI 1 NATA	Jalan Lintas Nata-Palibelo		2	Lokal	
135	SD NEGERI 1 NTONGGU	Ntonggu		2	Lokal	
136	SDN INPRES TONGGORISA	Jalan Lintas Palibelo Teke		2	Lokal	

137	SD INPRES OI NIU	Jln. Muhammad Salahuddin		2	Lokal	
138	SD INPRES PADOLO	Padolo		3	Lokal	
139	SDN TONGGORISA			2	Lokal	
140	SDN BRE			2	Lokal	
141	SD NEGERI ROI	Roi		2	Lokal	
142	SD NEGERI BELO	Desa Belo		2	Lokal	
143	SD NEGERI 1 PARADO	Parado Rato		2	Lokal	
144	SD NEGERI KANCA	Kanca		2	Lokal	
145	SD INPRES WORO PARADO	Woro Parado		3	Lokal	
146	SD INPRES 02 PARADO	Parado Rato		2	Lokal	
147	SD NEGERI KUTA-PARADO	Jln. Lintas Lere		2	Lokal	
148	SD INPRES LERE	Jalan Lintas Lere-Parado		2	Lokal	
149	SDN INPRES DENA	Dena		2	Lokal	
150	SD NEGERI Inpres Tonda	Jl. Lintas Dena - Campa Desa Tonda		2	Lokal	
151	SD INPRES 3 WORO	Jln. Raya Woro-Madapangga-Bima		2	Lokal	
152	SD NEGERI INPRES RADE	Rade		1	Lokal	
153	SD NEGERI TONDA	Tonda		4	Lokal	
154	SD NEGERI MPURI	Mpuri		3	Lokal	
155	SD NEGERI MONGGO	Monggo		3	Lokal	
156	SD INPRES MPURI	Jalan Lintas Dena Campa		1	Lokal	
157	SD INPRES TOLOLARA	Tololara		3	Lokal	
158	SD INPRES 2 WORO	Woro		3	Lokal	
159	SD NEGERI WORO	Desa Woro		2	Lokal	
160	SD NEGERI 2 CAMPA	Campa		2	Lokal	
161	SD NEGERI 2 DENA	Jln.Lintas Woro Campa -		2	Lokal	
162	SD INPRES NCANDI	Ncandi		2	Lokal	
163	SD NEGERI INPRES SAMBI TANGGA	Rade		2	Lokal	
164	SD NEGERI RADE	Rade		1	Lokal	

165	SD INPRES MONGGO	Jalan Cabang Kampila		3	Lokal	
166	SD NEGERI 1 CAMPA	Jalan Lintas Campa Dena Madapangga		5	Lokal	
167	SD INPRES NDANO	DESA NDANO MADAPANG GA		2	Lokal	
168	SD INPRES 1 WORO	RT. 14 DUSUN 01 DESA WORD		2	Lokal	
169	SD INPRES CAMPA	Jalan Pendidikan No. 45		2	Lokal	
170	SD NEGERI UPT Laju	Jalan Lintas Tente- Simpasai- Waworada		2	Lokal	
171	SD INPRES NANGANIU	Dusun Nanga Niu		2	Lokal	
172	SDN INPRES DORO OO	JL. LINTAS SIMPASAI WAWORADA LANGGUDU		3	Lokal	
173	SD NEGERI PALI	Jl. Lintas Kalodu		2	Lokal	
174	SD NEGERI LAJU	Jalan. Lintas Simpasai - Waworada		2	Lokal	
175	SD INPRES RIMBA	Jalan Tente Karumbu		2	Lokal	
176	SD INPRES PASIR PUTIH	Pasir Putih		2	Lokal	
177	SDN INPRES TONGGORISA	Mambanae		2	Lokal	
178	SDN MAMBANAE	Jln.Tente Karumbu		2	Lokal	
179	SD NEGERI ROMPO	Karumbu Sape		2	Lokal	
180	SD NEGERI INPRES DUMU	Karampi		2	Lokal	
181	SD INPRES KARAMPI	Jalan Lintas Tente Kawuwu		2	Lokal	
182	SD INPRES KALEMBA	Jl. Lintas Karumbu Sape		2	Lokal	
183	SD INPRES RORE	Rupe - Langgudu- Bima		2	Lokal	
184	SD NEGERI 1 RUPE	JLN. LINTAS SAPE		2	Lokal	

		KARUMBU				
185	SD NEGERI INPRES OI UA	JLN. LINTAS SONDO - PUSU		2	Lokal	
186	SDN INPRES PUSU	Jln.Lintas Tente - Simpasai - Laju - Waworada		2	Lokal	
187	SD INPRES LAJU	Jln. Lintas Kalodu - Karumbu		2	Lokal	
188	SD INPRES KALODU	Jl. Lintas Tente - Karumbu		2	Lokal	
189	SD IT AL KARAMAH	Dusun Nadi Desa Laju		2	Lokal	
190	SDN MEKAR NADI	Karampi		2	Lokal	
191	SD INPRES SOROBALI	Karumbu		2	Lokal	
192	SD NEGERI SORO AFU	Soroafu-Waduruka		2	Lokal	
193	SD INPRES SOROAFU	Kangga		2	Lokal	
194	SD INPRES KANGGA	Doro Oo		2	Lokal	
195	SD NEGERI DORO OO	Rupe-Langgudu-Bima		2	Lokal	
196	SD NEGERI 2 RUPE	Jln.Lintas Tente-Kawuwu		2	Lokal	
197	SD NEGERI KAWUWU	Desa Karumbu		2	Lokal	
198	SD NEGERI INPRES KARUMBU	Desa Waduruka		2	Lokal	
199	SD NEGERI JATIBARU	Tamandaka		2	Lokal	
200	SD INPRES TAMANDAKA	Jln. Lintas Karumbu Sape		2	Lokal	
201	SDN INPRES SAMBANE	SARAE RUMA LANGGUDU-BIMA NTB		2	Lokal	
202	SD NEGERI INPRES SIDO	Jln. Lintas Tente Karumbu		2	Lokal	
203	SDN KARUMBU			3	Lokal	
204	SDN SIDO	Nunggi		2	Lokal	
205	SD NEGERI INPRES NUNGGI-WERA	NANGA WERA		2	Lokal	

206	SD INPRES 2 WORA	HIDIRASA		2	Lokal	
207	SD INPRES HIDIRASA	Nunggi		2	Lokal	
208	SD NEGERI 3 NUNGGI	Payi - Tengge		2	Lokal	
209	SD NEGERI INPRES PAYI	Dusun Radu		2	Lokal	
210	SD INPRES RADU	Tawali		2	Lokal	
211	SD INPRES NGGARO RANDI	Dusun Nanga Na,e		2	Lokal	
212	SD NEGERI NANGANAE	WORA DALAM		2	Lokal	
213	SD INPRES WORA DALAM-WERA	Tawali		2	Lokal	
214	SD NEGERI 1 TAWALI	Payi		2	Lokal	
215	SDN INPRES KALO PAYI	Jln. Kali Bala Desa Bala Kec. Wera		3	Lokal	
216	SDN INPRES BALA	Sukamaju		2	Lokal	
217	SD NEGERI SUKA MAJU	Ntoke		2	Lokal	
218	SD INPRES NTOKE-WERA	Naru Ranggasolo		2	Lokal	
219	SD NEGERI NARU-HIDIRASA	Tongga		2	Lokal	
220	SD NEGERI TONGGA	Nunggi		2	Lokal	
221	SD NEGERI INPRES SORI NUNGGI	Nunggi - Wera		2	Lokal	
222	SD NEGERI 1 NUNGGI	Payi Dalam		2	Lokal	
223	SD INPRES PAYI DALAM	Jln. Lintas Tawali Sangiang Wera		3	Lokal	
224	SD INPRES SANGIANG	Hidirasa		2	Lokal	
225	SD NEGERI HIDIRASA	Wora - Wera		2	Lokal	
226	SD INPRES 1 WORA	JLN.LINTAS WORA TADEWA		2	Lokal	
227	SD INPRES SANGIANG PULAU	Sangiang		2	Lokal	
228	SD NEGERI PAYI	Jalan Lintas Wera-Sape		2	Lokal	
229	SD INPRES TAWALI	Jalan Lintas Tawali-Wera		2	Lokal	
230	SD NEGERI NTOKE	SDN NTOKE		3	Lokal	
231	SD NEGERI 2 TAWALI	Tawali - Wera		2	Lokal	
232	SD NEGERI WORA	Desa Nanga Wera		2	Lokal	

233	SD INPRES NANGANAE			2	Lokal	
234	SD MUHAMMADIYAH LAMBU	Jl. Lintas Diwu Moro		2	Lokal	
235	SD NEGERI INPRES BAKU	Dusun Baku		2	Lokal	
236	SD INPRES 2 RATO	Jalan Jenderal Sudirman		2	Lokal	
237	SD NEGERI NANGAWUWU	Jalan Lintas Sumi Lambu		2	Lokal	
238	SD NEGERI NGGELU	Jln Sultan Abdul Kahir Dusun Singa		1	Lokal	
239	SD NEGERI 2 KALEO	Jln. Dam Diwu Moro		2	Lokal	
240	SD NEGERI INPRES SORO	Jln.jendral Sudirman No.5		2	Lokal	
241	SD NEGERI MANGGE	Mangge		1	Lokal	
242	SD NEGERI 1 SIMPASAI	Jln. sekh mubarrak, sangga		2	Lokal	
243	SD NEGERI 2 MALAJU	Jalan Jendral Soedirman		2	Lokal	
244	SD NEGERI 1 MALAJU	Jl.Jendral Sudirman		2	Lokal	
245	SD NEGERI DIWU MORO	Jl. Dam Diwu Moro		2	Lokal	
246	SD NEGERI MPORI LEMBO	Dusun Mpori Lembo		2	Lokal	
247	SD INPRES NO 1 RATO	Jln Jenderal Sudirman		2	Lokal	
248	SD INPRES KALEO	JLN. DAM DIWU MORO KALEO- LAMBU		2	Lokal	
249	SD NEGERI INPRES MANGGE	DUSUN MANGGE BARU		2	Lokal	
250	SD NEGERI SUMI 02	Jln Jendral Sudirman		2	Lokal	
251	SD INPRES 1 LANTA	Jl. SYEKH MUBARAK		2	Lokal	
252	SD NEGERI TEMBA MANGGE	Jl.dam Diwumoro		2	Lokal	
253	SD NEGERI INPRES KAWORO	DUSUNKAW ORO HIDIRASA		2	Lokal	

254	SD INPRES MANGGE DALAM	Dusun Mangge Dalam		2	Lokal	
255	SD NEGERI Kuwuruma	Dusun Sosial RT.09 RW.05		2	Lokal	
256	SD NEGERI Simpasai 2	Desa Sangga		2	Lokal	
257	SD NEGERI LAMBU	Jln Telkom No.57		1	Lokal	
258	SD NEGERI INPRES 2 LANTA	Jalan Syekh Mubarak		2	Lokal	
259	SD INPRES SIMPASAI	DESA SIMPASAI		2	Lokal	
260	SD NEGERI 1 SUMI	Jl. Jenderal Sudirman		2	Lokal	
261	SDN 2 Rato Lambu			2	Lokal	
262	SD NEGERI INPRES PADENDE	Bumi Pajo		2	Lokal	
263	SDN INPRES RORA	Rora		2	Lokal	
264	SD NEGERI KALA	Langgentu Oo		2	Lokal	
265	SDN O O	JL. LINTAS KAMUNTI MPILI		2	Lokal	
266	SD INPRES SANGARI	Sangari Mbawa		2	Lokal	
267	SD NEGERI MANGGEKOMPO	Manggekompo		2	Lokal	
268	SD INPRES KALA	Kala		2	Lokal	
269	SD NEGERI MBAWA	Mbawa		2	Lokal	
270	SD INPRES JANGO	Bima		2	Lokal	
271	SD INPRES OO	JL. LINTAS Oo		2	Lokal	
272	SD INPRES DORIDUNGA	Doridunga		2	Lokal	
273	SD NEGERI PADENDE	Rasabou		3	Lokal	
274	SD NEGERI INPRES PALAMA	Palama		2	Lokal	
275	SD INPRES NGGERU KOPA	DUSUN NGGERUKO PA		2	Lokal	
276	SD NEGERI SANGARI	Jln. Lintas Sangari-Donggo		2	Lokal	
277	SD NEGERI KAMUNTI	Kamunti		3	Lokal	
278	SD INPRES RORA KECIL	Jln. H. Syarif Rora Pemukiman II		2	Lokal	

		Desa Rora				
279	SD NEGERI RORA	RT.01/RW01 Rora Kec. Donggo Kab. Bima		2	Lokal	
280	SDN INPRES TOLONGGERU			2	Lokal	
281	SDN SARITA			2	Lokal	
282	SD NEGERI 2 BORO	Jalan Lintas Tambora		2	Lokal	
283	SD NEGERI 2 KORE	DESA SANDUE		2	Lokal	
284	SD NEGERI TALOKO	Taloko		3	Lokal	
285	SD NEGERI 1 BORO	Desa Boro		2	Lokal	
286	SD NEGERI SORI TALOKO	Sori Taloko		5	Lokal	
287	SD Negeri 3 Kore	Jl. La Hami Kore		2	Lokal	
288	SD NEGERI 4 KORE	Jalan Pelabuhan Kore		2	Lokal	
289	SD NEGERI OI SARO	Jl. Lintas Sanggar - Tambora		2	Lokal	
290	SD NEGERI 2 PIONG	Piong		2	Lokal	
291	SD NEGERI 1 KORE	Jl. La - Hami		2	Lokal	
292	SD NEGERI INPRES 2 TANGGA	Jl. Lintas Parado		2	Lokal	
293	SDN INPRES TOLOTANGGA	Jln. BUMI GORA TOLOTANGG A		2	Lokal	
294	SD NEGERI MONTA	JLN lintas Sakuru-Monta		2	Lokal	
295	SD NEGERI Inpres Waro	Jl. Wai Kancio Waro - Monta - Bima		3	Lokal	
296	SDN SIMPASAI	Jalan Lintas Parado		2	Lokal	
297	SD NEGERI TANGGA	Tangga Monta		2	Lokal	
298	SD NEGERI INPRES 2 SIMPASAI	Desa Simpasai		2	Lokal	
299	SDN INPRES DIHA	Dusun Diha		2	Lokal	
300	SD INPRES SARAE ME E	Tanjung Mas Desa Wilamaci		2	Lokal	

301	SD NEGERI INPRES 1 SIMPASAI	Simpasai		2	Lokal	
302	SD NEGERI Sondo	Jln. Lintas Wai Kancio		2	Lokal	
303	SD NEGERI INPRES TOLOUWI	Tolouwi		2	Lokal	
304	SD NEGERI INPRES 1 TANGGA	Jalan Lintas Tente - Parado		2	Lokal	
305	SD NEGERI Inpres Tangga Ombo	Tangga Ombo		2	Lokal	
306	SD INPRES NONTOTERA	Nontotera		2	Lokal	
307	SD INPRES SANGIANG PULAU	Jl. Lintas Pantai Wane Dusun Wane		2	Lokal	
308	SD NEGERI PAYI	Jln.lintas Parado		2	Lokal	
309	SD NEGERI 2 TAWALI	Jalan Lintas Tawali-Wera		2	Lokal	
310	SD NEGERI WORA	SDN NTOKE		2	Lokal	
311	SD INPRES NANGANAE	Tawali - Wera		2	Lokal	
312	SD MUHAMMADIYAH LAMBU	Desa Nanga Wera		2	Lokal	
313	SD NEGERI INPRES BAKU			3	Lokal	
314	SD INPRES 2 RATO	Jl. Lintas Diwu Moro		2	Lokal	
315	SD NEGERI NANGAWUWU	Dusun Baku		2	Lokal	
316	SD NEGERI NGGELU	Jalan Jenderal Sudirman		1	Lokal	
317	SD NEGERI 2 KALEO	Jalan Lintas Sumi Lambu		2	Lokal	
318	SD INPRES WANE	Jln Sultan Abdul Kahir Dusun Singa		2	Lokal	
319	SD NEGERI Inpres Pela	Jln. Dam Diwu Moro		2	Lokal	
320	SD NEGERI SIE	Jl.desa Sie		2	Lokal	
321	SD NEGERI INPRES 1 SIE	SIE-MONTA		2	Lokal	
322	SD INPRES SAKURU	Sakuru		2	Lokal	
323	SDN INPRES MONTA	Jln.Lintas Sakuru - Ngali		2	Lokal	
324	SD INPRES TANJUNG BARU	Jl.desa Tanjung Baru		2	Lokal	
325	SD NEGERI INPRES 2 SIE	Sie Monta		2	Lokal	

326	SDN INPRES BARALAU	Baralau		2	Lokal	
327	SD NEGERI SAKURU	Jl Lintas Tente - Parado desa sakuru		2	Lokal	
328	SD NEGERI SAMBORI	Sambori		2	Lokal	
329	SD NEGERI INPRES KADI	Jalan Pemancar Telkom Doronae Oiwau		2	Lokal	
330	SD NEGERI TETA	Jl. Lintas Tente Desa Teta		2	Lokal	
331	SD INPRES SAMBORI	Jln. Lintas Tente		2	Lokal	
332	SD NEGERI KABORO	Kaboro		3	Lokal	
333	SD NEGERI KUTA LAMBITU	Jalan Lintas Tente-Teta		2	Lokal	
334	SD NEGERI KUTA LAMBITU	Jalan Lintas Tente-Teta		2	Lokal	
335	SD NEGERI SORI NAE	jln lintas tambora		2	Lokal	
336	SD NEGERI SORI KATUPA	Sori Katupa		2	Lokal	
337	SD NEGERI SORI BURA-TAMBORA	Sori Bura-tambora		2	Lokal	
338	SD NEGERI 2 LABUAN KANANGA	Labuan Kananga		2	Lokal	
339	SD NEGERI SORI LAJU-TAMBORA	Sori Laju - Tambora SP. 4		2	Lokal	
340	SDN INPRES KAWINDA TENGAH	Jl. Lintas Tambora - Bima		2	Lokal	
341	SD NEGERI JEMBATAN BESI	Jln.Lintas Puncak Tambora		2	Lokal	
342	SD NEGERI Tambora	Desa Oi Bura		2	Lokal	
343	SD NEGERI 1 LABUAN KANANGA	Jalan Lintas Tambora		2	Lokal	
344	SD NEGERI KAWINDA NAE	Kawinda Nae		2	Lokal	
345	SDN DORO LEDE	Jln. Lintas SP 6 Kec. Tambora		2	Lokal	
346	SDN DORO MBOLO	UPT SP. 2 SORI PANIHI		2	Lokal	

347	SD NEGERI SORI PANIHI	JALAN LINTAS TAMBORA		2	Lokal	

Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat.

Tabel.T-VI.C.1
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kabupaten Bima Tahun 2025

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan
----	------------------	--------	-------------------	-----------------	---------

						***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun					
	REHAB RUANG KELAS (R.KLS) Jenjang SMP					
1	SMP NEGERI 3 BOLO	Rada		5	Lokal	
2	SMP NEGERI 2 BOLO	Jl. Lintas Sumbawa Bolo Bima		4	Lokal	
3	SMP MUHAMMADIYAH BOLO	Jln Pendidikan No. 04 Ds Kananga		3	Lokal	
4	SMP NEGERI 4 BOLO	Jalan Lintas Sumbawa		1	Lokal	
5	SMP NEGERI 5 BOLO SATAP	Jl. Lintas Rasabou - Sanolo		1	Lokal	
6	SMP NEGERI 1 MADAPANGGA	Dena		2	Lokal	
7	SMP NEGERI 3 MADAPANGGA	Jln.Lintas Campa		3	Lokal	
8	SMP NEGERI 5 DONGGO SATAP	Dusun Kamunti		3	Lokal	
9	SMP NEGERI 6 DONGGO SATAP	Desa Palama Kec. Donggo Kab. Bima - NTB		2	Lokal	
10	SMP NEGERI 7 DONGGO SATAP	jalan lintas tolonggeru		3	Lokal	
11	SMP NEGERI 1 DONGGO	Jl. Pesanggerahan No.40 Oo		5	Lokal	
12	SMP NEGERI 3 DONGGO	Jln. Lintas Rora-Padende		2	Lokal	
13	SMP NEGERI 8 DONGGO SATAP	Jalan Lintas Ndanomango		2	Lokal	
14	SMP NEGERI 2 DONGGO	Jalan Lintas Sangari Donggo		4	Lokal	
15	SMP NEGERI 3 WOHA	Jln Lintas Sumbawa		8	Lokal	
16	SMP IT AL WAFA AL ISLAMI GODO	Jl. Lintas Bima - Sumbawa		2	Lokal	
17	SMP NEGERI 1 WOHA	Jln. Buya Hamka No. 25		6	Lokal	
18	SMP NEGERI 5 WOHA	Jl. Lintas Risa - Keli		5	Lokal	
19	SMP NEGERI 6 WOHA SATAP	DESA RISA KEC. WOHA		3	Lokal	
20	SMP NEGERI 1 SOROMANDI	Jl. Lintas Bajo -		4	Lokal	

		Sampungu				
21	SMP NEGERI 6 SOROMANDI SATAP	JLN LINTAS SAMPUNGU SOROMANDI		3	Lokal	
22	SMP NEGERI 7 SOROMANDI SATAP	Jalan Lintas Lia-Punti-Sampungu		3	Lokal	
23	SMP NEGERI 3 SOROMANDI	Jalan Pantura Sampungu Soromandi		3	Lokal	
24	SMP NEGERI 5 SOROMANDI	JL. LINTAS SAMPUNGU SOROMANDI		1	Lokal	
25	SMP NEGERI 2 SOROMANDI	Sai		3	Lokal	
26	SMP NEGERI 4 SOROMANDI	Jalan Lintas Sarita-Wadukopa		3	Lokal	
27	SMP NEGERI 8 SOROMANDI SATAP	NDANONDERE BAJO SOROMANDI		2	Lokal	
28	SMP NEGERI 9 SOROMANDI SATAP	Wonto		3	Lokal	
29	SMP NEGERI 1 SANGGAR			3	Lokal	
30	SMP NEGERI 4 SANGGAR	Jalan Lintas Tambora Boro Sanggar		9	Lokal	
31	SMP NEGERI 10 LANGGUDU SATAP	Jln. Lintas Karumbu-Sape		2	Lokal	
32	SMP NEGERI 11 LANGGUDU SATAP	Jln. Lintas Laut Teluk Waworada		3	Lokal	
33	SMP PGRI 2 BELO	Tente Karumbu		2	Lokal	
34	SMP NEGERI 14 LANGGUDU SATAP	Jln. Lintas Teluk Waworada - Sorobali		2	Lokal	
35	SMP NEGERI 12 LANGGUDU SATAP	Kalodu-Langgudu-Bima		2	Lokal	
36	SMP NEGERI 16 LANGGUDU SATAP	Jln. Lintas Kangga Langgudu		2	Lokal	
37	SMP NEGERI 9 LANGGUDU SATAP	Pusu Langgudu Bima		1	Lokal	
38	SMP NEGERI 2 LANGGUDU	Desa Dumu		2	Lokal	
39	SMP NEGERI 4 LANGGUDU	JLN. LINTAS TELUK WAWORADA		6	Lokal	
40	SMP NEGERI 6 LANGGUDU SATAP	Soroafu		3	Lokal	
41	SMP NEGERI 8 LANGGUDU SATAP	Laju		3	Lokal	
42	SMP NEGERI 17 LANGGUDU SATAP	jalan lintas tamandaka desa		3	Lokal	

		waduruka				
43	SMP PGRI 3 BELO BIMA	Jalan Tente Karumbu		2	Lokal	
44	SMP NEGERI 13 LANGGUDU SATAP	Jln. Lintas Tente - Kawuwu		2	Lokal	
45	SMP NEGERI 15 LANGGUDU SATAP	Jln. Lintas-tente Lambu.		2	Lokal	
46	SMP NEGERI 5 LANGGUDU	Jln Lintas Tente Karumbu		2	Lokal	
47	SMP PLUS DARUL HUSNA	Mawu		1	Lokal	
48	SMP NEGERI 3 LANGGUDU	Rupe		3	Lokal	
49	SMP NEGERI 2 AMBALAWI	Tolowata		4	Lokal	
50	SMP ITTG Al-Muchtadin	Jln. Lintas Bima - Wera		3	Lokal	
51	SMP NEGERI 1 AMBALAWI	Jln. Lintas Bima - Wera		4	Lokal	
52	SMP NEGERI 2 BELO	Jln Jurusan Tente Karumbu		2	Lokal	
53	SMP NEGERI 3 BELO	Ncera		2	Lokal	
54	SMP NEGERI 3 LAMBITU SATAP	Jl. Lintas Belo - Kuta		2	Lokal	
55	SMP NEGERI 1 LAMBITU	Lambitu Kuta		2	Lokal	
56	SMP NEGERI 4 LAMBU	Jl. Lintas Lambu		1	Lokal	
57	SMP NEGERI 8 LAMBU SATU ATAP	Unit Pemukiman Transmigrasi Baku		1	Lokal	
58	SMP NEGERI 6 LAMBU	Jl. Jendral Sudirman		2	Lokal	
59	SMP NEGERI 2 LAMBU	Kaleo - Lambu - Bima		6	Lokal	
60	SMP NEGERI 1 LAMBU	Jalan Dam Diwumoro		3	Lokal	
61	SMP NEGERI 6 MONTA SATU ATAP	Ds. Tangga Baru Kec. Monta		4	Lokal	
62	SMP NEGERI 4 MONTA	Jln. Lintas Tente Parado		2	Lokal	
63	SMP NEGERI 2 MONTA	Jln. Lintas Tente-Tolotangga		4	Lokal	
64	SMP NEGERI 3 MONTA	Monta		3	Lokal	
65	SMP NEGERI 7 MONTA SATU ATAP	Dsn. Diha		4	Lokal	
66	SMP NEGERI 5 PALIBELO	Jl. Lingkar Perumahan Panda		3	Lokal	

67	SMP NEGERI 4 PALIBELO SATAP	Jalan Lintas Ntonggu-Kaowa		3	Lokal	
68	SMP NEGERI 2 PALIBELO	Jln.Lintas Jenateke Ntonggu-Palibelo		4	Lokal	
69	SMP MUHAMMADIYAH PARADO	Jln. Pantai Woro Parado.		2	Lokal	
70	SMP NEGERI 3 PARADO SATAP	DUSUN RUMU RT 04/RW03, DESA LERE KEC. PARADO		1	Lokal	
71	SMP NEGERI 2 PARADO SATAP	Jln Soekarno Hatta No I		2	Lokal	
72	SMP IT NURUL KHALIFAH BIMA	Jln. Lintas Sape-Wera Nciri		1	Lokal	
73	SMP NEGERI 1 SAPE	Jl Sape Wera		3	Lokal	
74	SMP NEGERI 3 SAPE	JLN. RAYA SANGIA SAPE		3	Lokal	
75	SMP NEGERI 4 SAPE	jln. Jrs. Sape Desa Sari Bima		3	Lokal	
76	SMP NEGERI 3 TAMBORA	Jalan Pelabuhan Satonda Tambora Bima		2	Lokal	
77	SMP NEGERI 2 WAWO	Tarlawi Wawo		3	Lokal	
78	SMP NEGERI 4 WAWO SATAP	Jln. Lintas Bima-Sape		3	Lokal	
79	SMP NEGERI 1 WAWO	Jl. Lintas Tawali - Payi		3	Lokal	
80	SMP NEGERI 7 WERA SATAP	Jl. Lintas Wora - Tadewa		3	Lokal	
81	SMP NEGERI 2 WERA	Jalan Lintas Tawali - Wera		4	Lokal	
82	SMP NEGERI 1 WERA	Jln. Lintas Sangiang		4	Lokal	
83	SMP NEGERI 3 WERA	Jln. Lintas Wera - Sape		3	Lokal	
84	SMP NEGERI 5 WERA	Jl. Lintas Tawali - Payi		3	Lokal	
85	SMP NEGERI 10 WERA	DUSUN WANCA		1	Lokal	
86	SMP IT Hidayatullah	JL. Lintas Bima Wera		3	Lokal	
87	SMP NEGERI 4 WERA	Jl. Lintas Pedalaman Wora Wera		5	Lokal	
88	SMP NEGERI 9 WERA SATAP	Rada		5	Lokal	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Upaya-upaya pencapaian Visi Kabupaten Bima 2025-2029 yakni **“Mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang RAMAH “ Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal”** Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bima maka diwujudkan melalui pelaksanaan 5 (lima) Misi Kabupaten Bima yaitu :

1. Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat;
2. Mewujudkan Masyarakat Yang Aman Tertib Dan Nyaman Dengan Mengedepankan Penegakan Supermasi Hukum;
3. Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Didukung Tersedianya Sarana Dan Prasarana Berbasis Tata Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah Dengan Mengedepankan Rasa Tanggungjawab Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
5. Membangun Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing

Selain untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang tergambar dalam Visi Pembangunan Kabupaten Bima, pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bima juga memperhatikan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional khususnya Pembangunan pendidikan

nasional. Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah tercantum pada Point 4 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yakni memperkuat Pembangunan Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan Asta Cita tersebut Kemendikdasmen menerjemhkannya melalui pelaksanaan program prioritas sebagai berikut :

1. Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Pendidikan Kesempatan Pendidikan
2. Perbaikan dan Pemenuhan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pendidikan
3. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berkeadilan
4. Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan Guru
5. Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)
6. Penguatan Karakter dan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Pemberani
7. Penguatan Karakter, Pelatihan Guru BK dan Ke-BK-an
8. Pembelajaran Koding dan Artifisial
9. Tes Kemampuan Akademik (TKA)
10. Pengembangan Talenta dan Prestasi
11. Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
12. Penguatan Pendidikan Literasi, Numerasi Sains dan Teknologi

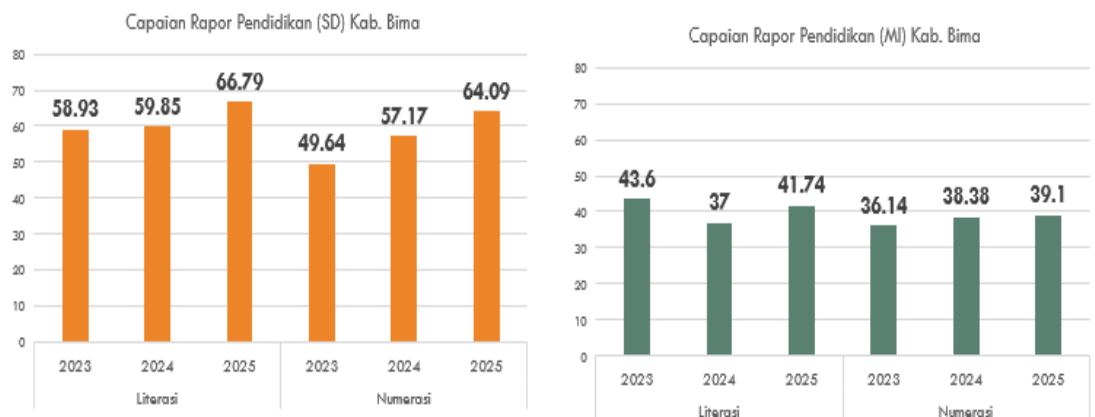
Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bima Tahun 2026 juga memperhatikan isu-isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah, diantaranya upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bima, Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan, Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan Fasilitas sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's), Peningkatan kualitas Lembaga Pendidikan, Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Peserta Didik. Selain itu, masih terdapat permasalahan-permasalahan pada bidang pendidikan yang perlu penanganan lebih intensif. Permasalahan yang juga merupakan permasalahan nasional, sehingga apabila permasalahan yang masih dijumpai di Kabupaten Bima bisa teratasi maka akan mereduksi permasalahan secara nasional. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, diantaranya :

d. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

7. Pada Periode sebelumnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 5-6 tahun sudah mencapai angka 86,23%, namun demikian dilihat dari data tersebut maka masih ada sekitar 13,77% penduduk usia 5 - 6 tahun yang masih belum tertampung pada lembaga pendidikan PAUD . Selain itu upaya pemerintah untuk menambah lama program wajib menjadi 13 tahun dimulai dari TK B- Kelas III SMA menjadikan program pendidikan anak usia dini jenjang TK wajib di akses oleh semua penduduk usia 5-6 tahun.

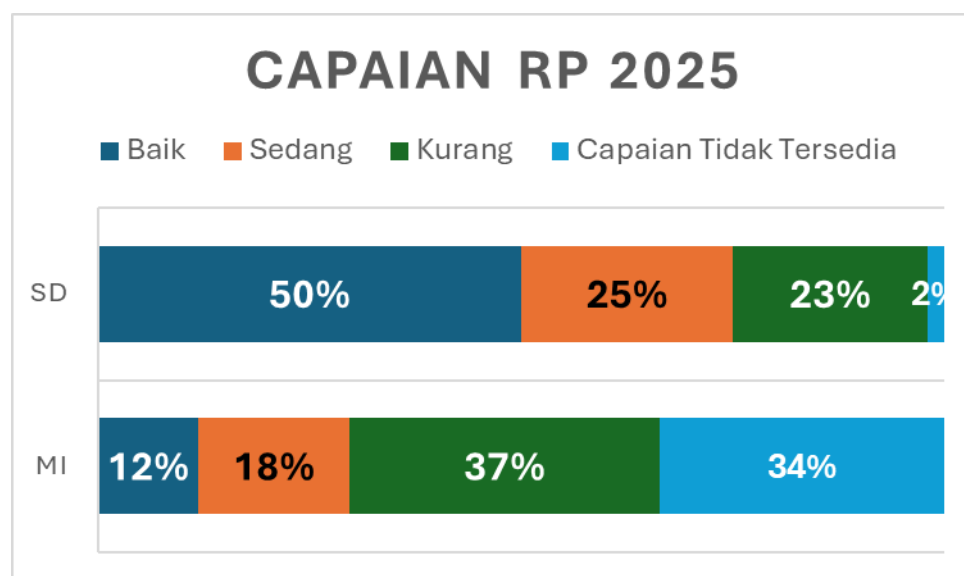
8. Sebagian besar sarana prasarana pendidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan lembaga PAUD tidak diiringi dengan kesadaran untuk menyediakan sarana prasarana pendidikan PAUD yang memadai. Pengelola PAUD hanya mengandalkan bantuan sarana prasarana pendidikan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 9. Sebagian besar pendidik PAUD belum berkualifikasi S1/D4 pendidikan guru PAUD. Sementara menurut standar nasional pendidikan seharusnya guru yang mengajar di Lembaga PAUD formal maupun non formal memiliki kualifikasi S1 Pendidikan Guru PAUD/S1 Psikologi/ S1 Pendidikan. Masih minimnya lulusan S1/D4 Pendidikan Guru PAUD menyebabkan sebagian besar guru PAUD merupakan sarjana pendidikan Non Guru PAUD bahkan masih ada yang hanya tamatan SMA.
 10. Kualitas program pendidikan anak usia dini masih rendah, program pembangunan pendidikan anak usia dini masih sebatas pada penyediaan akses dan layanan pendidikan, belum menyentuh pada kualitas proses belajar dalam pencapaian kurikulum. Salah satu permasalahan penting terkait kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 13 tahun adalah pengenalan literasi awal (pra membaca) bagi anak usia dini. Praktik pendidikan di jenjang usia dini belum menyentuh area tersebut
 11. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Keterlibatan orang tua yang belum seiring sejalan dengan lembaga PAUD. Dan kurangnya kerjasama lembaga PAUD dengan orang tua.
 12. Masih kurangnya regulasi tentang proses penyelenggaraan pendidikan PAUD.
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
- Beberapa permasalahan dalam Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagai berikut.
10. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs mencapai 97,42% dari penduduk usia 13 - 15 tahun sebanyak 36.240. Hal ini berarti masih terdapat sebanyak 2.58% atau 934 penduduk usia 13 – 15 belum menikmati pendidikan di SMP/MTs.

11. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mencapai 99,67% dari penduduk usia 7 - 12 tahun sebanyak 65.641. Hal ini berarti masih terdapat sebanyak 0,33% atau 215 anak usia sekolah 7-12 tahun yang belum menikmati pendidikan di SD/MI.
12. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs mencapai 94,13% dari penduduk usia 13 - 15 tahun sebanyak 36.240. Hal ini berarti masih terdapat sebanyak 5,87% atau 2.127 anak usia sekolah 13-15 tahun yang belum berada pada satuan pendidikan di SMP/MTs di Kabupaten Bima atau bersekolah di luar Kabupaten Bima
13. Masih terdapat anak putus sekolah. Data APS SD yang terdata di dapodik sebanyak 426 orang atau sekitar 0,35%, sementara jenjang SD sebesar 135 orang atau sebanyak 0,24% (Sumber Data Dapodik)
14. Capaian literasi peserta didik masih termasuk kategori sedang. Capaian Literasi siswa SD Kabupaten Bima Tahun 2025 sebesar 66,79% data ini menunjukkan bahwa sebanyak 66,79% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum numerasi, ini artinya masih terdapat 33,21% peserta didik memiliki capaian literasi yang masih kurang. Hal yang sama terjadi pada satuan pendidikan SMP, Capaian kemampuan literasi SMP Tahun 2025 sebesar 46,43% artinya masih terdapat 53, 57% peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi.
15. Capaian Numerasi peserta didik masih termasuk kategori sedang. Capaian Literasi siswa SD Kabupaten Bima Tahun 2025 sebesar 64,09%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebanyak 64,09% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum numerasi, ini artinya masih terdapat 35,91% peserta didik memiliki capaian literasi yang masih kurang. Hal yang sama terjadi pada satuan pendidikan SMP, capaian Numerasi siswa SMP Tahun 2025 sebesar 48,25% ini artinya masih terdapat 51,75% peserta didik SMP belum mencapai kompetensi minimum numerasi
16. capaian literasi dan numerasi siswa yang masih belum merata.



Gambar 2.3. Capaian Literasi dan Numerasi Siswa SD dan MI

Pada tahun 2024, prosentase siswa SD yang mencapai kecakapan minimum literasi sebesar 59,85, sedangkan kecakapan numerasi sebesar 57,17. Prosentase tersebut meningkat menjadi 66,79 untuk kecakapan literasi dan 64,09 untuk kecakapan numerasi. Pada sisi lain, pada tahun 2024, jumlah siswa MI yang mencapai kecakapan minimum literasi sebesar 37% dan numerasi sebesar 38,38%. Prosentase tersebut meningkat pada tahun 2025 menjadi 41,74% untuk kecakapan numerasi dan 39,1% untuk kecakapan literasi. Walaupun terjadi peningkatan, jumlah sekolah/madrasah yang berkategori sedang dan kurang masih cukup banyak (lihat gambar 2.4 di bawah ini).



Gambar 2.4. Capaian Rapor Pendidikan Sekolah dan Madrasah

Grafik di atas menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan kualitas layanan pendidikan antar sekolah dan madrasah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persoalan literasi dan numerasi masih perlu menjadi fokus perhatian ke depannya agar kesenjangan kualitas layanan pendidikan bisa dikurangi dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata bagi seluruh anak.

17. Pendidikan karakter yang belum menjadi fokus program sekolah dan pembelajaran. Hasil eksplorasi sekolah yang dicita-citakan mengindikasikan pentingnya peran sekolah dalam mengembangkan karakter siswa. Para pemangku kepentingan pendidikan mengungkapkan harapannya agar sekolah berperan dalam mengurangi perilaku bullying dan premanisme. Sekolah diharapkan bisa menciptakan iklim yang aman dari kekerasan dan pelecehan seksual. Karena itu, sekolah perlu menciptakan suasana belajar yang di dalamnya pendidikan karakter menjadi prioritas.
 18. Sarana Prasarana Pendidikan yang mendukung transformasi proses pembelajaran modern belum tersedia. Masih terdapat ruang kelas SD dan SMP yang rusak sedang/berat, yaitu : Ruang kelas SD sebanyak 354 ruang , Ruang kelas SMP sebanyak 154 ruang.
 19. Peran serta orang tua dalam mendukung proses pembelajaran masih kurang. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya kemampuan kepala sekolah dan guru dalam menjalin kerja sama yang baik dengan orang tua murid.
 20. Perubahan regulasi pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat yang terlalu sering menyebabkan pelaksanaan regulasi tersebut tidak berjalan lancar.
- f. Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Permasalahan di Bidang Pembinaan Ketenagaan masih terkait dengan dengan masih rendahnya kompetensi guru yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut
7. Permasalahan rendahnya kapasitas guru ditandai oleh masih rendahnya capaian proporsi PTK bersertifikat. Data Raport Pendidikan Tahun 2025 menunjukkan PTK Bersertifikat masih kategori rendah, Jumlah guru sertifikasi di Kabupaten Bima sebesar 3917 orang jika dibandingkan dengan jumlah guru ASN (PNS dan PPPK) sebanyak 6301 maka prosentasi capaiannya sebesar 62,16%. Artinya masih terdapat 37,84% PTK belum bersertifikat. Rendahnya capaian PTK bersertifikat akan berpengaruh pada capaian literasi dan numerasi siswa.
 8. Kemampuan manajemen/kompetensi kepala satuan pendidikan masih rendah. Capaian indikator Kepemimpinan instruksional yang dinilai dari indikator pelaksanaan visi misi satuan pendidikan, pengelolaan kurikulum dan dukungan untuk refleksi guru menunjukkan bahwa masih terdapat kepala sekolah yang belum memiliki

kecakapan manajemen yang baik, terutama dalam aspek IT dan manajemen.

9. Kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan memanfaatkan teknologi informasi pada proses pembelajaran masih kurang/terbatas.

10. Kemampuan guru untuk mengikuti paradigma baru dalam pendidikan dan pembelajaran masih lamban

d. Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga

1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan masih rendah, data Rapor Pendidikan 2025 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan hanya sebesar 31,57%. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk usia 7-18 Tahun yang belum berpartisipasi pada satuan pendidikan kesetaraan.

2. Kapasitas manajemen kelembagaan pendidikan Non Formal (tata kelola) masih belum baik.

5. Kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga masih rendah.

6. Jumlah Atlet Kabupaten Bima yang masuk pada Pelatda Propinsi masih kurang.

7. Ketersediaan Sarana prasarana keolahragaan masih minim;

8. Prestasi kepemudaan dan keolahragaan masih minim

e. Kebudayaan

1. Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB)/aObyek Pemajuan Kebudayaan belum terinventarisir dengan baik

2. Cagar budaya, situs dan warisan budaya tak benda tidak terpelihara dengan baik.

2. Jumlah kunjungan ke museum ASI Mbojo masih rendah

3. Seni dan budaya tradisional semakin pudar karena modernisasi

4. Minat generasi muda terhadap pengembangan seni dan budaya Bima semakin berkurang

5. Jumlah tenaga kebudayaan yang tersertifikasi masih sangat sedikit dan belum terinventarisir.

f. Penguatan Tata kelola, Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Pendidikan

1. Kurangnya sarana penunjang pelayanan tingkat SKPD

2. Kurang profesionalnya sumber daya aparatur

- 3. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan
- 4. Sekolah belum menerapkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah MBS dengan baik.
- 5. Belum Optimalnya peran dewan pendidikan

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Bima dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima Tahun 2025-2029, maka tujuan dan sasaran dari rencana kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima Tahun 2026 diuraikan sebagaimana Tabel 3.1.

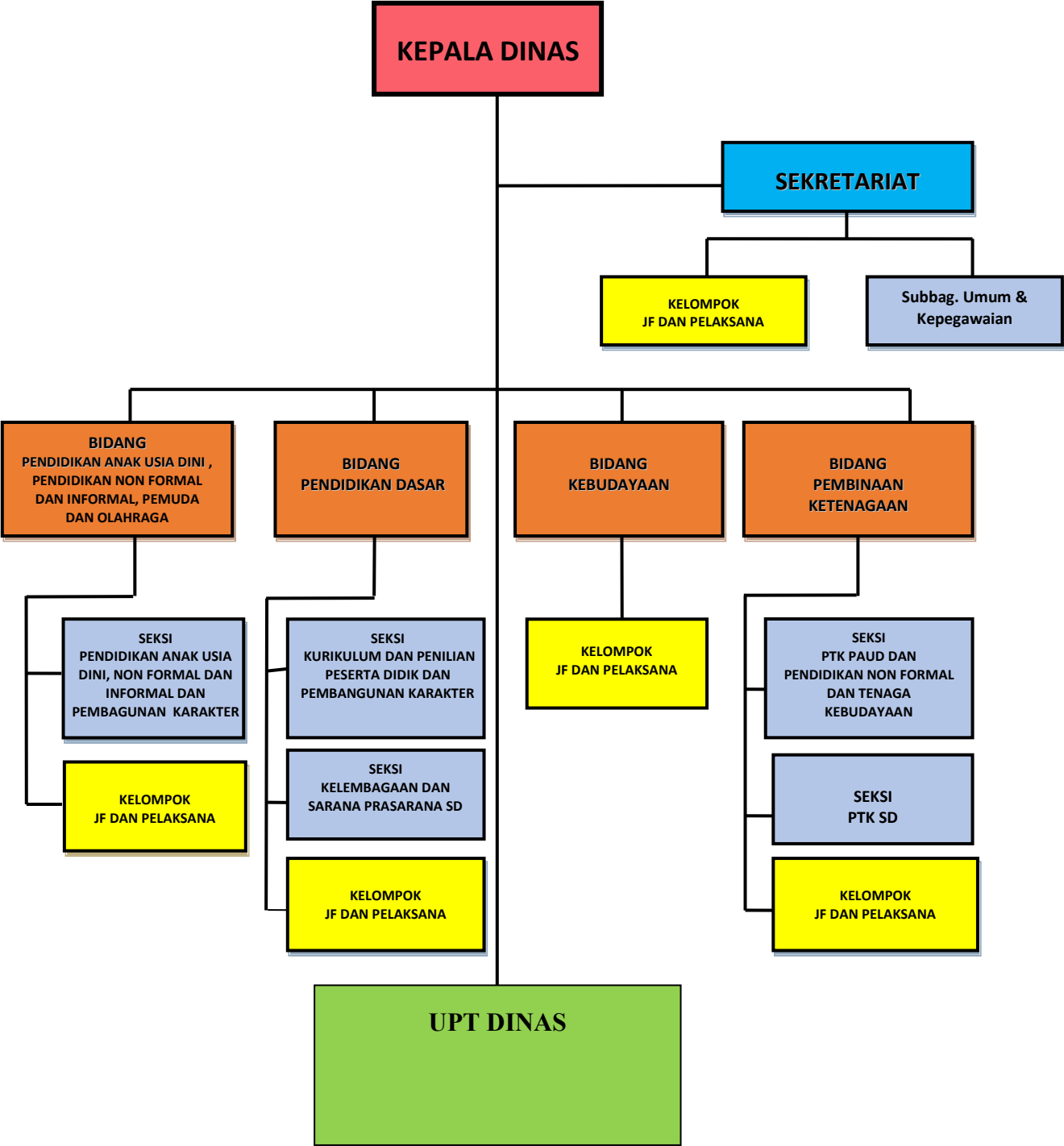
TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS DIKBUDPORA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	KET
				2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(07)	(12)
1.01.2.19.2.22.05.0000 - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga					
- Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Meningkatkan kualitas pendidikan, pemajuan kebudayaan serta prestasi pemuda dan olahraga		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,70	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,19	
			Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	61,77	
			Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	57,86	
			Indeks Pembangunan Pemuda (Indeks)	55,00	
			Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	57,60	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	40,00	
			Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	57,09	
			Indeks Pembangunan Olahraga (Indeks)	0,23	
		Meningkatnya tata kelola satuan pendidikan berkualitas dan meningkatnya partisipasi penduduk untuk bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi	Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi (%)	53,53	
			Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (%)	44,76	

			Persentase satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi (%)	20,64	
			Persentase warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan (APS) (%)	87,23	
			Persentase satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (%)	13,75	
			Persentase Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) (%)	100,00	
			Persentase Warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) (%)	40,86	
		Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Persentase jumlah warisan budaya dilestarikan (%)	65,00	
		Meningkatnya kunjungan masyarakat ke pusat seni dan pusat sejarah	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah (%)	16,00	
		Meningkatnya pemuda berwirausaha dan berprestasi	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	1,02	
			Persentase peningkatan pemuda berprestasi (%)	0,50	
		Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga (%)	88,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Nilai)	74,82	

Untuk mencapai target kinerja serta melaksanakan tugas pembangunan pendidikan di Kabupaten Bima agar seluruh permasalahan dapat diatasi dan tantangan kedepan dapat dihadapi dengan baik, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dituntut untuk bisa berkerja keras, bekerja cerdas dan bekerja amanah. Untuk itu, dibentuk struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima yang seluruh komponennya diharapkan mampu melaksanakan pembangunan pendidikan. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana Gambar 3.1.berikut ini.

Gambar 3.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Dikpora Pemerintah Kabupaten Bima



12.3 Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bima, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima memikul tugas dan tanggungjawab yang

besar. Untuk itu, program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima juga bersumber dari usulan dari para pemangku kepentingan, yang disampaikan melalui forum Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan, Forum SKPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten. Usulan kegiatan juga disampaikan melalui Anggota Legislatif pada saat melakukan reses dan kembali ke daerah pemilihannya. Selain itu, usulan juga bisa disampaikan langsung, baik dari masyarakat maupun Satuan Pendidikan melalui Kepala Sekolahnya langsung ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi dalam bentuk program kerja dalam pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran terinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Penjabaran program kerja harus memiliki tingkat perincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diuraikan dalam kegiatan. Program kerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bukanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas pokok dan fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Pengelolaan Pendidikan

a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah
- 4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 5) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Penjaga Sekolah
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah
- 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 10) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas, Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 11) Pengadaan Praktik dan Peraga Siswa
- 12) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
- 13) Penyiapan dan Tindak lanjut Satuan Pendidikan Dasar
- 14) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa
- 15) Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 17) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1) Penambahan Ruang Kelas Baru
- 2) Pembangunan Ruang Laboratorium
- 3) Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 7) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
- 8) Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 9) Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreativitas Siswa
- 10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- 11) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 12) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 13) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- 1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 2) Pengadaan Alat Praktik dan Alat Peraga Siswa PAUD
- 3) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- 4) Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan PAUD
- 5) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- 6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 7) Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 8) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

d. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

- 1) Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan
- 2) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan

Pendidikan Non Formal
3) Pengelolaan Dana BOP Non Formal dan Kesetaraan

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - 1) Perhitungan dan Pemetaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - 2) Penataan/Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
 - 3) Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten
 - 5) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

5. Program Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten
- b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah
 - 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olimpiade Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten
 - 2) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
 - 3) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah
 - 1) Seleksi Atlet Daerah
 - 2) Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

6. Program Pengembangan Kebudayaan

- a. Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya Dalam Daerah Kabupaten
 - 1) Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
 - 2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

7. Program Pembinaan Sejarah

- a. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
 - 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten
 - 2) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap data dan Informasi Sejarah

8. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

- a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
 - 1) Penetapan Cagar Budaya
- b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
 - 1) Pengembangan Cagar Budaya
 - 2) Pemanfaatan Cagar Budaya

9. Program Pengelolaan Permuseuman

- a. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten
 - 1) Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
 - 2) Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
 - 3) Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
 - 4) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
 - 5) Revitalisasi Sarana Prasarana Museum

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		KETERANGAN
		2026		
		TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(04)	(05)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			788.136.329.000,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			631.537.563.000,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olaharaga	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olaharaga (%)	98,92	631.537.563.000,00	
	Persentase kinerja pelayanan internal Dinas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olaharaga (%)	85,37		
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olaharaga (%)	98,65		
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			231.200.000,00	

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	231.200.000,00	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			160.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	160.000.000,00	
1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			30.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	30.000.000,00	
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.200.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	41.200.000,00	
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			629.813.215.000,00	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.527	629.813.215.000,00	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			629.733.215.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.527	629.733.215.000,00	
1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			40.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	40.000.000,00	
1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			40.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	40.000.000,00	
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.000.000,00	
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	100.000.000,00	
1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	100.000.000,00	
1.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0	
-			0	
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			176.768.000,00	
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	176.768.000,00	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5		
1.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			42.300.000,00	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	42.300.000,00	
1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi			26.700.000,00	

Kepegawaian				
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	26.700.000,00	
1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			42.768.000,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5	42.768.000,00	
1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			65.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	65.000.000,00	
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			548.500.000,00	
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	548.500.000,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			35.500.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	35.500.000,00	
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			180.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	180.000.000,00	
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			75.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	75.000.000,00	
1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			38.000.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	38.000.000,00	
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			220.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	220.000.000,00	
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			567.880.000,00	
Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	567.880.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	20.000.000,00	
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			185.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	185.000.000,00	
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			362.880.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	362.880.000,00	
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	
Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	100.000.000,00	

1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	100.000.000,00	
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			155.066.383.000,00	
Meningkatnya kualitas dan terciptanya iklim satuan pendidikan yang kondusif	Persentase jamban dalam kondisi baik (%)	48,39	155.066.383.000,00	
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	65,55		
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	69,78		
	Persentase guru pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/DIV (%)	98,69		
	Persentase guru pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/DIV (%)	99,32		
	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik (%)	73,53		
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang terakreditasi Minimal B (%)	35,36		
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang terakreditasi Minimal B (%)	83,80		
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi Minimal B (%)	82,64		
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	68,10		
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	76,99		
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	59,76		
	Persentase guru pada Satuan Pendidikan PAUD Formal yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/DIV (%)	64,96		
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	72,88		
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			83.914.753.000,00	
angka partisipasi sekolah usia 7-12	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	2	83.914.753.000,00	
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	432		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	60		
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	3		
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	81		
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5		
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	6		
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1		
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	150		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	900		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	500		

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100		
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	432		
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	5		
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	5.000		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	20		
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	432		
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	432		
1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			1.000.000.000,00	
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			500.000.000,00	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	500.000.000,00	
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah			1.000.000.000,00	
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			9.600.000.000,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	60	9.600.000.000,00	
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.000.000.000,00	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	6	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			1.000.000.000,00	
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			200.000.000,00	
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2	200.000.000,00	
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah			1.000.000.000,00	
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	2	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			250.000.000,00	
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100	250.000.000,00	
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			5.502.400.000,00	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	900	5.502.400.000,00	
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			1.000.000.000,00	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	500	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			150.000.000,00	

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	432	150.000.000,00	
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			46.042.353.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	432	46.042.353.000,00	
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			125.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	432	125.000.000,00	
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			350.000.000,00	
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	3	350.000.000,00	
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			200.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100	200.000.000,00	
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			20.000.000,00	
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2	20.000.000,00	
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			100.000.000,00	
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	5	100.000.000,00	
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			200.000.000,00	
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	5.000	200.000.000,00	
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru			1.500.000.000,00	
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5	1.500.000.000,00	
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.000.000.000,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	20	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			125.000.000,00	
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	432	125.000.000,00	
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			10.450.000.000,00	
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	81	10.450.000.000,00	
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			100.000.000,00	
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	150	100.000.000,00	
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.500.000.000,00	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1.500.000.000,00	
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			42.796.587.000,00	
angka partisipasi sekolah usia 13-15	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	100	42.796.587.000,00	
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	20.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	10		
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		

	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	75		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	500		
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100		
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	432		
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	3		
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5		
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	20		
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1		
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	25		
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	133		
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	133		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	133		
1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			2.000.000.000,00	
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	2.000.000.000,00	
1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			700.000.000,00	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	3	700.000.000,00	
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.290.000.000,00	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7	1.290.000.000,00	
1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah			300.000.000,00	
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	300.000.000,00	
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium			350.000.000,00	
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1	350.000.000,00	
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			843.808.000,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5	843.808.000,00	
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2.000.000.000,00	

Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	20	2.000.000.000,00	
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			1.700.000.000,00	
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10	1.700.000.000,00	
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			1.000.000.000,00	
Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.540.000.000,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	25	2.540.000.000,00	
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah			1.000.000.000,00	
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah			200.000.000,00	
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	200.000.000,00	
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			250.000.000,00	
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100	250.000.000,00	
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			200.000.000,00	
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100	200.000.000,00	
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			2.220.000.000,00	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	100	2.220.000.000,00	
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			700.000.000,00	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	500	700.000.000,00	
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			300.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	133	300.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			21.492.779.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	133	21.492.779.000,00	
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			100.000.000,00	
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	133	100.000.000,00	
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			100.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	75	100.000.000,00	
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			60.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	60.000.000,00	
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			50.000.000,00	
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	10	50.000.000,00	
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			100.000.000,00	
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	432	100.000.000,00	

1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru			1.500.000.000,00	
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5	1.500.000.000,00	
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			100.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100	100.000.000,00	
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			200.000.000,00	
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	20.000	200.000.000,00	
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			500.000.000,00	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	500.000.000,00	
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.000.000.000,00	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			24.130.043.000,00	
angka partisipasi sekolah usia 3-6	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	700	24.130.043.000,00	
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	350		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	100		
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	700		
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	500		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1		
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	100		
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	5		
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5		
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	10		
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.000.000.000,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	5	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			1.100.000.000,00	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	350	1.100.000.000,00	
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			200.000.000,00	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	100	200.000.000,00	
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			230.315.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	500	230.315.000,00	

1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD			16.000.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	700	16.000.000.000,00	
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			50.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	100	50.000.000,00	
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			50.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	50.000.000,00	
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru			1.000.000.000,00	
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			0,00	
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	0,00	
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			200.000.000,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4	200.000.000,00	
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			3.349.728.000,00	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1	3.349.728.000,00	
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			250.000.000,00	
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	700	250.000.000,00	
1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			500.000.000,00	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	10	500.000.000,00	
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			200.000.000,00	
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	200.000.000,00	
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4.225.000.000,00	
Jumlah Warga Belajar Aktif	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	50	4.225.000.000,00	
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	52		
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	52		
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	52		
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			50.000.000,00	
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	50	50.000.000,00	
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			125.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	52	125.000.000,00	
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			4.000.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	52	4.000.000.000,00	
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			50.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	52	50.000.000,00	

1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			100.000.000,00	
Meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan muatan lokal daerah (%)	70,82	100.000.000,00	
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			100.000.000,00	
Porsentase penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	10	100.000.000,00	
	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	50		
1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			50.000.000,00	
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	50	50.000.000,00	
1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			50.000.000,00	
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	10	50.000.000,00	
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			182.200.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan secara merata	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (%)	85,00	182.200.000,00	
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (%)	91,00		
	Persentase guru pada Satuan Pendidikan PAUD yang memiliki sertifikat pendidik (%)	40,65		
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (%)	85,00		
	Persentase guru pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sertifikat pendidik (%)	68,94		
	Persentase guru pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki sertifikat pendidik (%)	79,48		
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			182.200.000,00	
Porsentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1	182.200.000,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1		
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			82.200.000,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1	82.200.000,00	
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			100.000.000,00	
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	100.000.000,00	
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			250.183.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	22,30	250.183.000,00	

1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			100.000.000,00	
Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan dasar	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	53	100.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	53		
1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			50.000.000,00	
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	53	50.000.000,00	
1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			50.000.000,00	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	53	50.000.000,00	
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			150.183.000,00	
Peningkatan kualitas dan distribusi institusi pendidikan (PAUD)	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	725	150.183.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	725		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	725		
1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			50.000.000,00	
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	725	50.000.000,00	
1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			50.000.000,00	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	725	50.000.000,00	
1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			50.183.000,00	
Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	725	50.183.000,00	
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			1.000.000.000,00	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	30	1.000.000.000,00	
1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000.000,00	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota (Buku)	2	1.000.000.000,00	
	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang)	10		
	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)	6		

1.01.06.2.01.0004 - Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000,00	
Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Penghargaan	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang)	10	200.000.000,00	
1.01.06.2.01.0007 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota			600.000.000,00	
Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)	6	600.000.000,00	
1.01.06.2.01.0009 - Penyusunan Kamus Bahasa Daerah			200.000.000,00	
Tersusunnya kamus bahasa daerah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota (Buku)	2	200.000.000,00	
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			1.469.984.000,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			500.000.000,00	
Meningkatnya Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	7,50	500.000.000,00	
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			400.000.000,00	
Terlaksananya pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	2	400.000.000,00	
	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	3		
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	75		
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	10		
2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota			100.000.000,00	
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	2	100.000.000,00	
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			100.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	10	100.000.000,00	
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			100.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	3	100.000.000,00	
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			100.000.000,00	

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	75	100.000.000,00	
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	10	100.000.000,00	
	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	50		
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			50.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	10	50.000.000,00	
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota			50.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	50	50.000.000,00	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			919.984.000,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet Yang Berasal dari Kab/Kota Yang Masuk Palatda Provinsi (Persentase)	24,86	919.984.000,00	
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			499.984.000,00	
Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	3	499.984.000,00	
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			499.984.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	3	499.984.000,00	
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000,00	
Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	3	300.000.000,00	
	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	100		
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			173.000.000,00	
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	3	173.000.000,00	
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			127.000.000,00	
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	100	127.000.000,00	
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			70.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)		70.000.000,00	
	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	50		
	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	50		

2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah			20.000.000,00	
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	50	20.000.000,00	
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			50.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	50	50.000.000,00	
2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota			0,00	
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)		0,00	
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			50.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	10	50.000.000,00	
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional			50.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	10	50.000.000,00	
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			50.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	65	50.000.000,00	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			50.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	50.000.000,00	
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			50.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	50.000.000,00	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.175.000.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			425.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Indeks)	20,00	425.000.000,00	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			225.000.000,00	
Terwujudnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	50	225.000.000,00	
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	12		
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			175.000.000,00	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	12	175.000.000,00	
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			50.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	50	50.000.000,00	
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00	
Terwujudnya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	5	100.000.000,00	
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			100.000.000,00	

Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	5	100.000.000,00	
2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00	
Terwujudnya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	10	100.000.000,00	
2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			100.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	10	100.000.000,00	
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			250.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	67	250.000.000,00	
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	30	250.000.000,00	
	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	10		
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			175.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	30	175.000.000,00	
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			75.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	10	75.000.000,00	
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			200.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	15,00	200.000.000,00	
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	40	200.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2		
2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			100.000.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	40	100.000.000,00	
2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			100.000.000,00	
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2	100.000.000,00	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			850.000.000,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Jumlah Cagar budaya yang dilestarikan (%)	65,00	850.000.000,00	
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			50.000.000,00	
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	12	50.000.000,00	
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya			50.000.000,00	
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	12	50.000.000,00	
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			800.000.000,00	

Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	5	800.000.000,00	
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	10		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	43		
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya			700.000.000,00	
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	5	700.000.000,00	
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya			50.000.000,00	
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	10	50.000.000,00	
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya			50.000.000,00	
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	43	50.000.000,00	
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			450.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	15,56	450.000.000,00	
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			450.000.000,00	
Terwujudnya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	450.000.000,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	1		
	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	1		
2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			290.000.000,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	1	290.000.000,00	
2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			40.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	40.000.000,00	
2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			120.000.000,00	
Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	1	120.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima yang berisi prioritas program kegiatan sebagai penjabaran Renstra dapat lebih terkoordinasi, terakomodir, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Renja Dinas Dikbudpora ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun 2026

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

- a. Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan yang berkualitas seiring dengan tuntutan perbaikan sarana prasarana pendidikan yang layak, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas serta pemerataan akses pendidikan yang berkualitas yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang bermutu pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- b. Isu peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga di tengah minimnya sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- c. Upaya pemerintah untuk mengembangkan kebudayaan sebagai landasan pembangunan sumber daya manusia yang memberikan perhatian khusus pada agenda pengarusutamaan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi juga memajukannya dengan cara menghidupkan interaksi antarbudaya, menyejahterakan dan mendamaikan.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

- a. Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis Dinas Dikbudpora Kab. Bima Tahun 2025-2029.
- b. Meningkatkan upaya-upaya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan nilai literasi, numerasi serta peningkatan angka partisipasi sekolah jenjang PAUD dan Dasar

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan nilai raport pendidikan khususnya peningkatan nilai literasi dan siswa serta peningkatan angka partisipasi sekolah jenjang PAUD dan Dasar.

Bima, Pebruari 2025
Kepala Dinas,

Zunaidin,S.Sos,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231198803117



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026



**BADAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BIMA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Hasil Yang Diharapkan	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
2.6 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan.....	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	43
3.1 Tujuan dan Sasaran Strategi RPJMD	43
3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	44
BAB IV PENUTUP	79

Tabel 2.1	Tabel Capaian Kinerja Tahun Lalu	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Tahun 2022	15
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD BPKAD	23
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	29
Tabel 3.1	Pemetaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	42
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	49

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya sehingga Renja 2026 BPKAD Kabupaten Bima dapat tersusun, sesuai dengan waktunya. RENJA Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penerjemah visi dan misi kepala daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029.

Dokumen Renja memuat kebijakan dan program/kegiatan prioritas dalam satu tahun yang dapat dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima Renja ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bima yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Badan menuju good governance. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan public.

Dengan tersusunnya dokumen Renja tahun 2026 ini BPKAD Kabupaten Bima dapat mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD sehingga menjadi acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Akhirnya semoga Renja ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Bima, Februari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BIMA,



ARIES MUNANDAR, ST., MT

NIP. 19720607 2000031 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang – undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan program dan kegiatan untuk periode satu tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan.

Renja disusun untuk menterjemahkan dan mendukung pencapaian perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara substansi, Renja SKPD memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, dan sumber dana yang dibutuhkan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam bidang perencanaan pembangunan disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah.

Dokumen Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah, dan sehingga dapat mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran dan target pembangunan daerah (RKPD) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.

Rencana Kerja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yaitu sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang menerjemahkan visi, misi dan program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan diselaraskan dengan kebijakan dan strategis pembangunan pemerintah daerah sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berjalan.
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah digunakan untuk mengetahui sejauh mana capaian program dan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan terhadap Daerah.
4. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran Rencana Strategis dimasing-masing Perangkat Daerah.
5. BPKAD Kabupaten Bima menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan yang akan menjadi acuan usulan program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Penyusunan Renja dilakukan secara simultan/parallel yang perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala

prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Mengingat pentingnya arti dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD/SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri yang tersebut diatas Dokumen Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

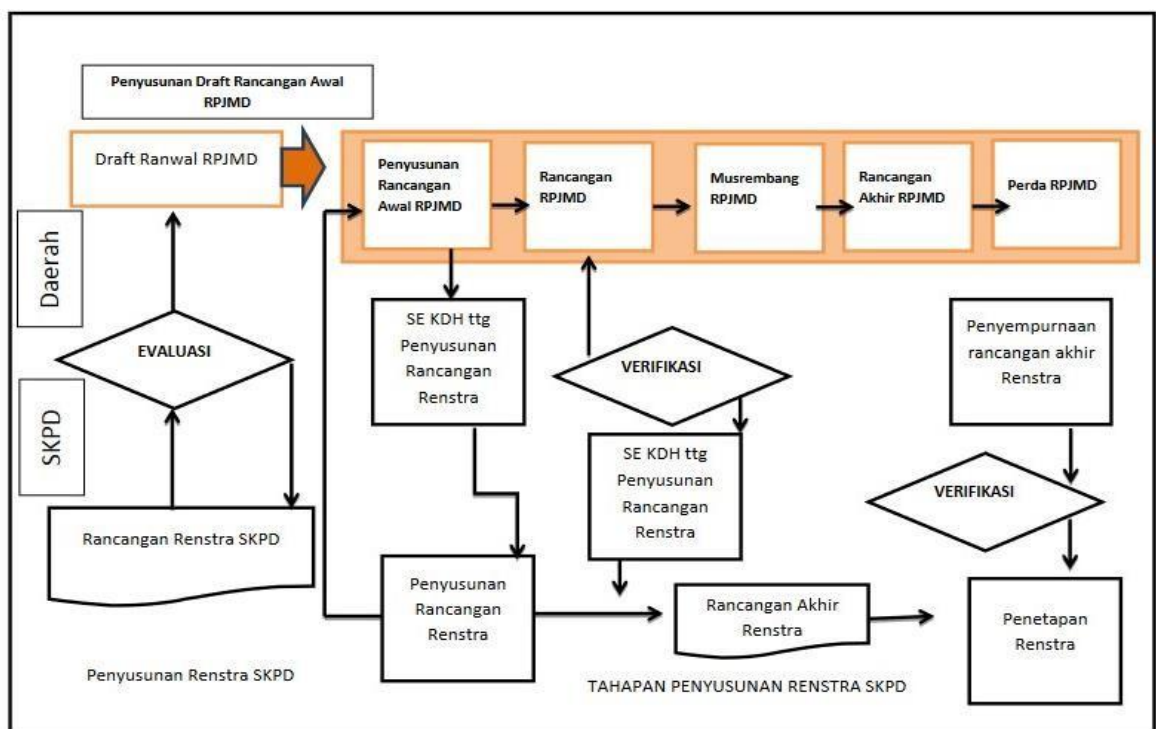
1. penyusunan, meliputi:
 - a. Persiapan Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD
3. Penyusunan rancangan awal Ranwal Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan, Ranwal Renja mencakup analisis gambaran pelayanan dan hasil evaluasi Renja tahun lalu.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan Perkada tentang RKPD
6. Penetapan.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

Gambar

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota



1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima.

10. Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bima.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Bima adalah :

- a. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026
- b. Sebagai perencanaan program dan kegiatan yang akan disusun kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026
- c. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
- d. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan untuk Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- e. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- f. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya antara lain :

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan menjadi usulan OPD ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- b. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026
- c. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- d. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026;

- e. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026.

1.4. HASIL YANG DIHARAPKAN

Rencana Kerja (BPKAD) dapat mendukung tugas pokok dan fungsi yang akan ditindaklanjuti dalam RKA BPKAD untuk Tahun Anggaran 2026 dan menjadi acuan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD tahun 2021-2026.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

menguraikan latar belakang penulisan, maksud dan tujuan, dasar hukum, hasil yang diharapkan dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

menguraikan tentang evaluasi rencana kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun berjalan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima

Bab IV Penutup

menguraikan kesimpulan-kesimpulan materi pokok dalam penjabaran Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD adalah sebagai fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPKAD dalam melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset, serta pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah, Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Renja (BPKAD) Kabupaten Bima melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2024 yang ditujukan untuk :

- 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,;
- 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- 4) Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
- 5) Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

- 6) Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan dan Mengidentifikasi permasalahan

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 Berdasarkan rumusan dan kategorisasi pencapaian kinerja organisasi secara obyektif, transparan dan akuntabel yang telah ditetapkan dalam RENSTRA maupun RPJMD Tahun 2021-2026 Capaian Realisasi atas indikator kinerja yang diperoleh pada tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	-	%

Dalam mewujudkan sasaran strategis diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjalankan 2 Program dengan 4 Indikator Program. Keempat indikator program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan

Pada indikator program ini, hasil yang ingin dicapai yaitu laporan keuangan pemerintah daerah dapat disusun sesuai dengan ketentuan. Untuk mewujudkannya maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dan belanja daerah secara periodik per triwulan dengan Perangkat Daerah baik kepada Perangkat Daerah pengelola belanja daerah maupun terhadap Perangkat Daerah penghasil;
- b) Menyusun laporan keuangan secara periodik berdasarkan realisasi per triwulan laporan;
- c) Menyusun laporan keuangan secara periodik berdasarkan realisasi per triwulan laporan;
- d) Melaksanakan workshop penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP secara periodik per triwulan;
- e) Peningkatan akurasi penyusunan laporan keuangan daerah berdasarkan sistem akrual berbasis aplikasi untuk seluruh Perangkat Daerah secara online;
- f) Meningkatkan intensitas pendampingan dengan perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

2) Tersusunnya Dokumen Raperda APBD Sesuai dengan Ketentuan

Pada indikator program ini, hasil yang ingin dicapai yaitu penandatanganan persetujuan raperda APBD secara tepat waktu.

Untuk mewujudkannya maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Menyusun standar belanja daerah untuk pedoman PPTK dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta bekerja sama dengan Bagian Pembangunan dalam rangka memperoleh hasil analisis Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Kabupaten Bima untuk belanja kegiatan tahun 2026;
- b) Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para PPTK serta PEP dari seluruh OPD dan para peneliti RKA/ DPA tahun 2026;
- c) Menyusun pedoman penyusunan RKA OPD dan PPKD;
- d) Melaksanakan penelaahan RKA/DPA setelah dilaksanakannya nota kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran Legislatif yang menjabarkan program dan kegiatan bagi setiap OPD;
- e) Melaksanakan pembahasan bersama dokumen Raperda APBD antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD;
- f) Melaksanakan pembahasan Raperda APBD dengan tim evaluasi Perda APBD Tahun 2025 dengan tim evaluator Provinsi NTB.

3) Tersusunnya Laporan Pengendalian Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Pada indikator program ini, hasil yang ingin dicapai yaitu seluruh OPD menyampaikan laporan GU dan TUP secara tepat waktu.

Untuk mewujudkannya maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Menyusun SPD masing-masing kegiatan dan OPD untuk mengendalikan jumlah ketersediaan anggaran dengan kebutuhan kegiatan
- b) Menyusun laporan data pajak;
- c) Meningkatkan sistem aplikasi perbendaharaan dalam rangka meningkatkan keakuratan pengendalian ketersediaan anggaran masing-masing kegiatan;
- d) Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai mekanisme pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah;
- e) Mengendalikan pengeluaran dengan melaksanakan pengadministrasian SP2D yang dikeluarkan sehingga SP2D menjadi instrumen yang digunakan dalam mengendalikan ketersediaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan belanja daerah;
- f) Bidang Perbendaharaan memberlakukan open office selama libur dan cuti bersama untuk memberikan peningkatan pelayanan dan kemudahan penerbitan SP2D sampai dengan akhir tahun anggaran.
- g) Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh OPD mengenai mekanisme pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah;

4) Tersusunnya Laporan Neraca Aset Sesuai dengan Ketentuan

Pada indikator program ini, hasil yang ingin dicapai yaitu seluruh OPD menyerahkan laporan neraca aset secara tepat waktu. Untuk mewujudkannya maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah, pemakaian kekayaan daerah, TGR, SOP pencatatan aset dan perubahan penggolongan & kodefikasi barang berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016;
- b) Workshop input data kedalam aplikasi SIAP BMD;
- c) Bimbingan teknis Implementasi peningkatan pengelolaan aset/BMD melalui sistem manajemen aset/barang daerah terintegrasi berbasis cloud;
- d) Pendampingan penyusunan laporan neraca aset Perangkat Daerah melalui sistem SIAP BMD
- e) Inventarisasi / sensus BMD bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur;
- f) Penghimpunan, pengolahan dan perekaman data dokumen aset daerah;
- g) Penyusunan dan validasi arsip dokumen aset;
- h) Pengamanan aset daerah melalui proses pendataan aset, identifikasi dan verifikasi yurisdiksi, pengukuran dan pemasangan papan nama aset;

Dibawah ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Tahun 2022 dan Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Tahun 2023 dan 2024
Kabupaten Bima

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)		TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024						
					SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TINGKAT REALISASI CAPAIAN (%)	
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
2	KEUANGAN										
2.1	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD		92,22			28,956,003,484		26.704.608.993		92,22
2.1.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penyelenggaraan Daerah	100	95,93	%	100	249,000,000	100	225.480.350	100	95,93
2.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	100	94,56	Dokumen	2	80,000,000	2	74.000.000	2	94,56
2.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA- SKPD	100	97,93	Dokumen	1	47,000,000	1	43.028.100	1	97,93
2.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	98,86	Dokumen	1	47,000,000	1	44.696.000	1	98,86
2.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Pencapaian Kinerja	100	94,46	Dokumen	3	75.000.000	3	62.166.000	3	94,46

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)		TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024						
					SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TINGKAT REALISASI CAPAIAN (%)	
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
2.1.2. 02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100	92,76	%	100	26,554,416,782	100	24.632.042.559	100	93,76
2.1.2. 02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	92,50		1	25,188,056,782	1	23.297.848.309		92,50
2.1.2. 02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas dan ASN	100	100,00	Tahun	1	1,074,360,000	1	1.074.360.000	1	100,00
2.1.2. 02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif dan melayani	100	98,81	Tahun	1	40,000,000	1	39.525.750	1	98,81
2.1.2. 02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tewujudnya Penatausahaan Keuangan yang Akuntabel	100	90,68	Tahun	1	35,000,000	1	31.737.500	1	90,68
2.1.2. 02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	68,09	Dokumen	12	75,000,000	12	51.070.000	12	68,09
2.1.2. 02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	100	95,43	Dokumen	12	94,000,000	12	89.701.000	12	95,43
2.1.2. 02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	99,58	Dokumen	12	48,000,000	12	47.800.000	12	99,58
2.1.2.	Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Optimalisasi Penataan	100	88,78			161,202,000		143.109.650		88,78

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)		TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024						
					SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TINGKAT REALISASI CAPAIAN (%)	
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
02	pada Perangkat Daerah	Administrasi Penunjang Operasional Perkantoran		83,00							
2.1.2. 02.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang SKPD		86,32			43,267,000		35.910.900		83,00
2.1.2. 02.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunya Laporan BMD SKPD yang baik		99,81			38,310,000		33.068.650		86,32
2.1.2. 02.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD SKPD yang tertib administrasi		86,41			39,750,000		39.675.200		99,81
2.1.2. 02.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Optimalnya pemanfaatan Barang SKPD		83,41			39,875,000		34.454.900		86,41
2.1.2. 05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertipnya Penataan Data dan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	83,54	%	100	878,064,702	100	732.424.580	100	83,41
2.1.2. 05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang benar, akurat dan lengkap	100	82,28	%	100.	793,064,702	100	662.506.430	100.	83,54
2.1.2. 05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			82,23			45,000,000		37.027.150		82,28
2.1.2. 05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			85,95			40,000,000		32.891.000		82,23
2.1.2. 05	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	100	83,76	%	100	572,700,000	100	492.249.204	100	85,95

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)		TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024						
					SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TINGKAT REALISASI CAPAIAN (%)	
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
2.1.2. 05.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	49,73	Tahun	1.00	15,000,000	1.00	7.460.000	1.00	49,73
2.1.2. 05.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	96,80	Tahun	1.00	93,000,000	1.00	90.020.000	1.00	96,80
2.1.2. 05.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100,00			15,000,000		15.000.000		100,00
2.1.2. 05.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	63,65	Tahun	1	17,000,000	1	10.820.350	1	63,65
2.1.2. 05.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100	91,11	Tahun	1	25,000,000	1	22.778.300	1	91,11
2.1.2. 05.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	86,36	Tahun	1	327.615.400,00	1	282.999.254	1	86,36
2.1.2. 05.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penataan Dokumen dan Arsip SKPD	100	80,05	Tahun	1	35.000.000	1	28.016.300	1	80,05
2.1.2. 05.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			78,12			45.000.000		35.155.000		78,12
2.1.2. 07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100	87,23	%	100	260.500.000	100	227.236.000	100	87,23
2.1.2. 07.5	Pengadaan Meubelair			98,98			28.000.000		27.714.000		98,98

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)		TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024						
					SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TINGKAT REALISASI CAPAIAN (%)	
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
2.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Penunjang Kegiatan Kantor	100	85,82	%	100	232.500.000	100	199.522.000	100	85,82
2.1.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penukung Kelancaran Administrasi Perkantoran	100	98,13	%	100	155.120.000	100	152.212.200	100	98,13
2.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat	100	98,64	Tahun	1	20.000.000	1	19.728.750	1	98,64
2.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Air, Listrik Dan Jasa Komunikasi Penunjang Kegiatan	100	98,05	Tahun	1	40,000,000	1	132.483.450	1	98,05
2.1.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100	72,70	%	100	144,000,000	100	104.689.750	100	72,70
2.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Surat-Surat Kelengkapan Kendaraan dan Terawatnya Kendaraan Dinas	100	80,17	Unit	1	50,000,000	1	40.085.000	1	80,17
2.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Surat-Surat Kelengkapan Kendaraan dan Terawatnya Kendaraan Dinas	100	88,17	Unit	22	40,000,000	22	35.268.750	22	88,17
2.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Barang-Barang Mebel SKPD	100	20,00	Tahun	1	10,000,000	1	2.000.000	1	20,00
2.1.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Terpelihara Peralatan dan Mesin	100	62,13	Tahun	1	44,000,000	1	27.336.000	1	62,13

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)		TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024						
					SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TINGKAT REALISASI CAPAIAN (%)	
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
09.6	Lainnya	Penunjang Kelancaran Kegiatan									
2	Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	100	97,60			3.968.886.000,00		4.353.403.759		97,60
2.2.02.01	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100	95,91	%	100	1,797,901,800	100	1.724.281.387	100	95,91
2.2.02.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunya Dokumen KUA dan PPAS	100	95,31	Dokumen	120	220,301,800	120	209.973.000	120	95,31
2.2.02.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100	94,50	Dokumen	120	169,600,000	120	160.267.000	120	94,50
2.2.02.01.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen Verifikasi DPA- SKPD	100	99,28	Dokumen	56	248,400,000	56	246.620.000	56	99,28
2.2.02.01.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya Dokumen Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	100	98,88	Dokumen	56	248,400,000	56	245.620.000	56	98,88
2.2.02.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Perda APBD dan Perbub Penjabaran APBD	100	96,65	Dokumen	135	352,325,000	135	340.530.372	135	96,65
2.2.02.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan Perbub Penjabaran Perubahan APBD	100	93,84	Dokumen	135	323,875,000	135	303.932.800	135	93,84

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)		TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024						
					SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TINGKAT REALISASI CAPAIAN (%)	
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
	Perubahan APBD										
2.2.02 .01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Perbub Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	100	92,48	Dokumen	4	235,000,000	4	217.338.215	4	92,48
2.2.02 .02	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100	98,71	%	100	1,041,500,000	100	1.028.098.569	100	98,71
2.2.02 .02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Tata Kelola Kas Daerah	100	99,49	Dokumen	100	256,000,000	100	254.699.054	100	99,49
2.2.02 .02.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100	99,84	Dokumen	200	226,925,000	200	226.556.058	200	99,84
2.2.02 .02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tercapainya Koordinasi Penyusunan Laporan Pengelolaan Dana Pertimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100	97,05	Dokumen	50	260,075,000	50	252.403.084	50	97,05
2.2.02 .02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersusunnya Laporan Kas dan Tertibnya Pelaksanaan Pemotongan serta Penyetoran (PFK)	100	98,97	Dokumen	50	180,000,000	50	178.140.373	50	98,97

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)		TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024						
					SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TINGKAT REALISASI CAPAIAN (%)	
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
2.2.02 .02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penatausahaan Keuangan Daerah	100	98,14	Dokumen	50	118,500,000	50	116.300.000	50	98,14
2.2.02 .03	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktual	100	99,25	%	100	1,061,497,850	100	1.053.488.803	100	99,25
2.2.02 .03.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan	100	98,52	Dokumen	12	157,946,200	12	155.614.200	12	98,52
2.2.02 .03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100	99,83	Dokumen	19	279,539,000	19	279.068.000	19	99,83
2.2.02 .03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	99,05	Dokumen	2	167,519,600	2	165.933.000	2	99,05
2.2.02 .03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perda dan Perbup Pelaksanaan APBD	100	99,55	Dokumen	90	271,908,200	90	270.677.200	90	99,55

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)		TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024						
					SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TINGKAT REALISASI CAPAIAN (%)	
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
2.2.02 .03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100	99,04	Dokumen	1	64,927,000		64.306.160	1	99,04
2.2.02 .03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDM Penyusun Laporan Keuangan SKPD		98,52	Orang	49	119,657,850		117.890.243	49	98,52
2.2.02 .05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi yang Berkualitas		97,86			559,500,000		547.535.000		97,86
2.2.02 .05.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi	100	97,86			559,500,000		547.535.000		97,86
2.3	Program : PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	100	98,94			2,233,337,950		2.209.593.561		98,94
2.3.2. 01	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100	98,94	%	100	2,233,337,950	100	2.209.593.561	100	98,94
2.3.2. 01.1	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Buku Standar Harga Barang	100		Buku	100		1		100	
2.3.2.	Penyusunan Standar Barang Milik			96,87			115,306,000		111.692.000		96,87

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)		TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024						
					SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TINGKAT REALISASI CAPAIAN (%)	
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
01.2	Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah										
2.3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			98,15			57,146,450		56.090.000		98,15
2.3.2.01.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			98,25			38,118,150		37.450.000		98,25
2.3.2.01.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Aset 31 Opd, 18 Kecamatan	100	99,45	OPD dan Kecamatan	49	166,639,900	49	165.721.000	49	99,45
2.3.2.01.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya Penggolongan dan Kodefikasi BMD	100	98,80	Dokumen	1	317,803,750	1	313.976.000	1	98,80
2.3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terjaminnya keamanan Barang Milik Daerah	100	99,45			843,000,700		838.383.161		99,45
2.3.2.01.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penaksiran/Penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah	100	98,44	Dokumen	1	100,293,000	1	98.724.000	1	98,44
2.3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terdatanya Daftar Pemakai dan Pengguna BMD	100	99,64	Dokumen	1	363,475,000	1	362.175.000	1	99,64
2.3.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Data Aset Tetap	100	97,36	Dokumen	1	80,200,000	1	78.079.000	1	97,36

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)		TARGET DAN REALISASI KINERJA 2024						
					SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TINGKAT REALISASI CAPAIAN (%)	
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
2.3.2. 01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Data Aset Tetap dan Aset Lancar	100	99,92	Dokumen	1	57,185,000	1	55.003.400	1	96,19
2.3.2. 01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Pengelola BMD SKPD	100	93,06	%	1	94,170,000	1	92.300.000	1	98,01

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bima.

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan IKU BPKAD Tahun 2021-2026 analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran Persentase waktu penetapan Perda APBD Kabupaten Bima

Proses penyusunan APBD Kabupaten Bima dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD, yaitu setelah selesainya KUA-PPAS atau Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang waktunya paling lambat minggu II bulan Agustus sampai dengan batas akhir penetapan APBD pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan, sehingga dapat diketahui jumlah waktu yang tersedia bagi penyusunan APBD yaitu selama 142 hari kalender.

2. Indikator Kinerja Sasaran Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima merupakan gabungan laporan keuangan Perangkat Daerah yang ada

di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

Kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP adalah syarat normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang memiliki manfaat bagi pengguna laporan keuangan. (Paragraf 32 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Sedangkan kriteria agar laporan keuangan pemerintah berkualitas, yaitu :

- a. Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila keputusan pengguna dipengaruhi oleh informasi yang termuat didalamnya dengan membantu pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi tersebut.
 - b. Andal, laporan keuangan andal berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta diverifikasi.
3. Indikator Kinerja Sasaran Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca

Dalam rangka menjaga keakuratan dan keandalan data Barang Milik Daerah (BMD) yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Neraca Pemerintah Daerah, BPKAD telah melakukan rekonsiliasi data barang milik daerah (BMD) pada tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 yang bertujuan agar penyajian nilai aset pada laporan keuangan disajikan secara memadai sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekonsiliasi BMD juga dimaksudkan untuk menyamakan perbedaan pencatatan antara laporan realisasi anggaran dengan pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan Rekonsiliasi data BMD tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi data BMD. Tingkat capaian analisis kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target rencana kerja periode sebelumnya.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD BPKAD Kabupaten Bima

NO	Indikator	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tersusunnya dokumen Raperda APBD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tersusunnya laporan pengendalian keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tersusunnya laporan neraca aset sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel
Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD BPKAD Kabupaten Bima

No	Indikator	Satuan	Target Renstra		Proyeksi	
			Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)
1	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)
2	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori (Poin)	A (83)	A (84)	A (83)	A (84)
3	Opini BPK atas LKPD Kab. Bima	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

2.3 Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

B. Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Berdasarkan Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima. Kemudian pada tahun 2022 menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima sesuai Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bima dengan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Perbendaharaan;
5. Bidang Akuntansi;
6. Bidang Aset;

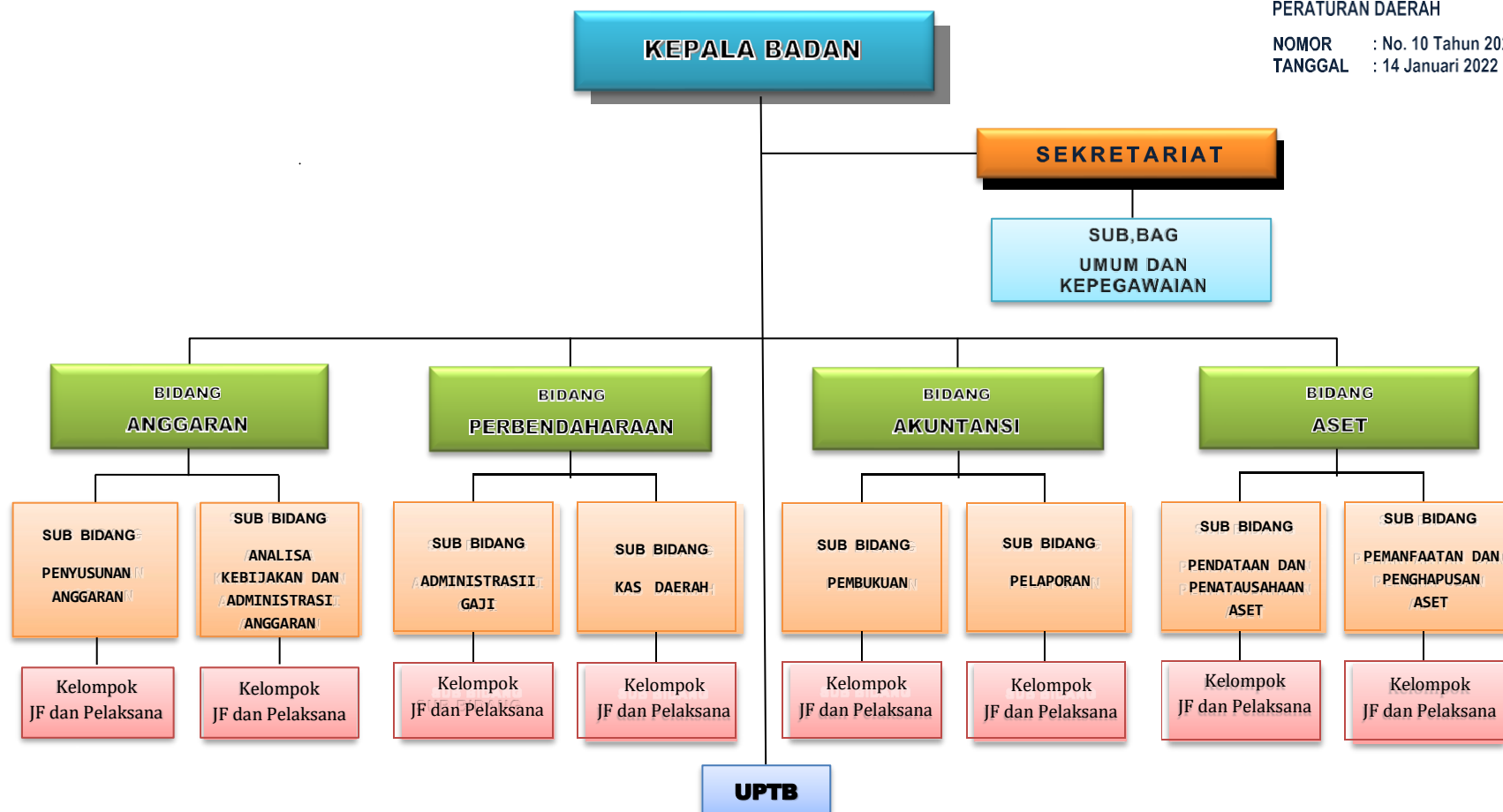
Struktur organisasi Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima adalah sesuai Gambar dibawah :

STRUKTUR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH

NOMOR : No. 10 Tahun 2022

TANGGAL : 14 Januari 2022



2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

I. Fungsi

Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

1. Bidang Anggaran

a) Isu Strategis

- Penyusunan Raperda APBD Murni dan Perubahan secara tepat waktu;
- Penyusunan pedoman dan standar biaya APBD;

b) Permasalahan

- Pembahasan penyusunan KUA PPAS yang relatif panjang dengan DPRD;
- Jumlah kegiatan yang cukup banyak.

2. Bidang Perbendaharaan

a) Isu Strategis

- Ketersediaan anggaran belanja program dan kegiatan APBD; SP2D online;
- Perencanaan pendapatan dana transfer.

b) Permasalahan

- Menumpuknya pengajuan SPM dan SP2D pada akhir tahun anggaran

3. Bidang Aset

a) Isu Strategis

- Tersusunnya neraca aset daerah;

- Optimalisasi aplikasi SIAP BMD;
- Sertifikasi tanah aset daerah.

b) Permasalahan

- Administrasi dan pencatatan barang milik daerah yang belum optimal;
- Aset daerah yang terdapat di setiap kecamatan belum tertata secara akurat.

4. Bidang Akuntansi

a) Isu Strategis

- WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi target RPJMD;
- Tersusunnya Raperda APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

b) Permasalahan

- Kemampuan SDM yang memenuhi regulasi laporan keuangan SAP berbasis akrual sangat terbatas.

II. Sumber Daya Manusia Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

III. Sarana dan Prasarana

- Mengembangkan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan keuangan dan aset yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

IV. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima sehingga Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonomi harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Bima menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Bima

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD							
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penyelenggaraan Daerah					51.111.000		245,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Porsentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penyelenggaraan Daerah	100 %	6 Dokumen	51.042.000	100 %	80.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Porsentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penyelenggaraan Daerah	100 %	2 Dokumen	36.000.000	100 %	47.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perubahan	Porsentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penyelenggaraan Daerah	100 %	4 Dokumen	43.000.000	100 %	47.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Porsentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penyelenggaraan Daerah	100 %	1 Dokumen	43.000.000	100 %	75.000.000
5 02 01 2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah					16.455.348.427		27,296,687,968
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Porsentase Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	12 Dokumen	15.376.990.850	100 %	17.885,000,000
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Porsentase Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	1 Dokumen	519.600.000	100 %	1.131.600.000
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Porsentase Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 Orang/ bulan	61,108,056,782	100 %	74,909,987,968

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Porsentase Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	1 Dokumen	74,360,000	100 %	83,700,000
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Porsentase Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	12 Dokume n	48.000.000	100 %	98,000,000
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Porsentase Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	12 Dokume n	91,000,000	100 %	125,000,000
5 02 01 2.02 08	Penysunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Porsentase Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	12 Dokume n	48,000,000	100 %	75,000,000
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal					161,202,000		204,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Porsentase Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	1 Dokumen	43,267,000	100 %	47,000,000
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Porsentase Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	1 Laporan	38,310,000	100 %	52,000,000
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Porsentase Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	1 Laporan	39,750,000	100 %	52,000,000
5 02 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Porsentase Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	1 Dokuen	39,875,000	100 %	53,000,000
5 02 01 2.05 Adm	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertipnya Penataan Data dan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					868,064,702		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Porsentase Penataan Data dan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1 Dokumen	794,064,702	100 %	905,000,000
5 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Porsentase Penataan Data dan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1 Dokumen	45,000,000	100 %	87,000,000
5 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Porsentase Penataan Data dan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1 Dokumen	40,000,000	100 %	78,000,000
5 02 01 2.06 Adm	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran					580,000,000		988,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Porsentase Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	100 %	1 Paket	15,000,000	100 %	78,000,000
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Porsentase Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	100 %	1 Paket	93,000,000	100 %	122,000,000
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Porsentase Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	100 %	1 Paket	15,000,000	100 %	56,000,000
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Porsentase Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	100 %	0 Paket 1 Paket	7,000,000	100 %	77,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Porsentase Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	100 %	0 Dokumen	25,000,000	100 %	52,000,000
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Porsentase Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	100 %	1 Laporan	340,000,000	100 %	440,000,000
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Porsentase Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	100 %	1 Dokumen	30,000,000	100 %	96,000,000
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Porsentase Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	100 %	1 Dokumen	45,000,000	100 %	67,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						350,500,000		507,000,000
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Porsentase Tersedianya Barang Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 %	10 Unit	28,000,000	100 %	77,000,000
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Porsentase Tersedianya Barang Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 %	10 Unit	322,500,000	100 %	210,000,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Porsentase Tersedianya Barang Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 %	1 Unit	0	100 %	110,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Porsentase Tersedianya Barang Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 %	1 Unit	0	100 %	110,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203,120,000		277,000,000
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Porsentase Tersedianya Jasa Penukung Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 %	1 Laporan	20,000,000	100 %	67,000,000
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Porsentase Tersedianya Jasa Penukung Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 %	1 Laporan	183,120,000	100 %	210,000,000
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						144,000,000		636,000,000
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Porsentase Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	22 Unit	50,000,000	100 %	110,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Porsentase Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	4 Unit	40,000,000	100 %	110,000,000
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Porsentase Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	30 Unit	10,000,000	100 %	63,000,000
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Porsentase Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	20 Unit	44,000,000	100 %	75,000,000
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasi an perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Porsentase Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	1 Unit	0	100 %	278,000,000
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN D AERAH						296,307,801,565		346,326,335,977

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1,596,901,800		1,772,246,000
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Porsentase Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	120 Dokumen	235,506,800	100 %	297,000,000
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Porsentase Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	0 Dokumen 120 Dokumen	207,805,000	100 %	276,000,000
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Porsentase Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	120 Dokumen	0	100 %	423,480,000
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	Porsentase Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	120 Dokumen	0	100 %	271,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Porsentase Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	56 Dokumen	269,900,000	100 %	463,000,000
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	Porsentase Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	56 Dokumen	269,900,000	100 %	385,643,000
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Porsentase Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja		135 Dokumen			
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Porsentase Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	135 Dokumen	227,865,000	100 %	369,000,000
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Kebijakan Bidang Anggaran	Porsentase Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	4 Dokumen	233,600,000	100 %	250,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Porsentase Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	120 Orang	0	100 %	259,123,000
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						784,000,000		822,000,000
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Porsentase Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	10 Dokumen	108,000,000	100 %	251,000,000
5 02 02 2.02 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Porsentase Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	4 Laporan	0	100 %	271,000,000
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Porsentase Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	2 Dokumen	161,925,000	100 %	251,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	Porsentase Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	2 Dokumen	260,075,000	100 %	358,000,000
5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Porsentase Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	4 Dokumen	0	100 %	421,000,000
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan	Porsentase Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	50 Laporan	125,000,000	100 %	156,000,000
5 02 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan	Porsentase Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	200 Dokumen	0	100 %	261,000,000
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran	Porsentase Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	200 Dokumen	0	100 %	261,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Porsentase Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	200 Dokumen	0	100 %	281,000,000
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Porsentase Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	50 Orang	122,000,000	100 %	201,000,000
5 02 02 2.03 Koor	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						1,073,997,850		1,349,000,000
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Porsentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	100 %	2 Laporan	0	100 %	271,000,000
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Porsentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	100 %	12 Dokumen	239,188,000	100 %	261,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Porsentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	100 %	19 Laporan	264,539,000	100 %	379,000,000
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah	Porsentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis	100 %	2 Laporan	163,300,000	100 %	309,000,000
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Porsentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	100 %	90 Dokume n	274,886,000	100 %	391,000,000
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tinda k Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	Porsentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	100 %	12 Dokume n	0	100 %	220,000,000
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah		Porsentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	100 %		0	100 %	230,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	Porsentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	100 %	2 Dokumen	0	100 %	230,000,000
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Porsentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	100 %	1 Dokumen	64,927,000	100 %	271,000,000
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Porsentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	100 %	2 Dokumen	0	100 %	271,000,000
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota	Porsentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	100 %	49 Orang	97,157,850	100 %	285,000,000
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Porsentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	100 %	2 Lembaga	0	100 %	231,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						2,050,337,950		3,595,700,000
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						2,050,337,950		3,595,700,000
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Porsentase Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	100 Dokumen	0	100 %	164,265,000
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Porsentase Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Dokumen	115,306,000	100 %	206,000,000
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Porsentase Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Dokumen	61,146,450	100 %	274,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Porsentase Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Dokumen	42,118,150	100 %	271,000,000
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Porsentase Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	20 Laporan	188,939,900	100 %	373,475,000
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Porsentase Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Laporan	257,773,750	100 %	278,925,000
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Porsentase Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	20 Laporan	732,247,700	100 %	572,776,000
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Porsentase Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Laporan	100,429,000	100 %	269,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Porsentase Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Dokumen	362,675,000	100 %	385,275,000
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Porsentase Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Laporan	70,200,000	100 %	228,200,000
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Porsentase Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Laporan	57,185,000	100 %	279,784,000
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Porsentase Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Orang	62,317,000	100 %	292,500,000

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2019 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

2.7 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT,

1. Strength (kekuatan),

- Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan cukup tinggi (sebagian besar S1 dan S2);
- Tersedia sarana dan prasarana dan teknologi informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD ;
 - a. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten ;
 - b. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;

2. Weaknes (kelemahan),

1. Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami etos kerja dan tanggung jawab serta disiplin kerja;
2. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan adanya ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan dan aset daerah sertarendahnya tingkat kemauan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3. Opportunity (peluang),

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;

Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD diharap mendapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan

pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bima terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4. Threat (ancaman),

- a) Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara Eksekutif dan Legislatif dalam melakukan penilaian dan mensikapi kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan daerah;
- b) Adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah masih bersifat sektoral;
- c) Penerapan Basis Akrual dalam penyusunan laporan keuangan perlu dilakukan penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai dan peningkatan kemampuan pengelola administrasi keuangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Strategi RPJMD

Landasan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah harus mengacu pada target pencapaian sasaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sasaran program RPJMD harus menjadi acuan sekaligus pegangan dalam menyusun rencana tindak yang selanjutnya akan diformulasikan dalam rencana kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD.

Tujuan yang ingin dicapai oleh OPD BPKAD dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah dengan Indikator Program sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran kinerja:
 - Tersusunnya dokumen raperda APBD sesuai dengan ketentuan dengan target kinerja 100%.
 - Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dengan target kinerja 100%.
 - Tersusunnya laporan pengendalian keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dengan target kinerja 100%.

- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator sasaran Tersusunnya laporan neraca aset sesuai ketentuan dengan target kinerja 100%.

Sasaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima yang menjadi tanggung jawab dan tugas pokok BPKAD untuk merealisasikannya adalah seperti dalam tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Ket
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Target setiap tahun

3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Sedangkan Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Bima tahun 2026, berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 program dan kegiatan BPKAD disusun dengan target sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Berdasarkan penelaahan dari sasaran program RPJMD, visi dan misi BPKAD, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang kemudian dilakukan penyesuaian (pemetaan) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima menyusun 3 (Tiga) Program dan 13 kegiatan dengan 74 sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan antara lain :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, penyusunan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun
2027 Kabupaten Bima

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							350.628.692.716,00			356.854.302.716,00
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							350.628.692.716,00			356.854.302.716,00
			KEUANGAN							350.628.692.716,00			356.854.302.716,00
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							36.914.443.526,00			38.174.053.526,00
01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							264.000.000,00			273.000.000,00
01	2.0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penyelenggaraan Daerah	100 %	6 Dokumen	100 %	79.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	80.000.000,00
01	2.0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penyelenggaraan Daerah	-	4 Dokumen	100 %	54.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	59.000.000,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penyelenggaraan Daerah	-	4 Dokumen	100 %	52.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	54.000.000,00
01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penyelenggaraan Daerah	-	4 Laporan	100 %	79.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	80.000.000,00
01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							34.196.393.824,00			35.401.393.824,00
01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	60 Orang/bulan	100 %	32.546.393.824,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	33.546.393.824,00
01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	1 Dokumen	100 %	1.380.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.580.000.000,00
01	2.0	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	12 Dokumen	100 %	46.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	47.000.000,00
01	2.0	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	1 Dokumen	100 %	46.000.000,00	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	47.000.000,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	12 Laporan	100 %	61.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	62.000.000,00
01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	12 Laporan	100 %	76.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	77.000.000,00
01	2.0	00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	12 Dokumen	100 %	41.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	42.000.000,00
01	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							128.000.000,00			131.000.000,00
01	2.0	00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	1 Dokumen	100 %	46.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	47.000.000,00
01	2.0	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	1 Laporan	100 %	51.000.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	52.000.000,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
01	2.0	00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	1 Dokumen	100 %	31.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	32.000.000,00
01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							961.099.702,00			973.099.702,00
01	2.0	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tertipnya Penataan Data dan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1 Dokumen	100 %	875.099.702,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	885.099.702,00
01	2.0	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tertipnya Penataan Data dan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1 Dokumen	100 %	45.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	46.000.000,00
01	2.0	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tertipnya Penataan Data dan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1 Dokumen	100 %	41.000.000,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	42.000.000,00
01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							742.560.000,00			759.560.000,00
01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	-	1 Paket	100 %	17.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
01	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	-	1 Paket	100 %	20.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.000.000,00
01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	-	1 Paket	100 %	17.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000,00
01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	-	1 Paket	100 %	19.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00
01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	-	4 Dokumen	100 %	27.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	28.000.000,00
01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	-	30 Laporan	100 %	564.560.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	574.560.000,00
01	2.0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	-	1 Dokumen	100 %	32.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	33.000.000,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
01	2.0	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Penunjang Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	-	1 Dokumen	100 %	46.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	47.000.000,00
01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							266.000.000,00			267.000.000,00
01	2.0	00	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Barang Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	-	10 Unit	100 %	56.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	57.000.000,00
01	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	-	10 Unit	100 %	210.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	210.000.000,00
01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							211.000.000,00			213.000.000,00
01	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penukang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 %	1 Laporan	100 %	21.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.000.000,00
01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penukang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 %	1 Laporan	100 %	190.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	191.000.000,00
01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							145.390.000,00			156.000.000,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	20 Unit	100 %	70.390.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	75.000.000,00
01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	4 Unit	100 %	46.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	50.000.000,00
01	2.0	00	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	20 Unit	100 %	12.000.000,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	13.000.000,00
01	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, pengadministrasian perkantoran, pengadaan dan pemeliharaan barang SKPD serta evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kualitas Fungsi dan Pemanfaatan Barang dan Peralatan Penunjang Kegiatan Lebih Optimal	100 %	10 Unit	100 %	17.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	18.000.000,00
02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							311.216.249.190,00			315.987.249.190,00
02	2.0		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							1.975.000.000,00			2.176.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	120 Dokumen	100 %	187.000.000,00	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	120 Dokumen	197.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	120 Dokumen	100 %	133.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	120 Dokumen	143.000.000,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
02	2.0	00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	120 Dokumen	100 %	210.000.000,00	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	120 Dokumen	220.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	120 Dokumen	100 %	210.000.000,00	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	120 Dokumen	220.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	56 Dokumen	100 %	253.000.000,00	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen	273.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	56 Dokumen	100 %	253.000.000,00	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	56 Dokumen	273.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	135 Dokumen	100 %	260.000.000,00	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	135 Dokumen	280.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	135 Dokumen	100 %	240.000.000,00	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	135 Dokumen	250.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	4 Dokumen	100 %	110.000.000,00	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	120.000.000,00
02	2.0	00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Administrasi Perencanaan dan Penatausahaan APBD yang Berbasis Kinerja	100 %	120 Orang	100 %	119.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	200.000.000,00
02	2.0		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							2.318.000.000,00			2.398.000.000,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
02	2.0	00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	10 Dokumen	100 %	284.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	10 Dokumen	304.000.000,00
02	2.0	00	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	10 Laporan	100 %	171.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10 Laporan	181.000.000,00
02	2.0	00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	2 Dokumen	100 %	251.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	261.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	2 Dokumen	100 %	358.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	368.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	4 Dokumen	100 %	420.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	430.000.000,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	50 Laporan	100 %	220.000.000,00	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	50 Laporan	230.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	200 Dokumen	100 %	161.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	200 Dokumen	161.000.000,00
02	2.0	00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	200 Dokumen	100 %	161.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	200 Dokumen	161.000.000,00
02	2.0	00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	200 Dokumen	100 %	120.000.000,00	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	200 Dokumen	120.000.000,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
02	2.0	00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Optimalisasi Penyerapan APBD	100 %	50 Orang	100 %	172.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	182.000.000,00
02	2.0	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							2.316.000.000,00			2.376.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	-	2 Laporan	100 %	160.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	160.000.000,00
02	2.0	00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	-	12 Dokumen	100 %	161.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	171.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	-	19 Laporan	100 %	169.000.000,00	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19 Laporan	179.000.000,00
02	2.0	00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	-	2 Laporan	100 %	150.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	160.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	-	90 Dokumen	100 %	280.000.000,00	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	90 Dokumen	290.000.000,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
02	2.0	00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	-	12 Dokumen	100 %	220.000.000,00	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen	220.000.000,00
02	2.0	00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	-	10 Dokumen	100 %	130.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	10 Dokumen	130.000.000,00
02	2.0	00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	-	2 Dokumen	100 %	130.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	130.000.000,00
02	2.0	00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	-	4 Dokumen	100 %	200.000.000,00	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	200.000.000,00
02	2.0	00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	-	2 Dokumen	100 %	200.000.000,00	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	210.000.000,00
02	2.0	00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	-	45 Orang	100 %	285.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Orang	295.000.000,00
02	2.0	00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Berbasis Aktrual	-	4 Lembaga	100 %	231.000.000,00	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	4 Lembaga	231.000.000,00
02	2.0	00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
02	2.0	00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Pengelolaan dan Penyaluran Keuangan yang terarah dan tepat Sasaran	-	1 Laporan	100 %	293.877.249.190,00	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	297.877.249.190,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
					Keuangan								
02	2.0	00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan dan Penyaluran Keuangan yang terarah dan tepat Sasaran	-	10 Laporan	100 %	5.000.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan	5.000.000.000,00
02	2.0	00	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Penyaluran Keuangan yang terarah dan tepat Sasaran	-	5 Laporan	100 %	5.100.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5 Laporan	5.500.000.000,00
02	2.0	5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							630.000.000,00			660.000.000,00
02	2.0	00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Berkualitas	-	10 Dokumen	100 %	400.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	10 Dokumen	420.000.000,00
02	2.0	00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Berkualitas	-	130 Orang	100 %	230.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	130 Orang	240.000.000,00
03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							2.498.000.000,00			2.693.000.000,00
03	2.0	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah							2.498.000.000,00			2.693.000.000,00
03	2.0	00	Penyusunan Standar Harga	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	100 Dokumen	100 %	85.000.000,00	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100 Dokumen	95.000.000,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
03	2.0	00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Dokumen	100 %	130.000.000,00	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	140.000.000,00
03	2.0	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Dokumen	100 %	70.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	75.000.000,00
03	2.0	00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Dokumen	100 %	50.000.000,00	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	60.000.000,00
03	2.0	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	20 Laporan	100 %	90.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	20 Laporan	95.000.000,00
03	2.0	00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Laporan	100 %	310.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	320.000.000,00
03	2.0	00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	50 Laporan	100 %	1.000.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	1.100.000.000,00

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (RP.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLOK UKUR	TARGET	
03	2.0	00	Penilaian Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Laporan	100 %	135.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	145.000.000,00
03	2.0	00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Dokumen	100 %	400.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	420.000.000,00
03	2.0	00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Laporan	100 %	83.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	85.000.000,00
03	2.0	00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	1 Laporan	100 %	65.000.000,00	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	75.000.000,00
03	2.0	00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Aset)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Administrasi dan Dokumen Inventaris Barang serta Fungsi Barang Milik Daerah yang Lebih Optimal	100 %	10 Orang	100 %	80.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	83.000.000,00
TOTAL										350.628.692.716,00			356.854.302.716,00

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran kebijakan dalam bentuk indikasi program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026. Dokumen RENJA menjadi acuan perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan dapat menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsi kelembagaan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset serta barang serta menjadi penunjang pencapaian visi visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Bima, Februari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BIMA



ARIES MUNANDAR, ST., MT

NIP. 197206072000031005



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PUPR

Jl. Gatot Soebroto No. 04 Telp : 0374- 43490 Raba-Bima

RENJA

(RENCANA KERJA)

2026



SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang_Sekretariat_Subbag Program dan Pelaporan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima Tahun 2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2026 ini juga mengacu pada rancangan RKPD, Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Kabupaten Bima.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang

Bima, Desember 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bima

SUWANDI, ST. MT.

Pembina Utama Muda/IVc
Nip. 19710126 199703 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2022	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	15
3.1.1 Terhadap RPJMN	15
3.1.2 Terhadap RENSTRA KEMENTRIAN PUPR	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19
3.2.1 Tujuan	19
3.2.2 Sasaran	20
3.3. Program dan Kegiatan	21
3.3.1 Program	22
3.3.2 Kegiatan	22
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28
BAB V. PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan implementasi dari penjabaran tahunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan review hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu dan Renstra OPD yang berpedoman pada rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi rumusan kegiatan prioritas berdasarkan pada usulan kegiatan masyarakat.

Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima sebagai salah satu komponen Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2014



tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029.

Adapun Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima ditahun 2026 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.

Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun 2026. Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pembangunan di bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Bima harus selalu didukung dengan dana sehingga dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7017);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 205);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor); dan
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 115)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan



Pembangunan serta merealisasikan Program dan Kegiatan selama periode satu tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tahun 2025-2029.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BIMA TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD



**BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2026**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

BAB V. PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIMA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

selain hal tersebut diatas Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima Tahun 2026 juga memperhatikan :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.



Pada Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima memiliki Anggaran sebesar **Rp. 161.894.849.071,-** (*Pagu Anggaran Setelah Perubahan*) terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 13.424.291.420,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 148.470.557.651,-** dengan 11 Program 22 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya target dan capaian dimaksud dapat dilihat pada **Table TC-29** sebagaimana terlampir.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis di Kabupaten Bima untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan indikator yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan **Table TC-29** sebagaimana **terlampir**, dapat dijelaskan hasil capaian kinerja masing-masing indikator. Adapun analisis yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

- a. Pada indikator persentase jalan dalam kondisi mantap, capaian kinerjanya tahun 2024 sebesar **53,11%**, dibandingkan dengan Tahun 2023 sebelumnya yaitu sebesar **54,15%**. Dapat dipahami bahwa pada indikator tersebut telah terjadi penurunan capaian atau **kurang dari target** yang ditetapkan yaitu **61%**. Nilai Anggaran yang dialokasikan pada Program Kegiatan Jalan masih sangat kurang sehingga tidak seimbang dengan tingkat kerusakan yang terjadi, disatu sisi kondisi infrastruktur jalan yang sudah terbangun juga tidak terpelihara dengan baik dan perbaikan ruas-ruas jalan yang sudah dalam kondisi rusak berat tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.



- b. Pada indikator persentase jembatan dalam kondisi baik capaian kinerjanya sebesar **84,28%** tahun 2024, capaian terjadi karena adanya dukungan penganggaran yang mencukupi, perencanaan dan pengawasan pekerjaan dilapangan yang baik dan juga semakin baiknya penyusunan **data base** jalan jembatan.
- c. Persentase jaringan irigasi berfungsi baik, capaian kinerja **tahun 2024** sebesar **57,35%**, tidak ada peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebelumnya yaitu sebesar, terjadi penurunan capaian atau **kurang dari target 51%** . Hal ini tidak terlepas dari kurangnya dukungan anggaran yang dialokasikan pada program kegiatan irigasi baik itu Dana Alokasi Khusus maupun Dana Alokasi Umum, kerusakan alam yang yang akhir-akhir ini menyebabkan sering terjadinya banjir bandang dan tanah longsor sehingga berdampak pada rusaknya infrastruktur bangunan irigasi. Sehingga luas areal sawah irigasi teknis kewenangan kabupaten bima seluas **17.370 Ha** tidak dapat diairi dengan baik sebagaimana capaian kinerja tahun 2023.
- d. Persentase Cakupan akses rumah tangga terlayani air bersih, capaian kinerjanya sebesar **92%** pada tahun 2024. Dalam hal ini berarti mengalami peningkatan capaian dari tahun sebelumnya sebesar **91,51%**, peningkatan capaian terjadi karena adanya dukungan penganggaran baik bersumber dari Dana Alokasi Khusus maupun Dana Alokasi Umum yang mencukupi serta perencanaan dan pengawasan pekerjaan dilapangan yang baik.
- e. Persentase Cakupan rumah tangga terlayani sanitasi layak, capaian kinerjanya sebesar **94,45%** pada tahun 2024. Dalam hal ini berarti mengalami peningkatan capaian dari tahun sebelumnya sebesar **88,67%**, peningkatan capaian terjadi karena adanya dukungan penganggaran baik bersumber dari Dana Alokasi Khusus maupun Dana Alokasi Umum yang mencukupi serta proses perencanaan dan pengawasan pekerjaan dilapangan yang baik.



- f. Pada persentase penurunan kasus pelanggaran fungsi ruang, dimana tolok ukur yang dipakai untuk pencapaian tingkat keberhasilan adalah penyelesaian kasus pelanggaran fungsi ruang yang diselesaikan oleh FPRD. Selama ini, **banyak kasus** pelanggaran fungsi ruang yang **tidak tuntas** berdasarkan kasus yang muncul/teridentifikasi bahwa tidak diselesikannya akibat tidak berfungsinya FPRD dengan baik. Oleh karena itu, selama tahun 2018 hingga tahun 2024, seberapapun kasus pelanggaran fungsi ruang yang muncul **selalu terselesaikan 100%** dari target yang dipasang. Hal tersebut dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pihak dan tim FPRD untuk menyelesaikan masalah dengan rutin melakukan rapat koordinasi dan menghidupkan forum tersebut.

2.3. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dalam melaksanakan Tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghadapi kendala yang menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal di Tahun Anggaran 2023. Adapun permasalahan/hambatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Bima yaitu :

- a. Banyaknya usulan dan tuntutan masyarakat akan pembangunan.

Kondisi Infrastruktur di daerah yang masih kurang serta keterbatasan anggaran yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penentuan skala prioritas pembangunan (Jalan, Jembatan, Saluran Irigasi dan Bangunan Irigasi, Bangunan Gedung, air bersih dan sanitasi serta Penataan Ruang) dimana penentuan tersebut di dasarkan atas Visi dan Misi yang telah di tetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Dokumen Renstra dan Renja di tiap tahunnya.



- b. Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi secara maksimal.

Infrastruktur jalan dan irigasi yang telah dibangun sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal, hal ini diantaranya dapat dilihat dari masih banyaknya ruas jalan dan jembatan serta bangunan irigasi dan jaringannya yang belum terbangun sementara sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga jarak dan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih tinggi dan areal tanam menjadi lebih sedikit. Prasarana dasar lain saluran drainase jalan dan gorong-gorong yang merupakan salah satu fasilitas yang sangat berpengaruh terhadap penataan dan kebersihan lingkungan sehingga berpengaruh terhadap pergerakan aliran air dan umur konstruksi. Keterbatasan berbagai infrastruktur dasar tersebut telah menghambat mobilitas manusia dan barang, akselerasi pertumbuhan ekonomi, memperlambat proses transformasi perekonomian, menghambat kemajuan dan kemandirian wilayah, serta berpotensi menekan tingkat kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dipandang perlu untuk dianggarkan lebih besar untuk pemeliharaan dan pembangunan bangunan pelengkap jalan dan jembatan.

- c. Laju kerusakan jalan dan jembatan serta bangunan irigasi dan jaringan irigasi lebih tinggi dibandingkan dengan penanganan yang dilakukan.

Kerusakan jalan dan jembatan serta bangunan irigasi dan jaringan irigasi yang terjadi baik akibat umur pakai yang sudah lama, penggunaan di luar kapasitasnya maupun karena cuaca dan bencana alam seperti curah hujan yang tinggi dan banjir lajunya cukup tinggi, sementara penanganan yang dilakukan baik dalam bentuk peningkatan, pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan alokasi anggaran yang tersedia sangat terbatas. Sebagai perbandingan bahwa panjang jalan saat ini yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bima adalah 805.993 Km (sesuai SK Bupati Bima



Nomor 188.45/833/069 TAHUN 2024) akan tetapi yang ditangani dalam setahun hanya sekitar 135 Km atau sekitar 16% saja. Begitu juga untuk bangunan irigasi dan jaringan irigasi.

- d. Anggaran Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan serta Bangunan Irigasi dan Jaringan Irigasi yang minim.

Tren penganggaran yang dilakukan tidak menyediakan anggaran yang khusus untuk pemeliharaan rutin yang cukup. Tren penganggaran lebih ke pembangunan/peningkatan/rehab sesuai dengan permintaan masyarakat. Banyaknya permintaan tersebut mempengaruhi minimnya penganggaran untuk pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala infrastruktur kewenangan PUPR Kabupaten Bima. Sehingga inilah yang menyebabkan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan tidak ada perubahan yang berarti, karena infrastruktur yang diperbaiki satu dan dua tahun yang lalu sudah mengalami kerusakan di tahun ke dua dan tahun ke tiga karena tidak pernah dilakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala, akibat minimnya anggaran yang dialokasikan.

- e. Kondisi peralatan Dinas PUPR Kabupaten Bima.

Kondisi Peralatan Dinas PUPR yang rusak berat, menghambat kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bima, padahal kebutuhan pembangunan yang tinggi juga berbanding lurus terhadap kebutuhan peralatan yang memadai. Umur peralatan lapangan/alat berat dan yang lainnya yang dimiliki oleh Dinas PUPR Kabupaten Bima rata-rata sudah sangat tua, di samping membutuhkan biaya perawatan yang cukup tinggi juga output yang dihasilkan terkait dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari peralatan sangatlah minim.



2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik. Dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran harus disusun Dokumen perencanaan daerah terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan turunannya.

Dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Kabupaten Bima, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengedepankan Budaya **“Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat”** dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Kebijakan Pembangunan Prasarana Sarana Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan pada upaya-upaya :

- a. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur;
- b. Penyediaan Jaringan Jalan dan Jembatan untuk membuka daerah terisolir dan mempermudah jangkauan ke sentra produksi;
- c. Penyediaan dan Pelayanan Air untuk Irigasi untuk hasil produksi pertanian dengan pembangunan jaringan irigasi teknis dan pelestarian SDA;
- d. Pembuatan Rencana Teknik Tata Ruang untuk menciptakan kawasan yang serasi seimbang dan berwawasan lingkungan;
- e. Pelaksanaan Bangunan Gedung yang diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai fungsinya, serta memenuhi persyaratan penyelenggaraan bangunan Gedung;
- f. Serta Sistim Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang cukup memadai.



Dalam **Table TC-31** terlampir mengacu pada penetapan program/kegiatan di dalam RKPD Tahun 2025 sebagai bahan analisis perkiraan kebutuhan/rancangan usulan kebutuhan Renja OPD untuk tahun 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima Tahun 2025-2029. (**Table TC-31**)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam era globalisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Terkait dengan usulan masyarakat dan para pemangku kepentingan masih menunggu **proses Musrenbang Kecamatan** dan **Forum OPD** yang akan segera dilaksanakan pada Bulan **Februari tahun 2026**.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.1.1 Terhadap RPJMN

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045, yang berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putraputri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita, yaitu :

1. **Penguatan Ideologi dan Demokrasi:** Memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. **Pertahanan dan Kemandirian Bangsa:** Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong swasembada pangan, energi, dan air.
3. **Lapangan Kerja dan Kewirausahaan:** Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif.
4. **Pembangunan SDM Unggul:** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.



5. **Hilirisasi dan Industrialisasi:** Melanjutkan program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri
6. **Pembangunan dari Desa:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. **Reformasi dan Penegakan Hukum:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memberantas korupsi dan narkoba
8. **Keharmonisan Lingkungan dan Budaya:** Memperkuat keselarasan hidup dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi.

Kementerian/Lembaga dan menjadi pedoman bagi rencana pembangunan daerah. Dalam konteks ini, sinergi antara perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial. Strategi kewilayahan tidak hanya mencakup strategi pembangunan kawasan timur-barat Indonesia, perdesaan-perkotaan namun mencakup pula rencana intervensi pembangunan di tiap provinsi di seluruh Indonesia, untuk menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, dilakukan langkah penguatan pada tata kelola pembangunan terutama aspek pengendalian pembangunan secara terpadu untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan memformulasikan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Hal ini dipertajam dengan pendekatan manajemen risiko pembangunan nasional.

3.1.2 Terhadap RENSTRA KEMENTERIAN PUPR

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 – 2024.



1. VISI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, visi pembangunan jangka menengah nasional yang didasarkan atas integrasi RPJPN 2025-2045 dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan semangat kolaboratif bangsa dalam mewujudkan transformasi Indonesia menuju negara maju. Selaras dengan hal tersebut, sebagai wujud kontribusi terhadap pencapaian visi nasional, Visi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

2. MISI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan yang selaras dengan prioritas nasional, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
- c. Meningkatkan akses infrastruktur keciptakarya yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif



- terhadap perkembangan teknologi;
- f. Memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
- g. Mewujudkan infrastruktur PU perkotaan yang berkelanjutan.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah diuraikan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan 6 (enam) tujuan pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan air nasional;
- b. Memperkuat kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;
- c. Memperkuat akses infrastruktur keciptakarya yang andal dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas;
- e. Meningkatkan pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;
- f. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya; dan
- g. Terwujudnya infrastruktur PU di perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan.

4. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran Strategis (SS) merupakan kondisi yang secara nyata ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai wujud kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sasaran ini berperan sebagai ukuran dampak (outcome) dari intervensi penyelenggaraan infrastruktur, serta menjadi representasi atas kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dalam memenuhi mandat pembangunan nasional.

Adapun 7 (tujuh) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:



1. Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan;
3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Cipta Karya yang andal, aman, dan berkelanjutan;
4. Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas;
5. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional;
6. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan tugas teknis lainnya;
7. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur Perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Renja merupakan Pedoman Perencanaan Perangkat Daerah untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan Satuan Perangkat Daerah secara rinci sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima pada jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029.



3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang dimaksud di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2026

VISI Kabupaten Bima : “Bima Bermartabat Yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan”					
MISI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bima : MISI 3 “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan Ketahanan Pangan, Energi, Air melalui Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan”					
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Meningkatkan pemerataan dan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berkualitas		Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Poin)	%	54,15
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	56,11
		Meningkatnya tata kelola dan kualitas bangunan gedung yang memenuhi standar teknis, fungsional, laik fungsi	Persentase bangunan gedung yang memenuhi ketentuan penyelenggaraan, standar teknis, dan laik fungsi (%)	%	65,50
		Meningkatnya kualitas dan cakupan sistem drainase untuk mendukung pengurangan genangan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	%	27



	Meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase peningkatan kualitas dan kepatuhan penyelenggaraan jasa konstruksi daerah terhadap standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan (%)	%	100
	Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang wilayah	Ketaatan terhadap RTRW dan RDTR (%)	%	72
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum layak dan aman melalui pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	%	46,75
	Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan meningkatnya ketahanan kawasan terhadap banjir, abrasi, dan rob.	Persentase luas lahan yang terlayani irigasi teknis (%)	%	42
		Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%)	%	100
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	18,57
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Nilai)	%	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program Organisasi Perangkat Daerah merupakan Program Prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana Program Prioritas beserta Indikator Keluaran Program dan Pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah.



Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti telah diuraikan di atas, maka program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

3.3.1 Program

Program yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima pada periode Tahun 2026 sebanyak 10 program, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
8. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

3.3.2 Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima pada periode Tahun 2026 sebanyak 22 Kegiatan yang dirinci menjadi 70 Sub Kegiatan, sebagai berikut :



NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian • Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap. - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) • Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam Satu Daerah Kabupaten - Rehabilitasi Check Dam - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya - Normalisasi/Restorasi Sungai - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing - Pembangunan Check Dam - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya • Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam Satu Daerah Kabupaten - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan - Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota



	- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja - Penyediaan Unit pengolahan setempat - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) D
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
6.	Program Penataan Bangunan Gedung • Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG



7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya • Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
8.	Program Penyelenggaraan Jalan • Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Survey Kondisi Jalan/Jembatan - Pembangunan Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan - Rekonstruksi Jalan - Pemeliharaan Rutin Jembatan - Pembangunan Jembatan
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi • Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi • Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota • Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang



	• Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
--	---



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIMA

Rumusan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima pada Tahun 2026 mengajukan usulan sebanyak 11 program, 22 kegiatan dan 70 sub kegiatan dengan total Pagu Dana sebesar **Rp. 161.894.849.071,-**

Lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel TC-31**



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Rencana yang bersifat Operasional yang disusun setiap tahun dan merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas, Renja memuat Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Program Penanganan Jalan dan Jembatan, Irigasi, Bangunan Gedung, Air Bersih, Sanitasi, Drainase dan Pembinaan Jasa Konstruksi serta Kepatuhan Terhadap Tata Ruang.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang tersusun dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini diharapkan bisa menjadi Pedoman bagi seluruh Aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dalam melaksanakan tugasnya demi mencapai Visi Kabupaten Bima yaitu “Bima Bermartabat Yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan” melalui Misi “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan Ketahanan Pangan, Energi, Air melalui Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan”.

Bima, Desember 2025

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Bima**


SUWANDI, ST. MT.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710126 199703 1 004



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merukan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dinama dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bima Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Bima untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh

berkembang di Kabupaten Bima dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinas Sosial Tahun 2026 juga memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali dan Nusa Tenggara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara No. 4438);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02 , Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029;
21. Peraturan Bupati Bima Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Bima dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapaun tujuan disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2026;
4. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Restra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB VI Rancangan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bima Tahun 2024,
2. Evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bima Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bima Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bima Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Bima

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja Capaian program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2025 (Renja PD)	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	4	4	5	6	7	8=7/6	9	10=7+9	11=10/4
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	06	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	6 dok	5 dok	100%
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	100%	3 Lap	3 Lap	100%

1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Org	42 Org	42 Org	42 Org	100%	42 Org	42 Org	100%
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa pengelola kegiatan ASN	9 Org	8 Org	9 Org	9 Org	100%	9 Org	9 Org	100%
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap	100%	18 Lap	18 Lap	100%
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah									
1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	100%

1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	3 Lap	100%
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	26 Paket	26 Paket	100%	26 Paket	26 Paket	100%
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Media	13 Media	16 Media	16 Media	100%	16 Media	16 Media	123%

1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Lap	26 Lap	30 Lap	30 Lap	100%	30 Lap	30 Lap	100%
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	23 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	3 Unit	31 Unit	100%
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Lap	200 Lap	181 Lap	181 Lap	100%	200 Lap	200 Lap	100%
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	100%
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	100%

1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	18 Org	18 Org	18 Org	18 Org	100%	18 Org	18 Org	100%
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 LKS	4 LKS	2 LKS	2 LKS	100%	3 LKS	4 LKS	100%
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial									
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	30 Org	0	50 Org	50 Org	100%	0	50 Org	100%

1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan PsikoSosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	40 Org	40 Org	40 Org	39 Org	97%	428 Org	495 Org	97%
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota									
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	75 Org	65 Org	75 Org	75 Org	100%	75 Org	75 Org	100%
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan									
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota									
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Terpeliharaan ya Taman Makam Pahlawan	1 Taman	1 Taman	1 Taman	1 Taman	100%	1 Taman	1 Taman	100%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bima Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat Keberhasilan
1	Program Pemberdayaan Sosial	
	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Nihil
	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kab./Kota :	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadian dan Pengumpulan Uang atau Barang	Nihil
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota :	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Nihil
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Nihil

	Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Program Rehabilitasi Sosial	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial :	
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Nihil
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan data dan Pengaduan; Pagu	Nihil
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Nihil, merupakan dukungan pelaksanaan Proram Bantuan Sembako
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar :	
	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	Nihil
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota :	
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Nihil
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Nihil, merupakan dukungan pelaksanaan Program

		Keluarga harapan (PKH) dan PBI
4	Program Penanganan Bencana	
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial :	
	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan PsikoSosial	Tidak sesuai target yakni Orang Telantar (OT) direncanakan ditangani sebanyak 40 orang, terrealisasi sebanyak 39 orang, hal sesuai dengan jumlah OT
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota :	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Nihil
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Nihil
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Kegiatan penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nihil
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nihil

	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nihil
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nihil
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nihil
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah :	
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	Nihil
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Nihil
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :	
	Sub Kegiatan Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Nihil
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nihil
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Nihil
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nihil
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nihil

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :	
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Nihil
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nihil
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nihil
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nihil
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nihil
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Nihil
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nihil

- b. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Program Pemberdayaan Sosial	
	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	- Terlaksanya peningkatan kapasitas warga KAT - Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Sosial RI terkait dengan pemberian Bantuan kepada warga KAT berupa : Pembangunan Rumah, Peralatan Rumah Tangga, Jadup, Peralatan kerja serta bibit tanaman dan ternak - Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait bagi pembangunan akses bagi warga KAT - Melakukan Kerjasama dengan LKS dalam rangka mendukung pelaksanaan Program KAT

	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kab./Kota :	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadian dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Sosialisasi ijin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadian (UGB) terhadap BUMD dan BUMN serta Pemerintah Kecamatan
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota :	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Optimalisasi kinerja dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pendampingan Bansos dan penanganan permasalahan sosial di kecamatan
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerjasama yang baik dengan LKS
2	Program Rehabilitasi Sosial	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial :	
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Bekerjasama dengan Pemerintahan Kecamatan dalam rangka pemberian bimbingan kepada anak

		terlantar, dengan menghadirkan Narasumber
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan data dan Pengaduan; Pagu	Terlaksanya layanan data dan pengaduan oleh operator Kabupaten serta operator SIKS-NG masing-masing desa
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	- Dukungan pelaksanaan Program Bantuan Sembako bersama TKSK - Kerjasama dengan pihak BANK terkait Buku KKS Hilang, rusak dan saldo nol - Kerjasama dengan Disdukcapil terkait dengan perbaikan/kevalitan data kependudukan penerima bansos
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar :	
	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	- Koordinasi dan Kerjasama dengan Sentra Kemensos RI yakni Balai Paramitha Mataram
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota :	

	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan kerjasama dengan pendamping sosial dalam melaksanakan verifikasi data kemiskinan ekstrim
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Dukungan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan PBI - Koordinasi dan Kerjasama dengan Pendamping PKH - Kerjasama dengan pihak BANK terkait Buku KKS Hilang, rusak dan saldo nol - Kerjasama dengan Disdukcapil terkait dengan perbaikan/kevalidan data kependudukan penerima bansos Koordinasi dan kerjasama dengan pihak BPJS
4	Program Penanganan Bencana	
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial :	
	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan PsikoSosial	- Koordinasi dengan Dinas Sosial daerah terkait serta pihak pelabuhan untuk kepulangan orang terlantar ke daerah asal
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	

	terhadap kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota :	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terdapat 75 TAGANA dan 18 Pordam dalam penanganan bencana
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	- Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait serta TNI dalam pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan - Koordinasi dengan Dinas PU untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Taman makan Pahlawana
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Kegiatan penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Adanya regulasi sebagai acuan Perencanaan - Koordinasi dengan Bappeda
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Koordinasi dengan Bappeda,Inspektorat, Bag. Adm. Pemerintahan dan Bag. OPA
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN sesuai rencana
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium bagi pengelola adm keuangan sesuai standar

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dengan BPKAD
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah :	
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Koordinasi dengan BPKAD
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dengan BPKAD
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :	
	Sub Kegiatan Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Koordinasi dengan BKD
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Bahan logistik/ kebutuhan atk
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Barang Cetak dan Penggadaan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kerjasama dengan Media Cetak
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD/Lembaga/Mitra di dalam dan luar daerah
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :	

	Sub Kegiatan Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Kerjasama dengan penyedia
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja kebutuhan benda pos
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadministrasi pegawai
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Koordinasi dengan Dinad Perkim - Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal dan hasil yang maksimal.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan program kegiatan di Dinas Sosial.
3. Mengefektifkan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan Instansi terkait baik lingkup Kabupaten Bima maupun diluar Kabupaten Bima.
4. Merencanakan seluruh sub kegiatan yang mendukung indikator SPM serta pengendalian atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. Melakukan pendataan dan verifikasi data bagi masyarakat miskin penerima bantuan sosial secara berkala

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bima berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKK yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU dan IKK pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian IKK Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bima
Kabupaten Bima Tahun 2024

No	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	Satuan	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Renstra PD	Proyeksi	
					2024	2025	2026		2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13
	Renstra 2021-2026									
1	Presentase PMKS yang ditangani dan dibantu (%)	Persen	V	V	63.00	65.00	67.00	69.07	70.00	
2	Cakupan penduduk miskin yang mendapat jaminan sosial dan kesehatan (%)	Persen		V	85.00	87.00	87.00	92.34	93.00	
3	Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial (%)	Persen	V	V	100.00	100.00	100.00	85.00	100.00	
4	Jumlah desa yang melaksanakan verivali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Jumlah		V	90	108	126	191	191	
	Renstra 2025-2029									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Indeks	V		55,73	56.73	57.23	55,73	56.73	57.23
2	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai		V	75.75	77	78	75.75	77	78
3	Persentase PPKS yang tertangani	Persen		V	26.8	33	50	26.8	33	50
4	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen		V	33.06	39.67	43.83	33.06	39.67	43.83
	Program									
1	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melaksanakan pelayanan sosial	Persen			78,82	85,5	89	78,82	85,5	89
2	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	V		15,2	25	33	15,2	25	33
3	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	V		23,15	37	41	23,15	37	41
4	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	V		28,32	23	30	28,32	23	30
5	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	V		11,79	15	20	11,79	15	20

6	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Persen	V		69,56	82	85	69,56	82	85
7	Persentase Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Persen	V		88,07	89	93	88,07	89	93
8	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	V		34,88	38	39	34,88	38	39
9	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persen	V		88,07	89	93	88,07	89	93
10	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	V		5,16	6	12	5,16	6	12
11	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Persen	V		100	100	100	100	100	100
12	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	V		85	100	100	85	100	100
13	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	Persen	V		100	100	100	100	100	100
14	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	V		85,94	86	86	85,94	86	86
15	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Persen	V		100	100	100	100	100	100
16	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Sosial	Persen	V		100	100	100	100	100	100
17	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Sosial	Persen	V		96,92	100	100	96,92	100	100
18	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Sosial	Persen	V		100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Presentase PMKS yang ditangani dan dibantu, ditarget sebesar 63 % dan Pada akhir Tahun 2024 terrealisasi sebesar 69,07 % , ada peningkatan sebesar 6,07 % dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan, antara lain adanya dukungan KPM PKH untuk penanganan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas serta adanya bantuan sosial yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, baik berupa Permakanan, sandang, alat bantu maupun modal usaha.

Untuk indikator Cakupan Penduduk Miskin yang Mendapat Jaminan Sosial dan Kesehatan, ditargetkan sebesar 85 % dan pada akhir Tahun 2024 terealisasi sebesar 92,34 %. Capaian Indikator tersebut melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan adanya penambahan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD maupun PBI JKN, adanya perbaikan NIK yang tidak Valid serta terlaksananya Verivali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga masyarakat yang tidak mampu terdaftar pada DTKS. Selain hal tersebut, juga didukung oleh adanya predikat Universal Health Coverage (UHC) bagi Kabupaten Bima

Indikator persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial , ditargetkan sebesar 100 %. Pada akhir Tahun 2024, terealisasi sebesar 85 %, indikator tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini karena pada awal tahun 2024 tidak dilakukan pemberian bantuan kepada korban bencana disebabkan tidak tersedianya logistik bencana. Pencapaian 85 % untuk indikator tersebut didukung dengan adanya bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial, berupa kebutuhan pokok, sandang, kegiatan psikososial serta adanya partisipasi PSKS yakni : TAGANA sebanyak 75 orang, Pelopor Perdamian sebanyak 18 orang, Pendamping PKH sebanyak 83 orang serta TKSK sebanyak 18 orang.

Untuk indikator Jumlah desa yang melakukan verivali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditargetkan sebanyak 90 desa, pada akhir tahun 2024 terealisasi sebanyak 191 desa. Pencapaian tersebut didukung oleh

peningkatan kapasitas SDM PKH terkait pendampingan verivali DTKS maupun penerima Bansos pada wilayah binaan masing-masing, peningkatan kapasitas operator SINK-NG Desa serta adanya kesadaran Pemerintah Desa untuk melakukan updating DTKS dan penerima Bansos (PKH, BPNT dan PBI).

Dinas Sosial Kabupaten Bima terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan sistem pelayanan, penyediaan sarana dan prasara, peningkatan kapasitas aparatur serta bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Sosial RI.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Bima merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2024 sebagai berikut:Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Keku	Kelemahan
Memiliki aplikasi SINK-NG	Kurangnya sosialisasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	Pendataan PPKS masih belum bisa dilakukan secara optimal karena keterbatasan sumberdaya dan Anggaran

Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Pendataan/Assesment PPKS secara terperinci mempermudah dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun 2026 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Updating, verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/DTSEN dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan kapasitas operator SINK-NG.
3. Optimalisasi pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PPKS diluar panti.
4. Sosialisasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/Penerima Bansos
5. Membuat perencanaan sesuai dengan indikator kinerja dan mutu layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
6. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kegiatan urusan sosial terintegrasi dengan melibatkan bidang teknis, mitra kerja serta relawan sosial.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029, pelaksanaan evaluasi renja tahun sebelumnya dan hasil evaluasi tahun berjalan. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial tahun 2026 untuk mencapai sasaran strategis yang telah dicantumkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2026 dari pagu indikatif sebesar Rp 7.676.405.689.00,- (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Penyempurnaan rancangan renja mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan akhir RKPD. Berikut disajikan Tabel 2.7 (TC-31) yang menyandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Renja Dinas Sosial.

Tabel 2.7

T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bima

OPD : Dinas Sosial Kabupaten Bima

No	Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
										7,676,045,698					6,456,144,984	
I	1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6,295,820,698	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,419,158,484	
1	1	06	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42,470,000	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	22,470,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25,555,000	
	1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	20,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	24,445,000	
2	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,660,484,548	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang ASN	5,547,484,548	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang ASN	4,786,639,984	
	1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bima	Jumlah jasa pengelola kegiatan ASN	8 orang ASN	103,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bima	Jumlah jasa pengelola kegiatan ASN	8 orang ASN	97,300,000	

	1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Kab. Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		0	
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				12,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah					
	1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	Kab. Bima	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	Kab. Bima	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	
	1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Bima	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Bima	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	1	06	01	2.05	03	Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bima	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6,000,000	Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bima	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0	
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				269,319,950	Administrasi Umum Perangkat Daerah					

	1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bima	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	13,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bima	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	46,400,000	
	1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Kab. Bima	Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan yang Disediakan	2 Paket	7,999,950	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Kab. Bima	Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan yang Disediakan		0	
	1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bima	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	16 Media Massa	15,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bima	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0	
	1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	232,720,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	40,000,000	
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20,100,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Bima	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	5,100,000	Pengadaan Mebel	Kab. Bima	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	
	1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bima	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bima	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				177,180,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	3,600,000	

	1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36,180,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53,400,000	
	1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Kab. Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138,000,000	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Kab. Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	265,200,000	
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108,266,200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	59,616,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	30,454,050	
	1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Bima	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	39,399,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Bima	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	46,164,450	
	1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bima	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	3,530,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bima	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya		0	

	1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Paket	5,720,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	
II	1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial				227,850,000	Program Pemberdayaan Sosial				50,810,000	
1	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				55,000,000	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)					
	1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Bima	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial	2 dusun	25,000,000	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Bima	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial		0	
	1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Bima	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 KK	30,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Bima	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya		0	
2	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				20,000,000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			

3	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				152,850,000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
	1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Bima	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	18 Orang	52,850,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Bima	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya		0	
	2	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Kab. Bima	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Kelompok (60 KK)	30,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Kab. Bima	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya		0	
	1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bima	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 LKS	70,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bima	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 LKS	50,810,000	
III	1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial				435,000,000	Program Rehabilitasi Sosial				751,146,500.00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				400,000,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
	06	04	2.01	01		Penyediaan Permakanan	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	60 orang anak terlantar, 12 orang gepeng, 55 orang lansia, 50 orang penyandang disabilitas	200,000,000	Penyediaan Permakanan	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	76 orang anak terlantar, 10 orang gepeng, 82 orang lansia, 71 orang penyandang disabilitas	332,577,000	

	06	04	2.01	02		Penyediaan Sandang	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya	20 orang anak terlantar, 12 orang gepeng, 25 orang lansia, 20 orang penyandang disabilitas	100,000,000	Penyediaan Sandang	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya	70 orang anak terlantar, 10orang gepeng, 70orang lansia, 50 orang penyandang disabilitas	262,087,000	
	06	04	2.01	03		Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu	130 Orang	100,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu	124 Orang	156,482,500	
2	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial				35,000,000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial					
	1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan data dan Pengaduan	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	191 Desa; 337.000 Orang	35,000,000	Pemberian Layanan data yang Pengaduan	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan		0	
IV	1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				177,000,000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				8,250,000	
1	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar				30,000,000	Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar					
	1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak- Anak Terlantar	Kab. Bima	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	15 Orang	30,000,000	Rujukan Anak- Anak Terlantar	Kab. Bima	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	15 Orang	8,250,000	
2	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota				147,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota					
	1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Kab. Bima	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota yang Didata	191 Desa	45,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Kab. Bima	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		0	

	1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bima	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dukungan Program Keluarga Harapan (PKH); 28.158 KPM dan PBI; 18 Kecamatan; 307.861 Jiwa	80,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bima	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		0	
	1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Bima	Meningkatnya perekonomian masyarakat miskin	50 Orang masyarakat miskin yang memperoleh bantuan	22,000,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Bima	Meningkatnya perekonomian masyarakat miskin		0	
V	1	06	06			Program Penanganan Bencana				462,375,000	Program Penanganan Bencana				206,270,000	
1	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				158,375,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
	1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan Bencana	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	600 Orang	50,000,000	Penyediaan Makanan Bencana	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	2.650 Orang	79,500,000	
	1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	200 Orang	50,000,000	Penyediaan Sandang	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	200 Orang	99,970,000	
	1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan PsikoSosial	Kab. Bima	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	50 Orang	58,375,000	Pelayanan Dukungan PsikoSosial	Kab. Bima	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	800 Orang	26,800,000	

2	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota				304,000,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota					
	1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	70 Orang	304,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Bima	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		0	
VI	1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				78,000,000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				20,510,000	
1	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota				78,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota					
	1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bima	Terpeliharanya a Taman Makam Pahlawan	1 Paket		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bima	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan		0	
	1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Kab. Bima	Terpeliharanya a Taman Makam Pahlawan serta jumlah janda veteran yang mendapatkan bantuan sosial	Taman Makam Pahlawan terepelihara, 50 orang veteran dan janda veteran yang mendapat bantuan sosial	78,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Kab. Bima	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan serta jumlah janda veteran yang mendapatkan bantuan sosial	Taman Makam Pahlawan terepelihara, 50 orang veteran dan janda veteran yang mendapat bantuan sosial	20,510,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bima Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang Kecamatan, forum perangkat daerah, maupun musrenbang Kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2026 serta tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bima disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh
Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bima

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota				
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan Sape : Boke, Naru, Bajo Pulo, Buncu, Kowo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah yang diakomodir disesuaikan dengan skala prioritas/Emergensi
		Kecamatan Lambu : Lambu, Lanta, Soro,			Jumlah yang diakomodir disesuaikan dengan skala prioritas/Emergensi
		Kecamatan Lambitu : Kaboro			Jumlah yang diakomodir disesuaikan dengan skala prioritas/Emergensi

		Kecamatan Bolo : Rada			Jumlah yang diakomodir disesuaikan dengan skala prioritas/Emergensi
		Kematan Madapangga : Campa			Jumlah yang diakomodir disesuaikan dengan skala prioritas/Emergensi
		Kecamatan Donggo : Palama			Jumlah yang diakomodir disesuaikan dengan skala prioritas/Emergensi
		Kecamatan Soromandi : Sampunggu, Sai			Jumlah yang diakomodir disesuaikan dengan skala prioritas/Emergensi
		Kecamatan Woha : Penapali			Jumlah yang diakomodir disesuaikan dengan skala prioritas/Emergensi
		Kecamatan Wawo : Raba			Jumlah yang diakomodir disesuaikan dengan skala prioritas/Emergensi
		Kecamatan Monta : Waro, Pela			Jumlah yang diakomodir disesuaikan dengan skala prioritas/Emergensi
		Kecamatan Wera : Kalajena			Jumlah yang diakomodir disesuaikan dengan skala prioritas/Emergensi
2	Program Rehabilitasi Sosial				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	Penyediaan Alat Bantu	Kecamatan Sape : Lamere	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu	28 Unit	Disesuaikan dengan hasil assesment

		Kecamatan Wera : Kalajena			Disesuaikan dengan hasil assesment
3	Program Penanganan Bencana				
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Sandang	Kecamatan Palibelo : Ntonggu, Dore	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana		Disesuaikan dengan hasil assesment
		Kecamatan Woha : Penapali			Disesuaikan dengan hasil assesment

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun, baik ditingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bima tahun 2026 disusun mengacu pada rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bima Tahun 2025-2029, dimana kedua dokumen tersebut, Renja dan Renstra merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029.

Dalam hal tujuan dan sasaran perencanaan program dan kegiatan pada rencana kerja, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bima ditetapkan dengan mempertimbangkan asas kesinambungan dengan arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional serta juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan Provinsi. Sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial telah disesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi yang gunanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045,

sebagai “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di

dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*. Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2026 merupakan tahapan kedua pada periode 2025-2029 dengan arahan Penguatan Fondasi Transformasi.

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 difokuskan dalam tiga arah kebijakan, yang meliputi: (1) sumber daya manusia berkualitas antara lain, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; (2) infrastruktur berkualitas yang diarahkan antara lain, melalui peningkatan infrastruktur konektivitas yang menunjang Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Pariwisata, serta infrastruktur layanan dasar (antara lain infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, dan irigasi), pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, penguatan infrastruktur digital hingga reformasi pengelolaan sampah; serta (3) ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, antara lain melalui penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengembangan skema graduasi bantuan sosial, peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya, percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan, serta peningkatan produksi industri pengolahan.

Penelaahan terhadap kebijakan nasional tersebut menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bima.

Tabel. 3.1.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN BIMA
Tema : "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Tema : Mendorong Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan "
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan utk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (PD 3)
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2)	
Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing (PN 3)	Meningkatkan Daya Saing SDM Kab Bima yang sehat dan unggul (PD 7)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)	Menguatkan Karakter masyarakat Bima yang melalui peningkatan Kegiatan kegiatan Keagamaan (PD 1)
	Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan harmonis (PD 2)
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar (PN 5)	Membangun Kawasan Pariwisata Prioritas, Kawasan Ibukota Kabupaten dan Kawasan strategis lainnya untuk percepatan pengembangan wilayah (PD 4)
Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN6)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk memperkuat mitigasi Bencana (PD 5)
Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public (PN 7)	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Melayani (PD 6)

Sesuai RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan Kabupaten Bima tahun 2026 ditujukan untuk "Mendorong Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan ". Adapun Prioritas pembangunan Kabupaten Bima tahun 2026 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Bima tahun 2026. Penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten Bima dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini

PRIORITAS NUSA TENGGARA BARAT	PRIORITAS KABUPATEN BIMA
Tema : “Penguatan industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan”	Tema : Mendorong Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan”
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian,
Pembangunan Kesejahteraan (PP 4)	peterernakan, perikanan dan pertambangan
Peningkatan Daya Saing Daerah (PP 7)	Meningkatkan Daya Saing SDM Kab Bima yang
Pembangunan Manusia (PP 2)	Menguatkan Karakter masyarakat Bima yang melalui peningkatan Kegiatan kegiatan Keagamaan (PD 1)
	Mendorong terciptanya kondisi masyarakat
Peningkatan Komitmen dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) PP 6	Membangun Kawasan Pariwisata Prioritas, Kawasan Ibukota Kabupaten dan Kawasan strategis lainnya untuk percepatan pengembangan wilayah (PD 4)
Pembangunan Lingkungan (PP 3)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Pembangunan Tata Kelola Pemerintah Daerah (PP 5)	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Melayani (PD 6)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Tujuan, melaksanakan Sasaran, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan Tujuan dilakukan dengan memperhatikan Misi RPJMD yang akan diemban oleh Perangkat Daerah dan pernyataan Tujuan pembangunan jangka menengah dalam dokumen RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, Dinas Sosial Kabupaten Bima adalah mnyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang sosial dengan Dinas daerah Tipe A. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Bima sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan melalui tabel berikut :

Tabel: 3.3
Tujuan Dinas Sosial Kabupaten

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program PD	Outcome Program	Indikator Program PD	Satuan	Target 2026
Mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Tertanganinya PPKS secara optimal	Persentase PPKS yang tertangani				Persen	50
			Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar				Persen	43,83
				Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melaksanakan pelayanan sosial	Persen	89
				Program Rehabilitasi sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	33
						Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	41
						Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	30
						Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	20
						Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Persen	85
						Persentase Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Persen	93

					Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	39
					Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persen	93
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	12
					Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Persen	100
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100
					Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	Persen	100
					Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	86
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persen	100
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial		Nilai	78
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Sosial	Persen	100
					Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Sosial	Persen	100
					Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Sosial	Persen	100

3.3. Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan Dinas Sosial di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan tersebut direncanakan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Bima Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali.

Rencana program dan kegiatan prioritas selanjutnya dituangkan secara lengkap dalam matriks rencana program dan kegiatan prioritas yang meliputi; nama program/kegiatan, indikator kinerja, tahun rencana, lokasi, kebutuhan pendanaan/pagu indikatif, catatan penting, serta prakiraan maju.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bima. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah di rencanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan daerah, serta berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja PD, isu-isu penting tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi, maka Dinas Sosial Kabupaten Bima menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan :

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan, Kendaraan Dinas/Operasional, terdiri dari Sub. Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub. Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sub. Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub. Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

II. Program Pemberdayaan Sosial

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari Sub. Kegiatan :
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

III. Program Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, terdiri dari Sub. Kegiatan :
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan Alat Bantu

IV. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar, terdiri dari Sub. Kegiatan :
 - Rujukan Anak-Anak Terlantar

V. Program Penanganan Bencana

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, terdiri dari Sub. Kegiatan :
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
 - Pelayanan Dukungan PsikoSosial

VI. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota, terdiri dari Sub. Kegiatan :
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bima Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bima Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel: 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial
Kabupaten Tahun 2026

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Rencana		Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
						Bidang Sosial			6,456,144,984			6,545,528,484
I	1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,419,158,484			5,419,158,484
1	1	06	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000			50,000,000
	1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25,555,000		4 Dokumen	25,555,000
	1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	24,445,000		3 Laporan	24,445,000
2	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,883,939,984			4,883,939,984
	1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang ASN	4,786,639,984		45 orang ASN	4,786,639,984
	1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa pengelola kegiatan ASN	8 orang ASN	97,300,000		8 orang ASN	97,300,000
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			86,400,000			86,400,000

	1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	46,400,000		15 Paket	46,400,000
	1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	40,000,000		35 Laporan	40,000,000
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			322,200,000			322,200,000
	1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	3,600,000		300 Laporan	3,600,000
	1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53,400,000		12 Laporan	53,400,000
	1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	265,200,000		12 Laporan	265,200,000
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76,618,500			76,618,500

	1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	30,454,050		2 Unit	25,000,000
	1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	46,164,450		4 Unit	50,000,000
II	1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial			50,810,000			50,810,000
3	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya		50,810,000			50,810,000
	1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		2 LKS	50,810,000		3 LKS	60,000,000
III	1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial			751,146,500			830,000,000
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						

1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			751,146,500			830,000,000
	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal	76 orang anak terlantar, 10 orang gepeng, 82 orang lansia, 71 orang penyandang disabilitas	332,577,000		80 orang anak terlantar, 15 orang gepeng, 85 orang lansia, 75 orang penyandang disabilitas	400,000,000
	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya	70 orang anak terlantar, 10orang gepeng, 70orang lansia, 50 orang penyandang disabilitas	262,087,000		70 orang anak terlantar, 10orang gepeng, 70orang lansia, 50 orang penyandang disabilitas	270,000,000
	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu	124 Orang	156,482,500		125 Orang	160,000,000
IV	1	06	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			8,250,000			8,250,000
1	1	06	05	2.01	Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar			8,250,000			8,250,000
	1	06	05	2.01	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	15 Orang	8,250,000		15 Orang	8,250,000

V	1	06	06			Program Penanganan Bencana			206,270,000			216,800,000
1	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			206,270,000			216,800,000
Orang	1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	2.650 Orang	79,500,000		3.000Orang	90,000,000
	1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	200 Orang	99,970,000		200 Orang	100,000,000
	1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan PsikoSosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	800 Orang	26,800,000		800 Orang	26,800,000
VI	1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			20,510,000			20,510,000
1	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota			20,510,000			20,510,000
	1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	1 Makam	20,510,000		1 Makam	20,510,000

BAB VI

P E N U T U P

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bima Tahun 2026 merupakan suatu langkah strategis untuk mendukung keberhasilan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka pendek.

Dengan telah disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bima Tahun 2026 diharapkan agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahunan untuk masing-masing Bidang pada Dinas sosial Kabupaten Bima sehingga implementasi dari penyusunan rencana kegiatan pendukung keberhasilan program dapat dikaitkan secara nyata dengan kemampuan pembiayaan daerah. Namun demikian, peran dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung harus dapat didorong untuk lebih proaktif dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan bidang sosial.

Diharapkan dengan kerja sama dan niat baik seluruh pelaku Pembangunan Daerah, sasaran-sasaran pembangunan dalam jangka pendek ini dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah maupun Jangka Panjang.

Bima, November 2025
Kepala Dinas Sosial Kab. Bima,

Tajuddin, SH., M.Si
NIP. 19681231 199303 1 120

